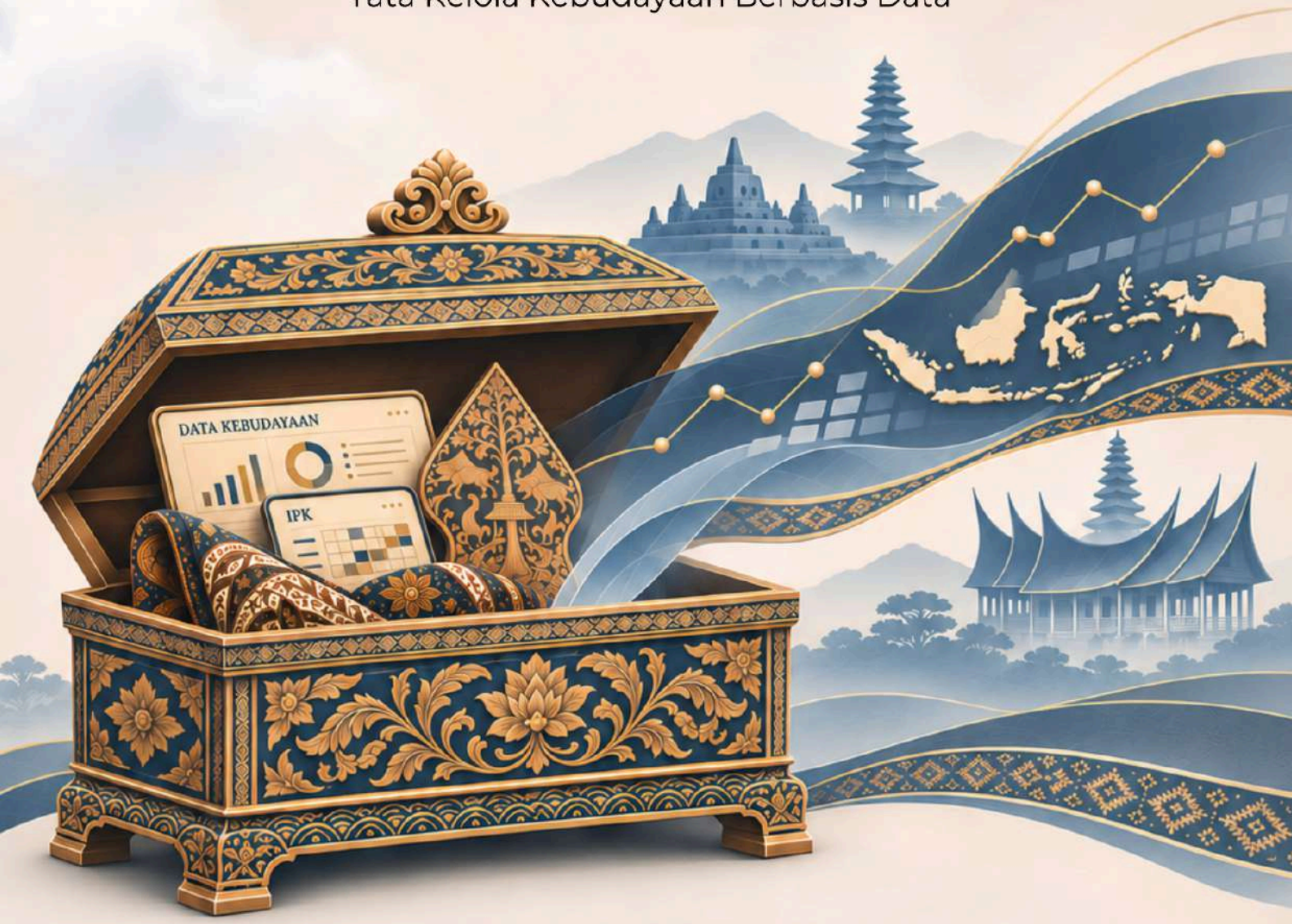
e-PEDOMAN KANDAGA PMK

Kanal Data dan Analisis Gatra Budaya
Tata Kelola Kebudayaan Berbasis Data



Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2026

HAK CIPTA

© 2026 Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jatidiri Bangsa

Seluruh hak dilindungi undang-undang.

DOKUMEN INTERNAL
Hanya untuk keperluan internal
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Dilarang memperbanyak, mendistribusikan, mengubah, atau menggunakan sebagian maupun seluruh isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta, kecuali sebagaimana diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

Judul:
e-PEDOMAN KANDAGA PMK
Kanal Data dan Analisis Gatra Budaya, Tata Kelola Kebudayaan Berbasis Data

Tahun Terbit:
2026

Penerbit:
Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jatidiri Bangsa
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Disusun oleh:
Ayu Dewita
Dian Novico
Yossi Aprilia
Fajar Fermi
Nugroho
M. Khoironi Ishaq
Raka Santoso
Ferdiansyah
Windy Pratama
Resky Puteri

KATA PENGANTAR

Pembangunan kebudayaan memerlukan tata kelola yang berbasis data, bukan asumsi. Selama ini, data Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga, sulit dihubungkan dengan program, dan sering tidak terlihat gapnya. Akibatnya, rekomendasi kebijakan tidak jarang berjalan tanpa dasar yang kuat.

e-Pedoman KANDAGA PMK hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. KANDAGA Kanal Data dan Analisis Gatra Budaya PMK adalah instrumen kerja yang menghubungkan data IPK dengan program K/L secara sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Nama KANDAGA dipilih dengan sengaja. Dalam bahasa Sunda Kuno, kandaga berarti wadah atau peti emas, tempat menyimpan barang berharga. Filosofi ini sejalan dengan misi pedoman ini, menjadi wadah digital yang menghimpun, mengelola, dan menyajikan data kebudayaan sebagai warisan yang berharga.

Buku digital ini disusun dalam 6 sesi yang saling melengkapi:

Sesi 1 — Mengenal KANDAGA PMK
Sesi 2 — Panduan Teknis KANDAGA PMK
Sesi 3 — Matriks Konektivitas IPK–Program K/L
Sesi 4 — Kerangka Analisis dan Standar Rekomendasi
Sesi 5 — *Blueprint* dan *Prototipe* Dashboard KANDAGA PMK
Sesi 6 — Penutup dan Lampiran

e-Pedoman ini bukan sekadar bacaan. Ia dirancang sebagai alat kerja untuk digunakan, dirujuk, dan diterapkan dalam telaahan program pembangunan kebudayaan sehari-hari.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan *e*-pedoman ini. Semoga *e*-PEDOMAN KANDAGA PMK ini menjadi fondasi transformasi tata kelola kebudayaan yang lebih mandiri, berbasis data, dan berkelanjutan.

Selamat membaca dan menggunakan.

Jakarta, November 2026



Ayu Dewita

TENTANG *e*-PEDOMAN KANDAGA PMK INI

Apa Itu *e*-Pendoman KANDAGA PMK Ini?

e-PEDOMAN KANGADA PMK adalah buku digital, yang namanya berasal dari akronim dari Kanal Data dan Analisis Gatra Budaya PMK. Isinya menjelaskan cara menggunakan empat komponen utama KANDAGA:

1. Panduan Teknis KANDAGA PMK
2. Matriks Konektivitas IPK–Program K/L
3. Kerangka Analisis dan Standar Rekomendasi
4. *Blueprint* dan *Prototipe Dashboard* KANDAGA PMK

Buku digital ini **bukan buku teori**. Ia adalah alat kerja yang dirancang untuk digunakan sehari-hari oleh analis, koordinator data, dan pimpinan di lingkungan Kemenko PMK maupun K/L terkait.

Untuk Siapa Buku Digital Ini?

Buku ini ditujukan untuk:

PENGGUNA	KEBUTUHAN
Analis Kebijakan →	Menyusun analisis dan rekomendasi berbasis data IPK
Koordinator Data →	Mengelola dan mengintegrasikan data IPK
Pimpinan →	Mengambil keputusan berbasis bukti
K/L Terkait →	Memahami alur koordinasi dan pelaporan

Apa yang Bisa Anda Dapatkan?

Setelah membaca, Anda akan mampu:

1. Memahami filosofi dan posisi KANDAGA PMK dalam tata kelola kebudayaan
2. Mengikuti alur kerja dan SOP KANDAGA PMK
3. Menyusun Matriks Konektivitas IPK–Program K/L
4. Menggunakan Kerangka Analisis dan Standar Rekomendasi
5. Memahami arsitektur *Blueprint* dan *Prototipe Dashboard* KANDAGA PMK

Bagaimana Buku Digital Ini Disusun?

Buku ini terdiri dari 6 sesi yang saling melengkapi:



Setiap sesi terdiri dari beberapa topik yang dapat dibaca secara berurutan atau sesuai kebutuhan.

Filosofi di Balik Nama

Nama **KANDAGA** berasal dari bahasa Sunda Kuno yang berarti wadah atau peti emas tempat menyimpan barang berharga. Filosofi ini menjadi fondasi Buku digital ini: menjadi wadah digital yang menghimpun, mengelola, dan menyajikan data kebudayaan sebagai warisan yang berharga.

Cara Terbaik Menggunakan Buku Digital Ini

Jika Anda...	Mulai dari...
Baru pertama kali mengenal KANDAGA	Sesi 1
Ingin mengikuti panduan teknis	Sesi 2
Ingin menyusun matriks konektivitas	Sesi 3
Ingin menyusun kerangka analisis dan standar rekomendasi	Sesi 4
Ingin memahami *blueprint* dan *Prototipe dashboard*	Sesi 5
Penutup	Sesi 6
Mencari lampiran	Lampiran

CARA MENGGUNAKAN BUKU DIGITAL INI

Buku digital ini dirancang untuk dibaca sesuai kebutuhan, bukan harus urut dari awal sampai akhir. Anda bisa langsung menuju sesi atau topik yang relevan dengan pekerjaan Anda.

1. Navigasi Antar Sesi

Buku digital ini terdiri dari 6 sesi yang saling melengkapi



Cara berpindah:

- Klik daftar isi untuk menuju sesi tertentu
- Klik tautan di akhir setiap sesi untuk lanjut ke sesi berikutnya
- Gunakan menu navigasi di samping (jika tersedia)

2. Arti Ikon

Setiap sesi menggunakan ikon yang konsisten untuk memudahkan Anda:



3. Cara Mengakses Materi Pendukung

Buku digital ini dilengkapi materi pendukung untuk membantu pembaca memahami dan menerapkan panduan, meliputi:

Materi Pendukung	Keterangan	Link
Contoh	Contoh matriks dan dokumen kerja tersedia pada bagian lampiran.	Lampiran
Referensi	Regulasi dan dokumen pendukung tercantum dalam daftar pustaka.	Daftar Pustaka
Video Tutorial	Video penjelasan mengenai Buku digital dapat diakses dan diunduh melalui tautan yang disediakan.	https://bit.ly/VideoPendekKPMK
Glosarium	Daftar istilah beserta penjelasannya tersedia pada bagian lampiran.	Glosarium

4. Cara Menggunakan Glosarium

Glosarium berisi istilah-istilah yang digunakan dalam Buku digital:



Cara menggunakan:

- Cari istilah yang tidak dipahami
- Baca definisi singkat
- Klik tautan untuk penjelasan lebih lanjut

5. Alur Membaca yang Disarankan

Jika Anda...	Mulai dari...
Baru pertama kali mengenal KANDAGA	Sesi 1
Ingin mengikuti panduan teknis	Sesi 2
Ingin menyusun matriks konektivitas	Sesi 3
Ingin menyusun kerangka analisis dan standar rekomendasi	Sesi 4
Ingin memahami *dashboard* dan *Prototipe*	Sesi 5
Penutup	Sesi 6
Mencari lampiran	Lampiran

DAFTAR ISI

HAK CIPTA **2**
KATA PENGANTAR **3**
TENTANG BUKU DIGITAL INI **4**
CARA MENGGUNAKAN BUKU DIGITAL INI **6**
DAFTAR ISI **9**

SESI 1: MENGENAL KANDAGA PMK **11**
Bagian 1 : Filosofi Nama KANDAGA 11
Bagian 2 : Apa Itu KANDAGA PMK? 12
Bagian 3 : Mengapa KANDAGA PMK Penting? 14
Bagian 4 : 4 Komponen Utama KANDAGA PMK 15
Bagian 5 : Posisi KANDAGA PMK dalam Tata Kelola 17
Bagian 6 : Kaitannya dengan Asta Cita 18
Rangkuman Sesi 1 20

SESI 2 : PANDUAN TEKNIS KANDAGA PMK **21**
Bagian 1: SOP KANDAGA PMK 21
Bagian 2 : Istilah dan Rujukan yang Perlu Dipahami 22
Bagian 3 : Alur Kerja KANDAGA PMK (9 Tahap) 23
Bagian 4 : Cara Menggunakan Matriks Konektivitas 24
Bagian 5 : Cara Menggunakan Kerangka Analisis 26
Bagian 6: Cara Melakukan Telaahan 30
Bagian 7 : SOP Lengkap KANDAGA PMK 30
Bagian 8: Konfirmasi dan Pemantauan Rekomendasi (Tahap 9) 32
Bagian 9: Checklist Kesiapan 33
Rangkuman Sesi 2 34

SESI 3: MATRIKS KONEKTIVITAS SEBAGAI INSTRUMEN PENYELARASAN PROGRAM KEMENTERIAN/LEMBAGA DENGAN INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN **35**
Bagian 1: Mengenal Indeks Pembangunan Kebudayaan 35
Bagian 2: Kedudukan dan Peran IPK dalam Pembangunan 36
Bagian 3: Konsep, Fungsi, dan Struktur Matriks Konektivitas 39
Bagian 4: Tujuh Dimensi dan Dua Puluh Empat Indikator IPK 41
Bagian 5: Dua Pendekatan Penyusunan Matriks 43
Bagian 6: Langkah Penyusunan Matriks 44
Bagian 7: Pembacaan Matriks dan Interpretasi Gap 44
Bagian 8: Tips dan Kesalahan Umum 46
Bagian 9: Checklist Kesiapan 46
Rangkuman Sesi 3 48

SESI 4 : KERANGKA ANALISIS DAN STANDAR REKOMENDASI **49**
Bagian 1: Apa Itu Kerangka Analisis? 49

Bagian 2: 5 Komponen Analisis....50
Bagian 3: Indikator Pertimbangan dan Metode Skoring....50
Bagian 4: Standar Format Rekomendasi....51
Bagian 5: Cara Menyusun Analisis dan Rekomendasi (Alur Berpikir)....54
Bagian 6: Contoh Penerapan (Studi Kasus)....54
Rangkuman Sesi 4....56

SESI 5: BLUEPRINT DAN PROTOTIPE DASHBOARD KANDAGA PMK....57
Bagian 1: Mengenal Blueprint Dashboard KANDAGA PMK....57
Bagian 2: Rancangan Antarmuka Pengguna (User Interface)....60
Bagian 3: Wujud Nyata Prototipe dan Pembagian Hak Akses....62
Bagian 4: Alat Kerja Analisis — Matriks Konektivitas dan Analisis Gap....65
Bagian 5: Sistem Monitoring dan Evaluasi (Formulir dan Unggah Dokumen)....66
Bagian 6: Dasbor Pemantauan Program K/L....69
Bagian 7: Alat Kerja Analisis Lanjutan (Formulir A–D)....70
Bagian 8: Pembacaan Hasil Analisis dan Interpretasi Gap....78
Bagian 9: Keberlanjutan Sistem....79
Bagian 10: Tips dan Kesalahan Umum....80
Bagian 11: Checklist Kesiapan....81
Rangkuman Sesi 5....82

SESI 6: PENUTUP....83
Bagian 1: Ringkasan dan Kesimpulan....83
Bagian 2: Langkah Pertama Setelah Membaca....84
PENUTUP....85

LAMPIRAN-LAMPIRAN....86
Lampiran 1: Contoh Matriks konektivitas Program K/L dengan IPK....86
Lampiran 2: Contoh Matriks Kesesuain Program K/L dengan IPK....87
Lampiran 3: Contoh Matriks Analisis....88
Lampiran 4: Contoh Format Standar Rekomendasi....90
Lampiran 5: Format Policy Brief....94
Lampiran 6 : Alur Tahapan Analisis KANDAGA PMK....98
Lampiran 7 : Contoh Template Monitoring....99
Lampiran 8 : Daftar Istilah (Glosarium)....101

DAFTAR GAMBAR....103
DAFTAR PUSTAKA....105
SURAT KEPUTUSAN....106
TENTANG TIM PENYUSUN....107

SESI 1: MENGENAL KANDAGA PMK

🎯 Tujuan Sesi:

Setelah menyelesaikan sesi ini, pembaca diharapkan:

1. Memahami filosofi nama KANDAGA secara ringkas
2. Memahami apa itu KANDAGA PMK
3. Memahami mengapa KANDAGA PMK penting
4. Mengenal 4 komponen utama KANDAGA PMK
5. Memahami posisi KANDAGA PMK dalam tata kelola kebudayaan
6. Memahami kaitannya dengan Asta Cita

Bagian 1 : Filosofi Nama KANDAGA

📌 Konsep

Nama KANDAGA memadukan fungsi pengelolaan data dengan nilai budaya yang mendasarinya. Dua lapis makna tersebut menjadi landasan identitas KANDAGA PMK.



📖 Penjelasan

Pemilihan nama KANDAGA mencerminkan semangat untuk menempatkan data kebudayaan sebagai aset berharga. Berakar pada bahasa daerah, nama ini menghubungkan identitas budaya dengan kebutuhan tata kelola modern.



Rangkuman Bagian 1

Pemahaman tentang nama, asal-usul, dan filosofi KANDAGA menjadi dasar untuk mengenali identitas serta tujuan penggunaannya. Nilai tersebut menegaskan pentingnya mengelola data kebudayaan sebagai kekayaan yang perlu dijaga dan dimanfaatkan.



Bagian 2 : Apa Itu KANDAGA PMK?

Konsep

KANDAGA PMK adalah Kanal Data dan Analisis Gatra Budaya di lingkungan Kemenko PMK.

Penjelasan

KANDAGA PMK membawa filosofi budaya ke dalam pengelolaan data yang terarah. Filosofi ini menjadi pijakan untuk menghubungkan informasi kebudayaan dengan program pembangunan yang relevan.



Ilustrasi

Melalui KANDAGA PMK, data kebudayaan diolah menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, data menjadi pijakan untuk menyusun kebijakan yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan.



Tips

Bayangkan KANDAGA PMK sebagai peti emas digital yang membuat pekerjaan analisis jadi lebih mudah dan terstruktur.

Rangkuman Bagian 2

KANDAGA PMK menyatukan nilai budaya dan fungsi pengelolaan data dalam satu identitas. Pemahaman ini menjadi dasar untuk mengenali perannya dalam mendukung keterpaduan program kebudayaan.



Bagian 3 : Mengapa KANDAGA PMK Penting?

📌 Konsep

Tanpa data yang terintegrasi, koordinasi kebudayaan berjalan tanpa arah yang jelas.

📖 Penjelasan

Tata kelola kebudayaan membutuhkan informasi yang utuh dan dapat diandalkan agar kebijakan sesuai dengan kebutuhan. KANDAGA PMK hadir untuk menjawab tantangan tersebut melalui pengelolaan data dan analisis yang lebih terstruktur.



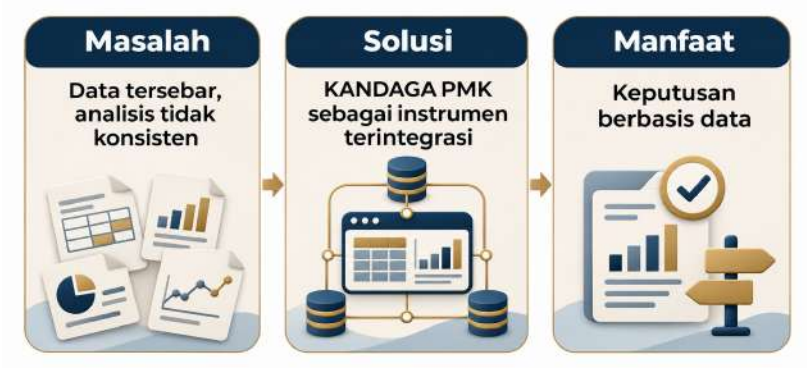
📊 Contoh

Informasi dari berbagai kementerian dan lembaga akan lebih bermakna ketika dapat ditelaah secara bersama. KANDAGA PMK membantu membangun keterhubungan tersebut agar kebutuhan kebudayaan dan dukungan program dapat dilihat secara lebih utuh.



📝 Rangkuman Bagian 3

KANDAGA PMK menjadi langkah untuk memperkuat pemanfaatan data dalam tata kelola kebudayaan. Melalui pendekatan yang terpadu, informasi dapat menjadi dasar yang lebih andal dalam menentukan prioritas dan arah kebijakan.



Bagian 4 : 4 Komponen Utama KANDAGA PMK

📌 Konsep

KANDAGA PMK terdiri dari 4 komponen yang saling melengkapi.

📖 Penjelasan

KANDAGA PMK diibaratkan sebagai sebuah rumah yang setiap bagiannya memiliki peran dan saling melengkapi. Ilustrasi berikut menunjukkan bagaimana keempat komponen membentuk satu kesatuan yang utuh.



Ilustrasi

KANDAGA PMK bekerja melalui empat komponen yang saling melengkapi. Keterpaduan ini memastikan pengelolaan data memiliki dasar, metode, dan alur kerja yang jelas untuk mendukung pemanfaatannya secara berkelanjutan.



Rangkuman Bagian 4

Keempat komponen KANDAGA PMK membentuk landasan kerja yang terpadu dalam pengelolaan data kebudayaan. Setiap komponen memiliki peran tersendiri untuk memastikan proses berjalan secara terarah, konsisten, dan saling mendukung.

Komponen	Fungsi
Panduan Teknis	Mengatur alur kerja
Matriks Konektivitas	Memetakan indikator ke program
Kerangka Analisis	Menstandarkan analisis
Blueprint Dashboard	Merancang digitalisasi

Bagian 5 : Posisi KANDAGA PMK dalam Tata Kelola

📌 Konsep

KANDAGA PMK melengkapi dan menghubungkan sistem yang sudah ada.

📖 Penjelasan

Dalam tata kelola kebudayaan, KANDAGA PMK membantu menjadikan data sebagai acuan bersama antar pihak. Perannya mendukung proses kerja yang lebih selaras, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan kebudayaan.



📊 Ilustrasi

Data dari berbagai kementerian dan lembaga perlu diolah agar dapat menjadi landasan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. KANDAGA PMK mendukung proses tersebut dengan menjembatani informasi lintas sektor dan kebutuhan pengambilan keputusan.



📝 Rangkuman Bagian 5

KANDAGA PMK memperkuat tata kelola kebudayaan melalui pemanfaatan data secara terpadu. Kehadirannya mendukung mekanisme kerja yang sudah berjalan, dengan tetap menghormati kewenangan setiap kementerian dan lembaga.



Bagian 6 : Kaitannya dengan Asta Cita

📌 Konsep

KANDAGA PMK adalah alat untuk menjawab Asta Cita khususnya Asta Cita 8, satu-satunya misi yang secara eksplisit memuat kata "budaya".

📖 Penjelasan

Asta Cita 8:
"Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur."

Program Prioritas Nasional ke-17:
"Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga."

Posisi KANDAGA PMK:
KANDAGA PMK bukan kebijakan. Ia adalah alat untuk melaksanakan kebijakan.

📊 Ilustrasi

KANDAGA PMK mendukung penerjemahan arah Asta Cita ke dalam tata kelola kebudayaan yang lebih terarah. Melalui pemanfaatan data dan penguatan koordinasi, KANDAGA PMK diharapkan membantu menyelaraskan program dengan kebutuhan pemajuan dan pelestarian kebudayaan.



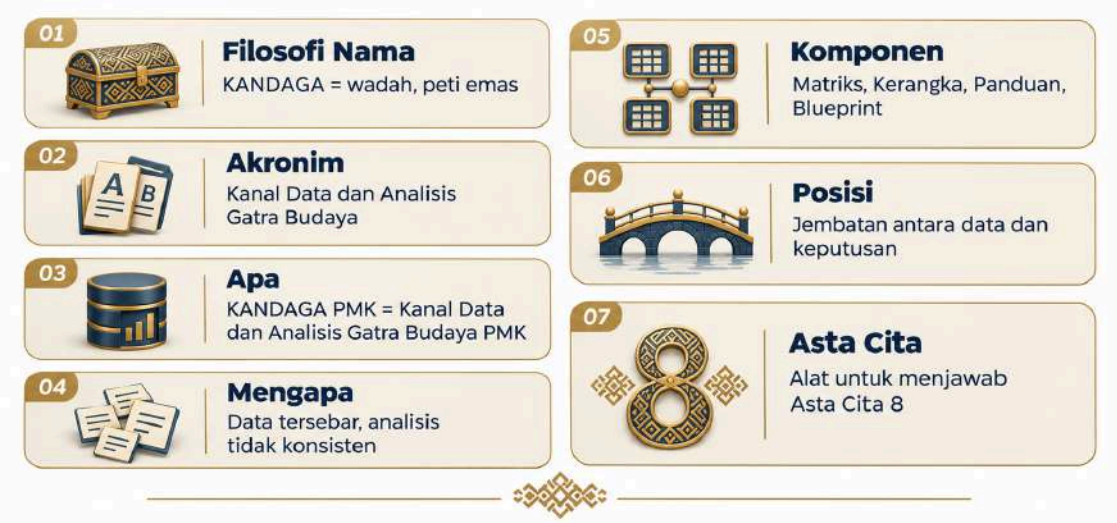
Rangkuman Bagian 6

Keterkaitan dengan Asta Cita menempatkan KANDAGA PMK sebagai pendukung pelaksanaan agenda pembangunan kebudayaan. Pemanfaatan data diharapkan membantu menerjemahkan prioritas nasional menjadi program yang terarah dan sesuai kebutuhan.



Rangkuman Sesi 1

Sesi ini memberikan dasar untuk memahami identitas, tujuan, dan peran KANDAGA PMK dalam tata kelola kebudayaan. Pemahaman tersebut menjadi bekal untuk mempelajari penerapannya secara lebih teknis pada sesi selanjutnya.



Pesan Kunci

KANDAGA PMK adalah wadah digital yang membuat analisis kebudayaan lebih mudah, terstruktur, dan berbasis data sekaligus jembatan antara Asta Cita 8 dan tindakan nyata.

SESI 2 : PANDUAN TEKNIS KANDAGA PMK

🎯 Tujuan Sesi :

Setelah membaca Bagian ini, pembaca diharapkan mampu:

1. Memahami alur kerja KANDAGA PMK dari hulu ke hilir sesuai Petunjuk Teknis Analisis IPK.
2. Mengetahui pembagian peran (PJ) dan tenggat waktu setiap tahapan.
3. Menilai kesesuaian program dengan kategori yang konsisten dan berbasis bukti.
4. Menggunakan Matriks Konektivitas dan Kerangka Analisis secara praktis.
5. Melakukan telaahan, reviu, dan pemantauan sesuai standar.
6. Menerapkan SOP dan Checklist kesiapan kerja.

Bagian 1: SOP KANDAGA PMK

📌 Konsep

Untuk memastikan setiap analisis berjalan konsisten dan terukur, KANDAGA PMK memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terbagi ke dalam 9 tahapan alur kerja. Secara keseluruhan, seluruh rangkaian proses ini dirancang untuk diselesaikan dalam waktu kurang lebih 30 hari kerja (setara ± 6 minggu kalender), memberi ruang verifikasi dan reviu lintas K/L tanpa mengorbankan kualitas analisis.



Keterangan Gambar: Diagram alur 9 tahap yang mencakup kegiatan, PIC/pelaksana, dan estimasi waktu pelaksanaan

📖 **Penjelasan Alur Kerja (9 Tahap):**

Berdasarkan diagram di atas, alur kerja KANDAGA PMK dibagi menjadi tiga klaster utama:

1. **Klaster Pengumpulan dan Pemetaan (Tahap 1–3):** Fase penyiapan bahan baku analisis. Dimulai dari pengumpulan data IPK dan program K/L (Tahap 1), identifikasi konektivitas (Tahap 2), hingga analisis kesesuaian program dengan indikator (Tahap 3).
2. **Klaster Analisis dan Perumusan Rekomendasi (Tahap 4–7):** Tahap pembedahan masalah. Mengidentifikasi kesenjangan/*gap* (Tahap 4), menyusun rekomendasi alternatif (Tahap 5), penentuan prioritas menggunakan metode skoring (Tahap 6), dan menuangkannya ke dalam draf dokumen (Tahap 7).
3. **Klaster Penetapan dan Pemantauan (Tahap 8–9):** Fase akhir memastikan rekomendasi tidak berhenti di atas kertas. Penetapan surat dan dokumen resmi (Tahap 8), serta konfirmasi dan pemantauan pelaksanaan melalui sistem monitoring (Tahap 9).

Dengan memahami peta jalan ini, pembaca dapat melihat keterkaitan antar-tahapan. Rincian teknis mengenai *tools* (seperti Matriks Konektivitas dan Kerangka Analisis) serta SOP detail per langkah akan dibedah pada bagian-bagian selanjutnya

Bagian 2 : Istilah dan Rujukan yang Perlu Dipahami

Pemahaman istilah dan rujukan menjadi bekal awal agar setiap tahapan analisis dilakukan dengan acuan yang sama. Kesamaan pemahaman ini membantu pelaksana bekerja secara konsisten dan menelusuri dasar penyusunan rekomendasi.



Hubungan antar-dokumen: Indikator IPK (Kepmen 215/2025) dipetakan ke program K/L (RIPK/RAN PK/Renstra), dinilai kesesuaiannya, diidentifikasi gap-nya, disusun rekomendasi, ditentukan prioritas, ditetapkan dalam dokumen resmi, lalu dipantau melalui monitoring.



Bagian 3 : Alur Kerja KANDAGA PMK (9 Tahap)

📌 **Konsep**

Alur kerja. selain dirancang selesai dalam 30 hari kerja (setara ± 6 minggu kalender), juga termasuk pembagian peran antar analis memberi ruang verifikasi dan reviu lintas K/L tanpa mengorbankan kualitas analisis.

Tabel Alur Kerja:

Tahap	Kegiatan	PJ	Waktu	Output
1	Pengumpulan & pemetaan data (IPK; program K/L di RAN PK; Renstra Bappenas)	Fungsional Pertama/Umum	Hari 1–3	Daftar indikator prioritas + data program.
2	Identifikasi konektivitas program K/L dengan IPK	Fungsional Pertama & Muda	Hari 4–6	Matriks pemetaan K/L–program.
3	Analisis kesesuaian program K/L dengan indikator IPK	Fungsional Muda	Hari 9–12	Skor kesesuaian + argumentasi.
4	Identifikasi kesenjangan (gap)	Fungsional Muda	Hari 13–15	Daftar gap spesifik.
5	Penyusunan rekomendasi alternatif	Fungsional Madya	Hari 16–19	Alternatif rekomendasi.
6	Penentuan prioritas rekomendasi	Pejabat Tinggi Pratama	Hari 20–21	Skor prioritas (SAW).
7	Penyusunan dokumen rekomendasi	Fungsional Madya	Hari 22–26	Draf dokumen.
8	Penetapan surat & dokumen rekomendasi	Pejabat Tinggi Madya/ Pratama	Hari 27–28	Surat & dokumen resmi.
9	Konfirmasi & pemantauan melalui sistem monitoring	Fungsional Pertama/Umum	Hari 29–30	Laporan pemantauan.

📊 **Ilustrasi Alur (Timeline):**



Catatan: Hari 7–8 adalah jeda alami (penyelesaian tahap 2 dan persiapan tahap 3); gunakan untuk verifikasi awal bila data belum lengkap.

Bagian 4 : Cara Menggunakan Matriks Konektivitas

📌 **Konsep**

Matriks Konektivitas adalah alat utama untuk memetakan indikator IPK ke K/L pengampu dan menilai kesesuaian program.

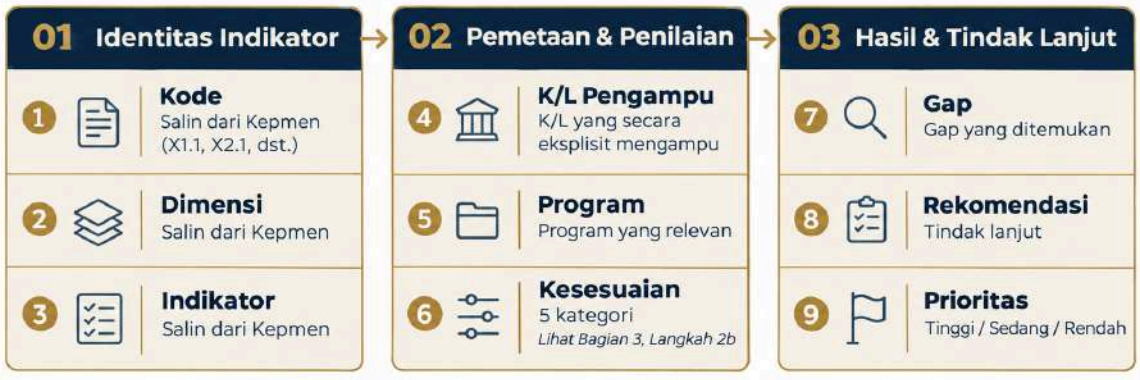
Langkah 1: Siapkan Data

Penggunaan Matriks Konektivitas diawali dengan menyiapkan data yang lengkap dan dapat ditelusuri sumbernya. Persiapan ini menjadi dasar agar pemetaan hubungan antara indikator IPK dan program K/L dilakukan secara tepat dan konsisten.



Langkah 2 : Isi Matriks

Setelah data siap, isi setiap kolom matriks secara berurutan dengan mengacu pada dokumen sumber dan hasil analisis. Pengisian yang konsisten membantu memastikan hubungan antara indikator, program, dan tindak lanjut dapat ditelusuri dengan jelas.



Langkah 3: Verifikasi

Verifikasi dilakukan untuk memastikan isi matriks sesuai dengan informasi dari K/L terkait. Melalui konfirmasi dan perbaikan, matriks dapat menjadi dasar analisis yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.



Langkah 4: Simpan

Kunci matriks agar tidak terubah, simpan di folder digital M-2/Matriks, dan beri versi serta tanggal (contoh: v1_20261006).

Bagian 5 : Cara Menggunakan Kerangka Analisis

📌 Konsep

Kerangka Analisis digunakan untuk membedah gap dan menyusun rekomendasi yang objektif dan berbasis bukti.

Langkah 1: Ambil Data dari Matriks

Ambil data dari kolom K/L, Program, Kesesuaian, dan Gap.

Langkah 2a : Analisis (5 Komponen)

Kerangka analisis membantu menelaah dukungan program terhadap pencapaian indikator IPK secara sistematis. Setiap komponen memandu analis untuk menghasilkan temuan yang jelas sebagai dasar penyusunan rekomendasi.

KOMPONEN	PERTANYAAN PANDUAN	OUTPUT
01 Identifikasi K/L	Apakah ada K/L? →	Daftar K/L
02 Identifikasi Program	Apakah ada program? →	Daftar program
03 Analisis Kesesuaian	Sejauh mana sesuai? →	Skor
04 Identifikasi Gap	Apa yang belum terpenuhi? →	Daftar gap
05 Rekomendasi	Apa tindak lanjutnya? →	Rekomendasi

Langkah 2b : Menetapkan Kategori Kesesuaian

Dasar Penilaian:

Kategori kesesuaian tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya program, melainkan dinilai dari tiga kriteria utama yang dianalisis secara bersama-sama:

1. **Kesesuaian tujuan** — sejauh mana tujuan program mendukung kondisi yang hendak dicapai melalui indikator IPK.
2. **Kesesuaian sasaran** — sejauh mana penerima manfaat atau kelompok sasaran program sesuai dengan kelompok yang diukur oleh indikator.
3. **Data dukung hasil program** — sejauh mana tersedia bukti bahwa program menghasilkan perubahan yang relevan dengan indikator IPK.

Ketiga kriteria tidak boleh dinilai secara terpisah. Program yang tujuannya relevan tetapi sasarannya tidak tepat, atau tidak memiliki bukti hasil, tidak dapat dikategorikan "Sesuai".

Definisi Data Dukung:

Data dukung adalah bukti yang dapat ditelusuri, meliputi dokumen program/kegiatan (Renstra, Renja, RAN PK, dokumen program), indikator kinerja program beserta target dan realisasi, laporan evaluasi atau laporan pelaksanaan program, data capaian indikator IPK yang relevan, dan keterangan resmi dari K/L pelaksana. Data dukung tidak cukup berupa pernyataan umum tanpa dokumen, atau hanya berupa daftar kegiatan tanpa hasil yang terukur.

Tabel Kriteria Operasional per Kategori:

KATEGORI	KRITERIA UTAMA	PEMBEDA
Tidak Sesuai	Tujuan, sasaran, dan intervensi tidak memiliki hubungan yang dapat dijelaskan dengan indikator IPK. Tidak ada dokumen atau bukti keterkaitan.	Tidak ada keterkaitan atau bukti
Kurang Sesuai	Keterkaitan tidak langsung atau terbatas; belum memadai menjawab tujuan, sasaran, atau aspek utama indikator. Hubungan bersifat kebetulan atau terlalu umum.	Hubungan lemah atau umum
Cukup Sesuai	Ada keterkaitan substantif dan dasar yang jelas, tetapi masih ada kesenjangan pada sasaran, intervensi, atau hasil yang diharapkan.	Jelas, tetapi belum lengkap
Sesuai	Tujuan, sasaran, dan intervensi selaras dengan indikator. Hubungan dapat dijelaskan dan didukung dokumen serta bukti hasil yang relevan.	Selaras dan didukung bukti
Sangat Sesuai	Tujuan, sasaran, intervensi, dan hasil sangat erat dengan indikator. Bukti hasil kuat, terukur, dan dapat ditelusuri; berkontribusi langsung pada capaian indikator.	Kontribusi langsung dan terukur

Langkah Penetapan Kategori (6 Langkah):

1. Membandingkan tujuan program dengan tujuan pengukuran indikator.
2. Memeriksa kesesuaian kelompok sasaran program dengan kelompok yang diukur indikator.
3. Menilai keterkaitan intervensi program dengan aspek yang diukur indikator.
4. Memeriksa ketersediaan data dukung hasil program.
5. Menetapkan kategori kesesuaian disertai alasan yang dapat ditelusuri.
6. Mencatat kebutuhan verifikasi apabila informasi atau data belum mencukupi.

Kapan Verifikasi Diperlukan:

Verifikasi wajib dicatat dan dilakukan apabila terjadi salah satu kondisi berikut:

1. Dokumen program tidak ditemukan atau tidak lengkap.
2. Target dan realisasi indikator kinerja tidak tersedia.
3. Kelompok sasaran program tidak jelas atau ambigu.
4. Terdapat perbedaan data antar-dokumen (mis. Renstra vs laporan).
5. Tidak ada bukti hasil program yang relevan dengan indikator.
6. Terdapat keraguan mengenai kewenangan K/L pelaksana.

Contoh Penalaran:

Program "peningkatan kapasitas masyarakat" belum tentu dikategorikan "Sesuai" dengan indikator "pendapatan pelaku budaya", apabila tidak ada bukti bahwa program menjangkau pelaku budaya dan meningkatkan penghasilan mereka. Kategori yang tepat adalah "Kurang Sesuai" atau "Cukup Sesuai" tergantung kekuatan keterkaitan dan bukti yang tersedia.

Prinsip: keberadaan atau keberhasilan suatu program tidak secara otomatis membuktikan bahwa program tersebut meningkatkan indikator IPK. Hubungan kontribusi harus dianalisis dengan mempertimbangkan bukti hasil, konteks, dan faktor lain yang relevan.

Perbedaan Kesesuaian dan Gap:

Kesesuaian adalah penilaian sejauh mana program mendukung indikator (hasilnya berupa kategori 5 tingkat). Gap adalah uraian mengenai apa yang belum terpenuhi akibat ketidaksesuaian tersebut (hasilnya berupa pernyataan gap yang spesifik dan berbasis bukti). Contoh: kategori "Cukup Sesuai" menghasilkan gap "pembinaan talenta belum disertai fasilitasi pertunjukan berbayar".

Jenis-Jenis Gap:

1. Kesenjangan tujuan, tujuan program belum langsung menjawab indikator.
2. Kesenjangan sasaran , penerima manfaat belum sesuai kelompok yang diukur.
3. Kesenjangan intervensi, bentuk kegiatan belum menyediakan dukungan yang diperlukan.
4. Kesenjangan hasil, keluaran program belum terhubung ke perubahan yang diharapkan.
5. Kesenjangan pengukuran, indikator kinerja program belum mengukur hasil relevan.
6. Kesenjangan tata kelola ,belum ada pembagian peran atau koordinasi memadai.
7. Kesenjangan indikator dan data, indikator/sumber data IPK belum menggambarkan aspek yang diukur.

Langkah 3: Susun Rekomendasi (SAW)

Penyusunan rekomendasi dilakukan dengan membandingkan alternatif tindak lanjut secara terukur. Metode SAW membantu menentukan prioritas berdasarkan kriteria berbobot, sehingga pilihan yang diusulkan memiliki dasar penilaian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.



Bobot dan Panduan Skor 1–5:

KRITERIA	BOBOT	SKOR 1 • RENDAH	SKOR 5 • TINGGI
Urgensi	30%	Tidak mendesak →	Sangat mendesak
Dampak	25%	Pengaruh kecil ke indikator →	Pengaruh besar ke indikator
Kewenangan	20%	Di luar mandat pelaksana →	Sepenuhnya dalam mandat
Kemudahan	15%	Sulit / lama →	Mudah / cepat
Sumber Daya	10%	Anggaran, SDM, atau data tidak tersedia →	Anggaran, SDM, dan data tersedia lengkap

Total bobot: 100%

Rumus: Skor = (U × 0,30) + (D × 0,25) + (K × 0,20) + (Km × 0,15) + (SD × 0,10)
Kategori Prioritas: 4,00–5,00 Tinggi; 3,00–3,99 Sedang; 1,00–2,99 Rendah.

Langkah 4: Reviu

Reviu internal dilakukan oleh Telaah; perbaikan dilakukan oleh Analis.

Bagian 6: Cara Melakukan Telaahan

📌 Konsep

Telaahan adalah proses memeriksa dan menganalisis kesesuaian program secara mendalam sebelum rekomendasi disahkan.



Bagian 7 : SOP Lengkap KANDAGA PMK

SOP 1: Pengumpulan dan Pemetaan Data

Pengumpulan dan pemetaan data dilakukan secara terstruktur untuk memastikan bahan analisis tersedia dan dapat ditelusuri sumbernya. Pembagian tugas serta waktu pelaksanaan membantu proses berjalan tertib dan menghasilkan data awal yang siap digunakan pada tahap berikutnya.



SOP 2: Pemetaan dan Analisis Kesesuaian

Pemetaan dan analisis kesesuaian dilakukan untuk menilai dukungan program K/L terhadap indikator IPK. Hasilnya menjadi dasar untuk mengenali kesenjangan dan menentukan kebutuhan tindak lanjut secara lebih tepat.

	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU
01	Petakan indikator ke K/L pengampu	Fungsional Pertama & Muda	Hari 4–6
02	Identifikasi program K/L	Fungsional Muda	Hari 9–10
03	Nilai kesesuaian (5 kategori + alasan)	Fungsional Muda	Hari 11–12
04	Identifikasi jenis gap	Fungsional Muda	Hari 13–15

SOP 3: Penyusunan dan Prioritas Rekomendasi

Penyusunan rekomendasi mengubah temuan analisis menjadi usulan tindak lanjut yang terarah. Penetapan prioritas membantu menentukan usulan yang perlu didahulukan, sebelum dituangkan dalam dokumen rekomendasi.

	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU
01	Susun alternatif tindak lanjut (minimal 2 opsi)	Fungsional Madya	Hari 16–19
02	Skoring SAW	Pejabat Tinggi Pratama	Hari 20
03	Tetapkan prioritas	Pejabat Tinggi Pratama	Hari 21
04	Susun dokumen rekomendasi	Fungsional Madya	Hari 22–26

SOP 4: Penetapan, Reviu, dan Pemantauan

Tahap akhir memastikan rekomendasi telah melalui pemeriksaan, memperoleh pengesahan, dan dikonfirmasi bersama K/L terkait. Pemantauan selanjutnya membantu menelusuri tindak lanjut serta menjaga kesinambungan pelaksanaannya.



Bagian 8: Konfirmasi dan Pemantauan Rekomendasi (Tahap 9)

📌 **Konsep**

Monitoring bertujuan memverifikasi temuan kepada K/L dan pemangku kepentingan, memastikan ketepatan data dan interpretasi, menyepakati tindak lanjut, serta memantau pelaksanaan rekomendasi dan perubahan indikator secara berkala.

Langkah Kerja (6 Langkah):

1. Memverifikasi data, informasi program, dan argumentasi analisis.
2. Mengonfirmasi hasil penilaian dan kesenjangan dengan K/L terkait.
3. Menyempurnakan rekomendasi berdasarkan hasil validasi.
4. Menyepakati pihak yang bertanggung jawab, langkah tindak lanjut, dan kebutuhan dukungan.
5. Menetapkan mekanisme pemantauan pelaksanaan rekomendasi.
6. Menggunakan hasil pemantauan sebagai masukan untuk memperbarui analisis dan rekomendasi pada periode berikutnya.

Mekanisme Pemantauan:

1. Pencatatan status — setiap rekomendasi dicatat statusnya: belum dilaksanakan / sedang dilaksanakan / selesai.
2. Perbandingan capaian — membandingkan capaian indikator IPK sebelum dan sesudah pelaksanaan rekomendasi.
3. Dokumentasi — seluruh hasil pemantauan didokumentasikan dalam sistem monitoring dan folder digital.
4. Jadwal reviu berkala — pemantauan dilakukan secara berkala (mis. triwulanan) dan hasilnya dilaporkan.
5. Tindak lanjut — apabila rekomendasi tidak berjalan, dicatat kendala dan alternatif penyesuaiannya.

Indikator Keberhasilan Monitoring:

1. Seluruh rekomendasi memiliki status yang jelas.
2. Data capaian indikator terdokumentasi sebelum dan sesudah.
3. Setiap kendala pelaksanaan tercatat beserta tindak lanjutnya.
4. Hasil pemantauan digunakan untuk pembaruan analisis periode berikutnya.

Prinsip yang Dijaga:

1. Berbasis bukti, setiap kesimpulan didukung data/dokumen yang dapat ditelusuri.
2. Konsisten, definisi, skala, dan kriteria diterapkan sama.
3. Transparan, alasan penilaian dan pemilihan rekomendasi dicatat.
4. Lintas sektor, kontribusi indikator dapat dipengaruhi lebih dari satu K/L.
5. Berorientasi hasil, membedakan keluaran program dari perubahan indikator IPK.
6. Dapat ditindaklanjuti, rekomendasi menyebutkan pelaksana, langkah, dan dukungan.

Penanggung Jawab dan Waktu: Fungsional Pertama/Umum, Hari 29–30 (Tahap 9).

Contoh Penerapan:

Rekomendasi "fasilitasi pertunjukan seni berbayar" berstatus awal "belum dilaksanakan". Setelah koordinasi dengan K/L menjadi "sedang dilaksanakan". Dipantau jumlah talenta yang memperoleh penghasilan, dibandingkan dengan capaian indikator X1.1 sebelum dan sesudah, hasil dicatat di sistem monitoring, dan menjadi masukan pembaruan analisis periode berikutnya.

Bagian 9: Checklist Kesiapan

Sebelum memulai, pastikan semua item berikut sudah tersedia (centang □ jika sudah):



Contoh :

1. Indikator: X1.1 (Ekonomi Budaya) — persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikannya sumber penghasilan.
2. K/L dan Program: Kementerian Kebudayaan — Pembinaan SDM Kebudayaan melalui Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya.

3. Kesesuaian: Cukup Sesuai — tujuan dan sasaran relevan, tetapi belum ada bukti jaminan penghasilan.
4. Gap: Kesenjangan intervensi (pembinaan talenta belum disertai fasilitasi pertunjukan berbayar) dan kesenjangan pengukuran (belum ada pemantauan penghasilan peserta).
5. Rekomendasi: (a) fasilitasi pertunjukan seni berbayar; (b) kemitraan dengan penyelenggara acara; (c) pendampingan profesionalisme; (d) manajemen usaha seni.
6. Prioritas (SAW): skor tertinggi masuk kategori Tinggi.
7. Dokumen dan penetapan: disusun, direviu, ditandatangani, didistribusikan.
8. Monitoring: pantau jumlah talenta yang memperoleh penghasilan; bandingkan capaian indikator sebelum dan sesudah.

Rangkuman Sesi 2



Panduan Teknis ini adalah SOP yang mengatur alur kerja KANDAGA PMK. Ia memastikan setiap langkah dikerjakan secara konsisten, oleh siapa pun, dan kapan pun, sehingga hasil analisis selalu objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

SESI 3: MATRIKS KONEKTIVITAS SEBAGAI INSTRUMEN PENYELARASAN PROGRAM KEMENTERIAN/LEMBAGA DENGAN INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

🎯 Tujuan Sesi :

Setelah membaca sesi ini, pembaca diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dan kedudukan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dalam pembangunan nasional dan daerah.
2. Memahami keterkaitan pembangunan kebudayaan dengan berbagai sektor pembangunan.
3. Memahami konsep dan fungsi Matriks Konektivitas.
4. Memahami dimensi dan dua puluh empat indikator IPK.
5. Memahami dua pendekatan penyusunan matriks (Top-Down dan Bottom-Up).
6. Memahami membaca matriks untuk mengidentifikasi gap (kesenjangan).

Bagian 1: Mengenal Indeks Pembangunan Kebudayaan

📌 Konsep

IPK adalah ukuran capaian pembangunan kebudayaan yang mencerminkan kondisi kehidupan kebudayaan masyarakat pada tingkat nasional dan provinsi, mencakup tujuh dimensi dan dua puluh empat indikator. Dasar penetapannya adalah Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 215/M/2025 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2024.

1.1 Definisi Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah ukuran yang menggambarkan capaian pembangunan kebudayaan melalui sejumlah dimensi dan indikator yang mencerminkan kondisi kehidupan kebudayaan masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun provinsi. IPK tidak hanya mengukur keberhasilan pelestarian seni dan warisan budaya, tetapi juga menggambarkan bagaimana kebudayaan berkembang dan memberikan manfaat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, ekonomi, ketahanan sosial, literasi, dan kesetaraan gender. Dengan demikian, IPK merupakan instrumen untuk melihat sejauh mana pembangunan kebudayaan telah menjadi bagian dari pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Dimensi dan Indikator yang Diukur dalam IPK

IPK Tahun 2024 terdiri atas tujuh dimensi dan dua puluh empat indikator yang menggambarkan berbagai aspek pembangunan kebudayaan. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki keterkaitan dengan berbagai urusan dan sektor pembangunan. Oleh karena itu, pencapaiannya tidak dapat hanya dibebankan kepada sektor yang menangani kebudayaan. Rincian dimensi dan indikator disajikan pada Bagian 4.

1.3 Dasar Hukum

1. Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 215/M/2025 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2024.
2. (Rancangan) Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pemajuan Kebudayaan Tahap I Tahun 2026–2029.

Bagian 2: Kedudukan dan Peran IPK dalam Pembangunan

📌 **Konsep**

Pembangunan kebudayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan daerah. IPK berperan memperkuat identitas bangsa, mendukung pembangunan manusia, memperkuat ketahanan sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjamin keberlanjutan budaya; di tingkat daerah, IPK membantu mengidentifikasi potensi, menentukan prioritas, mengintegrasikan kebudayaan dalam perencanaan, mengembangkan ekonomi berbasis budaya, dan memperkuat partisipasi masyarakat.

2.1 Kedudukan dan Peran IPK dalam Pembangunan Nasional

Pembangunan kebudayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Kebudayaan memiliki peran dalam membentuk identitas bangsa, memperkuat karakter masyarakat, menjaga persatuan, serta membuka peluang pengembangan ekonomi dan kesejahteraan. IPK menjadi penting karena dapat digunakan untuk:

1. Memperkuat identitas dan karakter bangsa, melalui menggambarkan keberlanjutan nilai, tradisi, pengetahuan, dan identitas budaya sebagai bagian dari jati diri bangsa.
2. Mendukung pembangunan manusia dengan mendorong penguatan pendidikan, literasi, kreativitas, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan kebudayaan.
3. Memperkuat ketahanan sosial melalui mendukung toleransi, solidaritas, gotong royong, dan kohesi sosial dalam kehidupan masyarakat.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membuka peluang pengembangan ekonomi kreatif, aktivitas seni, produk budaya, dan sumber penghasilan masyarakat.
5. Menjamin keberlanjutan budaya dengan memastikan warisan budaya, tradisi, dan pengetahuan lokal dapat dilindungi, dikembangkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

2.2 Kedudukan dan Peran IPK dalam Pembangunan Daerah

Setiap daerah memiliki karakteristik, potensi, dan tantangan kebudayaan yang berbeda. Oleh karena itu, IPK dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk memahami kondisi pembangunan kebudayaan dan menentukan arah kebijakan sesuai kebutuhan daerah. Manfaat IPK bagi pembangunan daerah antara lain:

1. Mengidentifikasi potensi daerah, mengetahui kekuatan dan kondisi pembangunan kebudayaan berdasarkan dimensi dan indikator IPK.

2. Menentukan prioritas pembangunan, mengidentifikasi dimensi dan indikator yang memerlukan perhatian serta intervensi lebih lanjut.
3. Mengintegrasikan kebudayaan dalam perencanaan daerah, menghubungkan isu kebudayaan dengan program pendidikan, ekonomi, pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa.
4. Mengembangkan ekonomi berbasis budaya, mengoptimalkan potensi seni, tradisi, warisan budaya, dan produk lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat.
5. Memperkuat partisipasi masyarakat, mendorong keterlibatan komunitas budaya, pelaku seni, masyarakat adat, dan generasi muda dalam pembangunan daerah.

IPK bukan hanya menggambarkan capaian pembangunan kebudayaan, tetapi juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas, menyusun program, dan mengevaluasi arah pembangunan nasional maupun daerah.

2.3 Dampak Ketidakoptimalan Pembangunan Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan yang tidak mendapatkan perhatian dan dukungan secara memadai dapat menimbulkan berbagai risiko bagi keberlanjutan pembangunan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Aspek	Risiko yang Dapat Timbul
Identitas dan warisan budaya	Berkurangnya pewarisan tradisi, bahasa daerah, pengetahuan loka dan identitas budaya antargenerasi.
Ketahanan sosial	Melemahnya solidaritas, gotong royong, toleransi, dan kohesi sosia masyarakat.
Ekonomi masyarakat	Tidak optimalnya pemanfaatan potensi budaya sebagai sumber penghasilan dan kesempatan kerja.
Pendidikan	Kurangnya pengenalan nilai, pengetahuan, dan kearifan lokal kepada generasi muda.
Pembangunan daerah	Potensi budaya daerah tidak teridentifikasi dan tidak dimanfaatkar sebagai modal pembangunan.
Kesetaraan dan partisipasi	Terbatasnya kesempatan kelompok masyarakat, termasuk perempuan, untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonom dan budaya.

Dengan demikian, pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik tanpa memperhatikan aspek kebudayaan berisiko tidak sepenuhnya menghasilkan kesejahteraan yang berkelanjutan.

2.4 Keterlibatan Lintas Sektor dalam Pembangunan Kebudayaan

Salah satu tantangan dalam pembangunan kebudayaan adalah belum meratanya pemahaman para pemangku kepentingan mengenai kedudukan IPK dan keterkaitannya dengan program pembangunan di masing-masing sektor. Dalam praktiknya, kebudayaan masih sering dipahami sebagai urusan yang identik dengan kegiatan kesenian, festival, pelestarian cagar budaya, dan program kementerian/lembaga atau perangkat daerah yang menangani kebudayaan. Padahal, apabila dilihat dari tujuh dimensi dan dua puluh empat indikator IPK, pembangunan kebudayaan memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Dimensi IPK	Keterkaitan dengan Sektor Pembangunan
Ekonomi Budaya	UMKM, ekonomi kreatif, ketenagakerjaan, pemberdayaan ekonom masyarakat.
Pendidikan	Pendidikan formal, kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan SDM.
Ketahanan Sosial Budaya	Pembangunan sosial, pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, dan penguatan kohesi sosial.
Warisan Budaya	Perlindungan cagar budaya, tata ruang, infrastruktur, dan pariwisata.
Ekspresi Budaya	Kesenian, ruang publik, komunitas, dan partisipasi masyarakat.
Budaya Literasi	Pendidikan, perpustakaan, akses informasi, dan transformasi digita
Gender	emberdayaan perempuan, kesetaraan kesempatan, dan partisipa dalam pengambilan keputusan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesungguhnya telah melaksanakan program yang berkontribusi terhadap pembangunan kebudayaan, meskipun tidak selalu secara eksplisit menggunakan nomenklatur program kebudayaan.

Namun, kontribusi tersebut belum seluruhnya teridentifikasi, terpetakan, dan dihubungkan dengan indikator IPK. Akibatnya, terdapat beberapa tantangan:

1. Belum semua aktor memahami keterkaitan program sektoral dengan pembangunan kebudayaan.
2. Kontribusi program kementerian/lembaga terhadap indikator IPK belum seluruhnya teridentifikasi.
3. Potensi tumpang tindih maupun kesenjangan dukungan program belum terpetakan secara sistematis.

4. Koordinasi lintas sektor masih perlu diperkuat agar program masing-masing sektor dapat saling melengkapi.
5. Belum optimalnya pemanfaatan IPK sebagai salah satu rujukan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Persoalannya bukan berarti sektor lain belum melaksanakan pembangunan kebudayaan. Banyak program sektoral telah memberikan kontribusi, tetapi keterkaitan dan kontribusinya terhadap pencapaian IPK belum seluruhnya dikenali dan dikelola dalam satu kerangka bersama.

2.5 Sinkronisasi dan Kolaborasi Lintas Sektor

Pembangunan kebudayaan memiliki karakteristik lintas sektor sehingga memerlukan keterlibatan berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Sinkronisasi dan kolaborasi diperlukan untuk:

1. Menyamakan pemahaman mengenai arah dan sasaran pembangunan kebudayaan.
2. Mengidentifikasi kontribusi masing-masing sektor terhadap tujuh dimensi dan dua puluh empat indikator IPK.
3. Menyelaraskan program dan kegiatan agar saling mendukung.
4. Mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan pencapaian indikator dan dukungan program yang tersedia.
5. Memperkuat koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan kebudayaan.

Bagian 3: Konsep, Fungsi, dan Struktur Matriks Konektivitas

📌 Konsep

Matriks Konektivitas adalah tabel pemetaan dua arah yang menghubungkan tujuh Dimensi dan dua puluh empat Indikator IPK dengan Program/Kegiatan Kementerian/Lembaga. Matriks ini berfungsi sebagai alat analisis untuk melihat keterkaitan program dengan indikator IPK, mengidentifikasi gap, dan menemukan indikator yang belum memiliki keterkaitan program — bukan untuk mengejar angka IPK.

3.1 Konsep dan Fungsi Matriks Konektivitas

Dengan matriks ini, dapat diketahui dengan cepat:

- Indikator IPK yang sudah didukung oleh program Kementerian/Lembaga.
- Indikator yang belum didukung sama sekali.
- Sejauh mana kesesuaian antara program dan indikator tersebut.
- Kesenjangan (gap) yang memerlukan tindak lanjut.

💡 **Catatan Penting:** Matriks ini bukan untuk mengejar angka IPK. Matriks ini berfungsi sebagai alat analisis untuk melihat apakah program Kementerian/Lembaga memiliki keterkaitan dengan indikator dalam dimensi IPK, mengidentifikasi di mana letak gap-nya, serta

mengidentifikasi indikator yang tidak ada keterkaitannya dengan program Kementerian/Lembaga dan perlu adanya penyesuaian lebih lanjut.

3.2 Struktur Matriks

Matriks Konektivitas memiliki delapan kolom utama, yaitu Kode, Dimensi, Indikator, K/L Pengampu, Program/Kegiatan, Relevansi/Kesesuaian, Gap, dan Rekomendasi. Contoh format pengisian matriks secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

Kode	Dimensi	Indikator	K/L Pengampu	Program / Kegiatan	Relevansi / Kesesuaian	Gap	Rekomendasi
X6.2	Budaya Literasi	Persentase penduduk yang mengakses internet	Kementerian Komunikasi dan Digital	*Operation and Maintenance* akses internet	Sesuai	Tidak ada	Lanjutkan program
X2.1	Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian	Kementerian ndidikan Dasar dan Menengah	Belum teridentifikasi	Tidak Sesuai	Gap 2	Usulkan program baru
X5.3	Ekspresi Budaya	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat	lum teridentifikasi	Belum teridentifikasi	Tidak Sesuai	Gap 1	Usulkan K/L pengampu baru

Contoh di atas bersifat ilustratif dan perlu diverifikasi terhadap dokumen perencanaan yang menjadi rujukan.

Bagian 4: Tujuh Dimensi dan Dua Puluh Empat Indikator IPK

📌 Konsep

IPK Tahun 2024 terdiri atas tujuh dimensi dengan total dua puluh empat indikator. Setiap indikator memiliki kode unik (X1.1, X2.1, dan seterusnya) yang digunakan secara konsisten dalam penyusunan matriks.

4.1 Rangkuman Dimensi dan Jumlah Indikator

Kode	Dimensi	Jumlah Indikator
D1	Ekonomi Budaya	2
D2	Pendidikan	3
D3	Ketahanan Sosial Budaya	3
D4	Warisan Budaya	6
D5	Ekspresi Budaya	4
D6	Budaya Literasi	3
D7	Gender	3
Total		**24**

4.2 Daftar Dua Puluh Empat Indikator IPK

Kode	Dimensi	Indikator
X1.1	Ekonomi Budaya	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikannya sumber penghasilan.
X1.2	Ekonomi Budaya	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung produk budaya yang menjadikannya sumber penghasilan.
X2.1	Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian.
X2.2	Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang memiliki fasilitas sarana dan prasarana kebudayaan.
X2.3	Pendidikan	Persentase penduduk yang berpartisipasi dalam kegiatan budaya di satuan pendidikan.

Kode	Dimensi	Indikator
X3.1	Ketahanan Sosial Budaya	Persentase penduduk yang berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong.
X3.2	Ketahanan Sosial Budaya	Persentase penduduk yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
X3.3	Ketahanan Sosial Budaya	Persentase penduduk yang memiliki toleransi terhadap keberagaman.
X4.1	Warisan Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan.
X4.2	Warisan Budaya	Persentase warisan budaya takbenda yang ditetapkan.
X4.3	Warisan Budaya	Persentase museum yang dikelola secara profesional.
X4.4	Warisan Budaya	Persentase desa/kelurahan yang memiliki komunitas budaya.
X4.5	Warisan Budaya	Persentase penduduk yang mengunjungi situs warisan budaya.
X4.6	Warisan Budaya	Persentase penduduk yang berpartisipasi dalam pelestarian warisan budaya.
X5.1	Ekspresi Budaya	Persentase penduduk yang berpartisipasi dalam kegiatan seni.
X5.2	Ekspresi Budaya	Persentase penduduk yang menonton pertunjukan seni.
X5.3	Ekspresi Budaya	Persentase penduduk yang melakukan olahraga tradisional dan/atau permainan rakyat.
X5.4	Ekspresi Budaya	Persentase penduduk yang berpartisipasi dalam kegiatan komunitas budaya.
X6.1	Budaya Literasi	Persentase penduduk yang membaca buku.
X6.2	Budaya Literasi	Persentase penduduk yang mengakses internet.
X6.3	Budaya Literasi	Persentase penduduk yang mengakses perpustakaan.
X7.1	Gender	Persentase perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan budaya.
X7.2	Gender	Persentase perempuan yang bekerja di sektor budaya.
X7.3	Gender	Persentase perempuan yang mengambil keputusan dalam keluarga terkait kegiatan budaya.

Catatan: Daftar indikator di atas disusun berdasarkan Kepmen Kebudayaan No. 215/M/2025 dan perlu diverifikasi terhadap dokumen resmi.

Bagian 5: Dua Pendekatan Penyusunan Matriks

📌 **Konsep**

Terdapat dua pendekatan dalam menyusun Matriks Konektivitas: *Top-Down* (dari indikator IPK ke program K/L) dan *Bottom-Up* (dari dokumen perencanaan ke dimensi IPK). Pemilihan pendekatan bergantung pada ketersediaan data program dan dokumen perencanaan.

5.1 Pendekatan Top-Down (Berbasis IPK)

Pendekatan ini berangkat dari dua puluh empat indikator IPK, kemudian mengidentifikasi program Kementerian/Lembaga yang mendukung pencapaian masing-masing indikator. Pendekatan ini cocok digunakan jika data program Kementerian/Lembaga belum terpusat.

5.2 Pendekatan Bottom-Up (Berbasis Program K/L)

Pendekatan ini berangkat dari dokumen perencanaan, misalnya Rencana Aksi Nasional Pemajuan Kebudayaan (RAN PK), kemudian memetakan program-program tersebut ke dalam dimensi IPK yang relevan. Pendekatan ini cocok digunakan jika dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga sudah tersedia.

5.3 Contoh Format Bottom-Up (Diadaptasi dari RAN PK 2026–2029)

Contoh berikut diadaptasi dari RAN PK 2026–2029. Program dan pemetaan perlu diverifikasi terhadap dokumen perencanaan yang menjadi rujukan.

Program K/L (Output)	K/L Penanggung Jawab	Relevansi Kunci	Dimensi IPK Terkait (Outcome)
Penguatan kompetensi SDM melalui Gita Bahana Nusantara	Kementerian Kebudayaan	Konteks pendidikan dan pertunjukan seni musik	Dimensi Pendidikan dan Ekspresi Budaya
Operation and Maintenance akses internet	Kementerian Komunikasi dan Digital	Meningkatkan akses internet	Dimensi Budaya Literasi

Bagian 6: Langkah Penyusunan Matriks

📌 Konsep

Penyusunan matriks dilakukan secara sistematis melalui lima langkah: persiapan, pemetaan, penilaian, verifikasi, dan finalisasi. Setiap langkah memiliki keluaran yang jelas dan melibatkan penanggung jawab yang berbeda.



Bagian 7: Pembacaan Matriks dan Interpretasi Gap

📌 Konsep

Matriks tidak hanya diisi, tetapi juga harus dibaca untuk pengambilan keputusan. Bagian ini Memahamikan tiga jenis *gap*, cara membaca status kesesuaian, penanganan program non-relevan, dan contoh penerapan end-to-end.

7.1 Tiga Jenis *Gap*

Identifikasi jenis gap membantu tim memahami letak kesenjangan, mulai dari belum adanya K/L pengampu, belum tersedianya program relevan, hingga program yang belum mendukung indikator. Temuan ini menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi yang tepat sasaran.



7.2 Cara Membaca Status Kesesuaian

Status kesesuaian membantu menentukan tindak lanjut berdasarkan dukungan program terhadap indikator IPK. Melalui status ini, tim dapat menilai apakah program perlu dilanjutkan, diperkuat, atau ditinjau kembali.



7.3 Program Non-Relevan (Studi Kasus RAN PK)

Dalam dokumen perencanaan, sering ditemukan program yang bersifat administratif, regulasi, atau dukungan teknis internal, misalnya pembuatan peta geospasial atau harmonisasi hukum. Program seperti ini tidak dipaksakan masuk ke dalam *Gap* 1, 2, atau 3.

Solusi: Kategorikan program tersebut sebagai **Program Pendukung/Prasyarat**, yaitu program yang tidak secara langsung mendukung indikator IPK, tetapi menjadi fondasi atau prasyarat bagi tercapainya indikator tersebut. Rekomendasinya adalah memastikan program tersebut tetap berjalan sebagai fondasi pendukung, tanpa harus memaksakan pencocokan indikator.

7.4 Contoh Penerapan *End-to-End*

1. **Indikator:** X1.1 (Ekonomi Budaya) — persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikannya sumber penghasilan.

2. **K/L dan Program:** Kementerian Kebudayaan — Pembinaan SDM Kebudayaan melalui Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya.
3. **Kesesuaian:** Cukup Sesuai — tujuan dan sasaran relevan, tetapi belum ada bukti jaminan penghasilan.
4. **Gap:** Kesenjangan intervensi (pembinaan talenta belum disertai fasilitasi pertunjukan berbayar) dan kesenjangan pengukuran (belum ada pemantauan penghasilan peserta).
5. **Rekomendasi:** (a) fasilitasi pertunjukan seni berbayar; (b) kemitraan dengan penyelenggara acara; (c) pendampingan profesionalisme; (d) manajemen usaha seni.
6. **Prioritas (SAW):** skor tertinggi masuk kategori Tinggi.
7. **Dokumen dan penetapan:** disusun, direviu, ditandatangani, didistribusikan.
8. **Monitoring:** pantau jumlah talenta yang memperoleh penghasilan; bandingkan capaian indikator sebelum dan sesudah.

Bagian 8: Tips dan Kesalahan Umum

📌 Konsep

Panduan praktis berupa hal yang sebaiknya dilakukan dan dihindari dalam penyusunan dan pembacaan matriks.



Bagian 9: Checklist Kesiapan

Sebelum memulai, pastikan semua item berikut sudah tersedia (centang □ jika sudah):

No	Item	Status
1	Data indikator IPK tersedia (Kepmen 215/M/2025)	□
2	Daftar K/L pengampu tersedia	□

No	Item	Status
3	Daftar program K/L tersedia (RAN PK/Renstra)	□
4	Template matriks tersedia	□
5	Template rekomendasi tersedia	□
6	Folder digital tersedia	□
7	Tim memahami alur dan kriteria kesesuaian	□
8	Jadwal disepakati	□

Rangkuman Sesi 3

- IPK adalah instrumen untuk menggambarkan capaian pembangunan kebudayaan melalui tujuh dimensi dan dua puluh empat indikator.
- Kedudukan pembangunan kebudayaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah.
- Pencapaian pembangunan kebudayaan membutuhkan keterlibatan berbagai K/L dan pemerintah daerah.
- Matriks Konektivitas adalah pemetaan program K/L dengan 7 Dimensi dan 24 Indikator IPK secara dua arah.
- Sumber: Keputusan Menteri Kebudayaan No. 215/M/2025 tentang IPK Tahun 2024, dan RPerpres RANPK Tahap I Tahun 2026–2029.
- Arah pemetaan bisa *Top-Down* (dari IPK ke Program) atau *Bottom-Up* (dari Program K/L ke Dimensi IPK).
- Fokus analisis adalah *gap* kesesuaian program, bukan *gap* capaian angka.
- Program non-relevan: program administratif/regulasi dicatat sebagai Program Pendukung, tidak dipaksakan masuk *Gap*.
- Tindak lanjut: *gap* yang ditemukan menjadi masukan bagi K/L untuk menyesuaikan programnya, atau bagi perumus kebijakan/K/L Pengampu Teknis Kebudayaan untuk merevisi indikator yang termuat dalam IPK.



SESI 4 : KERANGKA ANALISIS DAN STANDAR REKOMENDASI

Tujuan Sesi:

Setelah membaca sesi ini, pembaca diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dan fungsi Kerangka Analisis.
2. Menerapkan 5 komponen analisis secara berurutan.
3. Menggunakan penggunaan indikator pertimbangan dan metode skoring berbobot (SAW).
4. Menyusun rekomendasi sesuai standar format yang komprehensif.
5. Mengaplikasikan alur berpikir analisis dan rekomendasi pada studi kasus nyata.

Bagian 1: Apa Itu Kerangka Analisis?

Konsep

Kerangka Analisis adalah panduan sistematis untuk menganalisis kesesuaian program K/L dengan indikator IPK. Ia memastikan setiap analis menggunakan metode yang sama, sehingga hasil analisis konsisten, objektif, dan mudah dibandingkan.

Mengapa Perlu Kerangka Analisis?

Berbeda dengan analisis capaian yang berhenti pada angka, kerangka ini membedah tiga lapis *gap* yaitu:

1. K/L Pengampu, Apakah ada K/L yang secara eksplisit mengampu indikator?
2. Program, Apakah ada program yang relevan dengan indikator tersebut?
3. Kesesuaian, Sejauh mana program tersebut benar-benar mendukung indikator?

Catatan Penting Kerangka ini bukan untuk mengejar angka IPK. Kerangka ini berfungsi untuk melihat apakah program K/L sudah tepat sasaran, dan di mana letak *gap*-nya agar bisa segera ditindaklanjuti.

Bagian 2: 5 Komponen Analisis

Kerangka Analisis terdiri dari 5 komponen yang harus dilalui secara berurutan:



(Contoh penerapan kelima komponen ini akan dibahas pada Bagian 6).

Bagian 3: Indikator Pertimbangan dan Metode Skoring

📌 Konsep

Indikator pertimbangan adalah parameter untuk menilai prioritas tindak lanjut. Tujuannya agar pemilihan rekomendasi tidak subjektif (berdasarkan preferensi pribadi atau asumsi).

Daftar Indikator Pertimbangan:



Metode Skoring Berbobot (SAW/WSM):

Metode ini mengacu pada *Simple Additive Weighting* (SAW) atau *Weighted Sum Model* (WSM). Rumusnya: **Skor = Σ (Nilai × Bobot)**.

INDIKATOR	BOBOT	ALASAN
Urgensi	30%	Gap mendesak harus didahulukan
Dampak	25%	Dampak besar memberi manfaat luas
Kewenangan	20%	Harus jelas siapa yang berwenang
Kemudahan	15%	Kemudahan mempercepat tindak lanjut
Sumber Daya	10%	Sumber daya pada dasarnya bisa dicari

Total bobot: 100%

💡 **Tips Praktis Menghitung Skor Prioritas:**

Agar lebih mudah dan cepat, gunakan bantuan *spreadsheet* (Excel/Google Sheets). Ketik rumus perkalian bobot: (Urgensi × 0,30) + (Dampak × 0,25) + (Kewenangan × 0,20) + (Kemudahan × 0,15) + (Sumber Daya × 0,10). Hasil akhirnya berupa angka desimal (contoh: 4,55 atau 4,10). Angka inilah yang menjadi dasar penentuan prioritas.

Ambang Prioritas:



📝 Rekomendasi yang baik selalu punya justifikasi. Jangan hanya menulis perlu diperkuat tetapi perlu ditulis *mengapa* dan berdasarkan *data apa*.

Bagian 4: Standar Format Rekomendasi

Rekomendasi harus mengikuti format standar agar konsisten dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Terdapat empat format yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pelaporan.

1. Format Tabel Ringkas (Untuk Laporan Cepat)

No	Indikator	K/L Pengampu	Kesesuaian	Gap	Rekomendasi	Prioritas
1	*Isi Kode dan Naman Indokator*	*Nama K/L*	*Kategori Kesesuian*	*Jenis Gap*	*Tindakan Perbaikan*	*Tinggi/Sedang/ Rendah*

2. Format Tabel Komprehensif (Sesuai Standar Kerja)

Untuk laporan yang lebih mendalam, gunakan format 7 kolom berikut. Format ini memastikan rekomendasi Anda tidak hanya menyebutkan **apa**, tetapi juga **mengapa** dan **bagaimana** tindak lanjutnya.

Indikator IPK	Program	K/L Pelaksana	Analisis Kesesuaian dan Kesenjangan	Rekomendasi Perbaikan	Hasil yang Diharapkan	Tindak Lanjut
[Isi Indikator]	*[Nama Program]*	*[Nama K/L]*	*[Jelaskan mengapa kurang sesuai dan gap-nya]*	*[Langkah perbaikan konkret]*	*[Dampak yang ingin dicapai]*	*[Siapa yang mengawal dan langkah selanjutnya]*

(Catatan: Kolom "Tindak Lanjut" sangat penting untuk menunjukkan bahwa rekomendasi ini memiliki rencana aksi (action plan) yang jelas).

3. Format Narasi (Latar Belakang - Analisis - Rekomendasi - Justifikasi)

Format ini digunakan untuk menuangkan hasil analisis ke dalam bentuk uraian paragraf yang mengalir. Agar penulisan tetap terstruktur dan tidak melebar, gunakan panduan tabel di bawah ini sebelum merangkainya menjadi paragraf utuh.

Struktur Narasi	Panduan Pengisian (Apa yang harus ditulis?)	Ruang Isian (Draft Analis)
1. Latar Belakang	• Jelaskan konteks dan urgensi indikator IPK yang dibahas. • Kaitkan dengan arah kebijakan nasional (misal: RAN PK 2025-2029 atau Asta Cita). • Sajikan data capaian indikator saat ini (jika ada) sebagai pembanding awal.	*[Tuliskan draft latar belakang di sini...]*
2. Analisis	• Uraikan hasil penilaian kesesuaian program (5 kategori). • Identifikasi dan jelaskan jenis-jenis *gap* yang ditemukan. • Dukung argumen dengan data pendukung (misal: target vs realisasi, atau dokumen evaluasi K/L).	*[Tuliskan draft hasil analisis dan gap di sini...]*
3. Rekomendasi	• Rumuskan usulan tindakan perbaikan yang bersifat solutif dan operasional. • Gunakan kata kerja aksi (misal: "Memperluas...", "Mengusulkan...", "Merevisi..."). • Jika terdapat beberapa opsi, tuliskan secara berurutan (a), (b), (c).	*[Tuliskan draft rekomendasi di sini...]*

Struktur Narasi	Panduan Pengisian (Apa yang harus ditulis?)	Ruang Isian (Draft Analis)
4. Justifikasi	• Jelaskan alasan logis dan berbasis bukti mengapa rekomendasi tersebut dipilih. • Kaitkan langsung dengan penutupan *gap* yang telah dianalisis. • Jelaskan dampak yang diharapkan (*outcome*) jika rekomendasi dijalankan.	*[Tuliskan draft justifikasi dan dampak di sini...]*

4. Format Policy Brief (Ringkasan Eksekutif - Latar Belakang - Temuan - Rekomendasi - Tindak Lanjut).

Policy Brief adalah dokumen ringkas (maksimal 2-3 halaman) yang ditujukan kepada pengambil keputusan (Pimpinan K/L atau Kemenko PMK). Dokumen ini merangkum hasil analisis menjadi sajian yang *actionable* (dapat langsung dieksekusi).

Agar penyusunannya terstruktur, gunakan panduan kerangka tabel berikut:

Struktur *Policy Brief*	Panduan Pengisian (Apa yang harus ditulis?)	Ruang Isian (Draft Analis)
1. Ringkasan Eksekutif *(Executive Summary)*	• Tuliskan 1-2 paragraf pembuka yang memuat intisari masalah. • Sebutkan rekomendasi utama dan dampak yang diharapkan. • Pastikan pembaca memahami esensi dokumen hanya dengan membaca bagian ini.	*[Tuliskan draft ringkasan eksekutif di sini...]*
2. Latar Belakang	• Jelaskan secara singkat urgensi isu dan dasar hukum (Kepmen IPK/RAN PK). • Kaitkan indikator yang dibahas dengan prioritas pembangunan nasional.	*[Tuliskan draft latar belakang di sini...]*
3. Temuan	• Sajikan poin-poin utama hasil analisis secara ringkas. • Wajib mencantumkan: Kategori Kesesuaian program, Identifikasi *Gap* (spesifik), Data dukung (target vs realisasi), dan Skor SAW (jika ada opsi rekomendasi).	*[Tuliskan draft temuan di sini...]*
4. Rekomendasi	• Daftar tindakan prioritas yang telah diurutkan berdasarkan skor SAW (dari Tinggi ke Rendah). • Pastikan rekomendasi bersifat spesifik (menyebutkan siapa melakukan apa).	*[Tuliskan draft rekomendasi di sini...]*
5. Tindak Lanjut	• Uraikan langkah operasional jangka pendek dan menengah.	*[Tuliskan draft tindak lanjut di sini...]*

Struktur *Policy Brief*	Panduan Pengisian (Apa yang harus ditulis?)	Ruang Isian (Draft Analis)
	• Sebutkan pihak yang bertanggung jawab (K/L pengampu) dan tenggat waktu (jika memungkinkan).	

Bagian 5: Cara Menyusun Analisis dan Rekomendasi (Alur Berpikir)

Menyusun analisis dan rekomendasi adalah satu alur berpikir yang tidak terpisah. Analisis menghasilkan temuan, kemudian temuan menjadi dasar rekomendasi.



Bagian 6: Contoh Penerapan (Studi Kasus)

Berikut adalah contoh lengkap analisis dan rekomendasi untuk dua indikator dari analisis program kementerian/lembaga dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan.

Contoh 1: Indikator X5.3 — Olahraga Tradisional (Gap: Tidak Ada K/L)

1. Identifikasi: K/L: Tidak ada; Program: Tidak ada; Kesesuaian: Tidak Sesuai.
2. Jenis Gap: Tidak ada K/L pengampu.
3. Analisis Penyebab: Tidak ada K/L yang secara eksplisit mengampu indikator ini.
4. Alternatif dan
5. Skoring:
    - (a) Usulkan K/L baru (Kemenpora): Skor 4,30 (Tinggi)
    - (b) Revisi indikator: Skor 3,70 (Sedang)
    - (c) Perluas program K/L: Skor 3,55 (Sedang)
6. Rekomendasi: Usulkan Kemenpora sebagai K/L pengampu (Prioritas: Tinggi).

Contoh 2: Indikator X1.1 — Ekonomi Budaya (Gap: Program Kurang Sesuai)

Indikator: Persentase penduduk yang terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan.

1. **Identifikasi K/L dan Program:**
    - K/L 1: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
    - Program: Fasilitasi pengembangan inovasi wirausaha mahasiswa.
    - K/L 2: Kementerian Kebudayaan.
    - Program: Pembinaan SDM Kebudayaan melalui Manajemen Talenta Nasional bidang seni budaya.

2. **Analisis Kesesuaian dan Gap:**
    - *Kemendikti Saintek:* Program wirausaha mahasiswa dinilai Kurang Sesuai karena belum spesifik menyasar sektor seni pertunjukan. Gap-nya adalah perlu verifikasi apakah fasilitasi ini benar-benar menjadikan keterlibatan seni sebagai sumber penghasilan.
    - *Kemenbud (Kebudayaan):* Program pembinaan talenta dinilai Cukup Sesuai, namun gap-nya adalah belum tentu ada jaminan peningkatan penghasilan dari pertunjukan seni.

3. **Skoring dan Rekomendasi:**
   Untuk gap pada program Kemendikti Saintek, tim menilai beberapa alternatif:
    - *Alternatif 1:* Penguatan fasilitasi kewirausahaan mahasiswa berbasis seni pertunjukan. (Skor: 4,55 / Tinggi)
    - *Alternatif 2:* Pengembangan kemitraan usaha mahasiswa dengan pelaku seni. (Skor: 4,10 / Tinggi)
    - *Alternatif 3:* Penguatan indikator kinerja dan evaluasi dampak program. (Skor: 4,75 / Tinggi)

Kesimpulan: Rekomendasi yang dipilih adalah yang memiliki skor tertinggi (4,75), yaitu penguatan indikator kinerja dan evaluasi dampak program, karena dianggap paling mendesak, berdampak luas, dan kewenangannya jelas.

Bagian 7: Tips dan Kesalahan Umum

LAKUKAN	HINDARI
Fokus pada **kesesuaian program**	Fokus pada **capaian angka**
Identifikasi **jenis gap**	Tidak membedakan **jenis gap**
Gunakan **indikator pertimbangan**	Memilih berdasarkan **preferensi pribadi**
Gunakan **skoring berbobot (SAW)**	Menggunakan **skoring sederhana** tanpa bobot
Libatkan **K/L** dalam verifikasi	Mengisi matriks **tanpa verifikasi** (asumsi sepihak)
Gunakan **format standar**	Format **tidak konsisten**
Beri ruang **revisi indikator**	Menganggap indikator **harus dipenuhi**

⚠️ **Catatan Penting untuk Gap Tidak Ada:**

Dalam matriks, Anda mungkin menemukan indikator dengan status K/L dan Program **Tidak Ada** (seperti pada indikator X6.1, X6.2, dan X7.1). Jangan panik. Ini bukan berarti indikator tersebut salah. Rekomendasi yang tepat untuk kasus ini adalah Evaluasi dan Penguatan Indikator atau Usulkan K/L Baru. Gunakan indikator pertimbangan (skoring) untuk menentukan apakah indikator tersebut layak dipertahankan (dengan mencari K/L baru) atau perlu direvisi (karena memang tidak relevan dengan struktur K/L yang ada).

📝 **Rangkuman Sesi 4**



Kerangka Analisis adalah resep standar untuk menganalisis kesesuaian program K/L dengan indikator IPK. Gap yang ditemukan bukan untuk mengejar angka, tetapi untuk memberi masukan kepada K/L atau merevisi indikator agar pembangunan kebudayaan lebih tepat sasaran.

SESI 5: BLUEPRINT DAN PROTOTIPE DASHBOARD KANDAGA PMK

🎯 Tujuan Sesi:

Setelah membaca sesi ini, pembaca diharapkan mampu:

- Memahami konsep dan kedudukan blueprint Dashboard KANDAGA PMK dalam perencanaan sistem integrasi data program K/L dan data geospasial warisan budaya.
- Memahami tiga fokus utama blueprint: Monitoring Program, Data Geospasial, dan Alat Kerja Analisis.
- Memahami sumber data yang diintegrasikan dan mekanisme pertukarannya.
- Memahami struktur antarmuka pengguna dan pembagian hak akses (Operator K/L dan User/Analis).
- Memahami fungsi prototipe sebagai alat kerja analisis (Matriks Konektivitas, Matriks Analisis Gap, Matriks Kesesuaian Program) dan sistem Monev (formulir triwulanan dan unggah bukti dukung).
- Memahami alur pelaporan Operator K/L dari Langkah 1 hingga Langkah 2 dan integrasinya ke Dasbor Monitoring.
- Memahami prasyarat keberlanjutan sistem (SDM, teknologi, anggaran) dan posisinya sebagai rancangan konseptual.

Bagian 1: Mengenal Blueprint Dashboard KANDAGA PMK

📌 Konsep

Blueprint (cetak biru) adalah rancangan arsitektur sistem yang menjadi acuan sebelum sistem digital dibangun. Blueprint Dashboard KANDAGA PMK menggambarkan bagaimana data program K/L dan data geospasial warisan budaya diintegrasikan ke dalam satu dasbor digital. Blueprint ini bukan aplikasi yang telah selesai dibangun, melainkan acuan strategis yang memuat tiga fokus utama: Monitoring Program, Data Geospasial, dan Alat Kerja Analisis.

1.1 Definisi Blueprint Dashboard KANDAGA PMK

Blueprint Dashboard KANDAGA PMK adalah rancangan arsitektur sistem yang menggambarkan keterpaduan antara data program kementerian/lembaga (K/L), data geospasial warisan budaya, dan data lintas sektor dalam satu dasbor digital. Blueprint ini berfungsi sebagai acuan strategis bagi pengembangan sistem, bukan sebagai aplikasi operasional yang telah selesai.

1.2 Tiga Fokus Utama Blueprint

Blueprint memuat tiga fokus utama yang menjadi arah pengembangan sistem :



1.3 Sumber Data yang Diintegrasikan

Agar dashboard berfungsi optimal, KANDAGA PMK mengintegrasikan empat sumber data utama:



1.4 Mekanisme Pertukaran Data

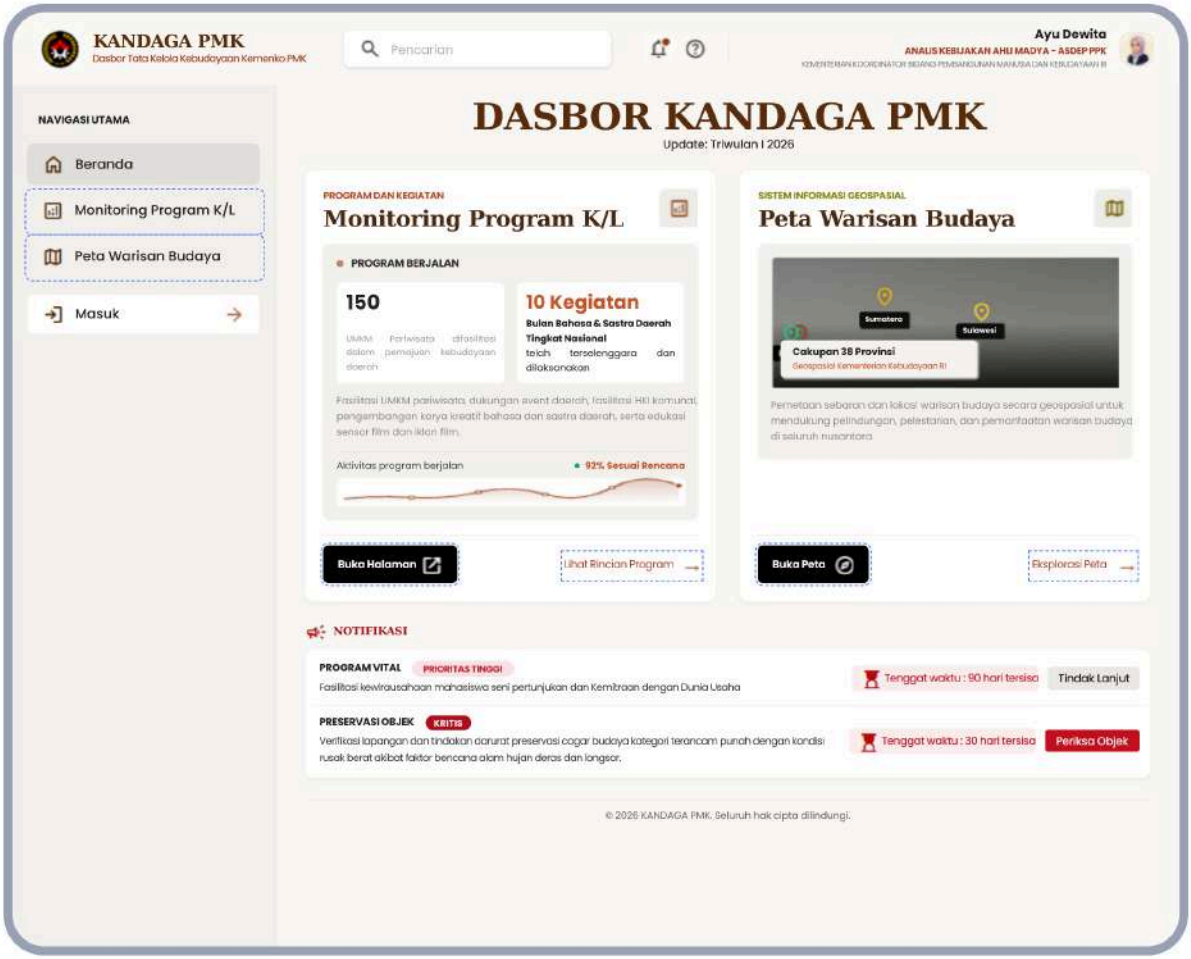
Integrasi data dirancang menggunakan format standar (JSON, CSV, atau Excel). Pertukaran data dapat dilakukan melalui:

1. API (Application Programming Interface).
2. Basis data bersama.
3. Transfer berkas sesuai kesiapan dan kesepakatan teknis antarinstansi.

Dengan mekanisme tersebut, KANDAGA PMK diharapkan menjadi sumber informasi yang terintegrasi, konsisten, dan dapat ditelusuri oleh para pemangku kepentingan.

1.5 Catatan Penting: Siklus Pembaruan Data

Pembaruan data dalam dashboard dirancang secara triwulanan (3 bulan sekali), sejalan dengan siklus pelaporan anggaran, bukan secara real-time. Tujuan: agar beban administratif K/L tetap realistis dan berkelanjutan.



Gambar 1. Halaman Utama Dasbor KANDAGA PMK yang menampilkan ringkasan Monitoring Program K/L dan Peta Warisan Budaya.

Bagian 2: Rancangan Antarmuka Pengguna (User Interface)

📌 Konsep

Blueprint mencakup rancangan antarmuka pengguna yang terdiri atas tiga halaman utama: Halaman Beranda, Halaman Monitoring Program K/L, dan Halaman Geospasial. Ketiga halaman tersebut menjadi antarmuka utama sistem dan dirancang agar pengguna dapat mengakses informasi secara terstruktur.

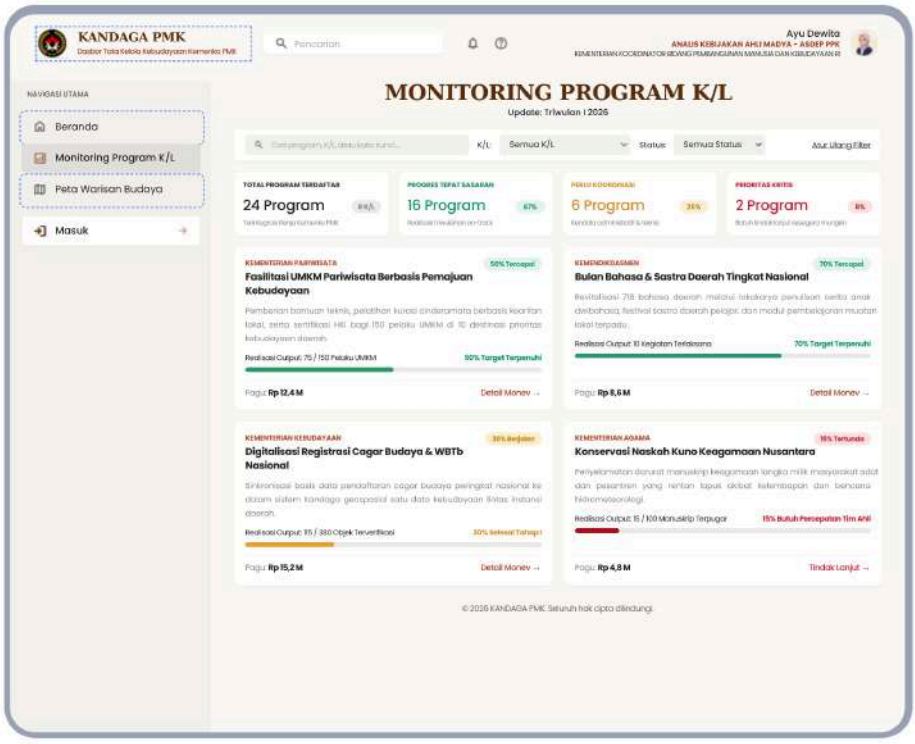
2.1 Tiga Halaman Utama

Dashboard KANDAGA PMK memiliki tiga halaman utama yang memudahkan pengguna melihat ringkasan informasi, memantau pelaksanaan program K/L, serta menelusuri sebaran warisan budaya. Ketiganya saling melengkapi untuk mendukung pemantauan dan pengambilan keputusan berbasis data.

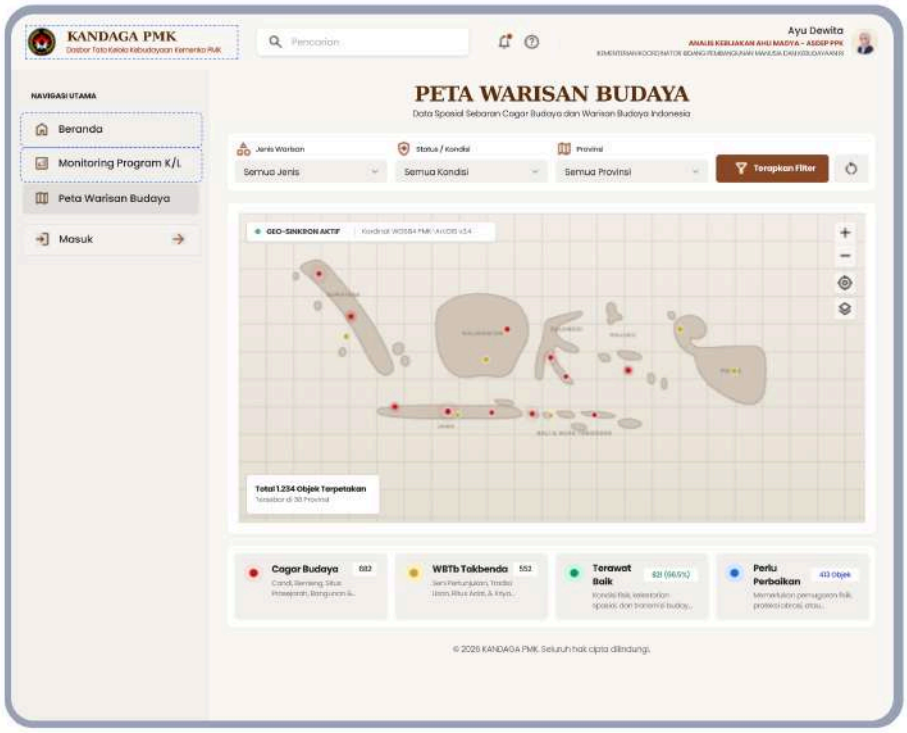


2.2 Prinsip Perancangan Antarmuka

1. Informasi disajikan secara terstruktur dan hierarkis.
2. Pengguna dapat mengakses informasi tanpa memerlukan pelatihan teknis mendalam.
3. Navigasi konsisten di seluruh halaman.
4. Penanda visual (warna, ikon) digunakan untuk menunjukkan status program (misalnya "Perlu Perhatian" atau "Prioritas Tinggi").



Gambar 2. Tampilan Halaman Monitoring Program K/L dengan kartu ringkasan



Gambar 3. Tampilan Halaman Peta Warisan Budaya berbasis SIG

Bagian 3: Wujud Nyata Prototipe dan Pembagian Hak Akses

📌 Konsep

Jika Bagian 1–2 menjelaskan rancangan arsitektur sistem (blueprint), Bagian 3 memperlihatkan penerjemahan rancangan tersebut ke dalam bentuk prototipe (purwarupa) aplikasi. Prototipe Dashboard KANDAGA PMK tidak dimaksudkan sekadar sebagai media penyajian data, tetapi dirancang sebagai alat kerja fungsional untuk mendukung analisis dan pemantauan program.

3.1 Dua Fungsi Operasional Prototipe

Prototipe menerjemahkan tiga fokus utama blueprint ke dalam dua fungsi operasional yang saling terintegrasi:



3.2 Pembagian Hak Akses

Hak akses prototipe KANDAGA PMK dibagi sesuai peran pengguna. Admin/Operator K/L bertugas memasukkan data dan melaporkan capaian program, sedangkan Pimpinan/Analis memanfaatkan informasi yang tersedia untuk pemantauan, analisis, dan pengambilan keputusan.



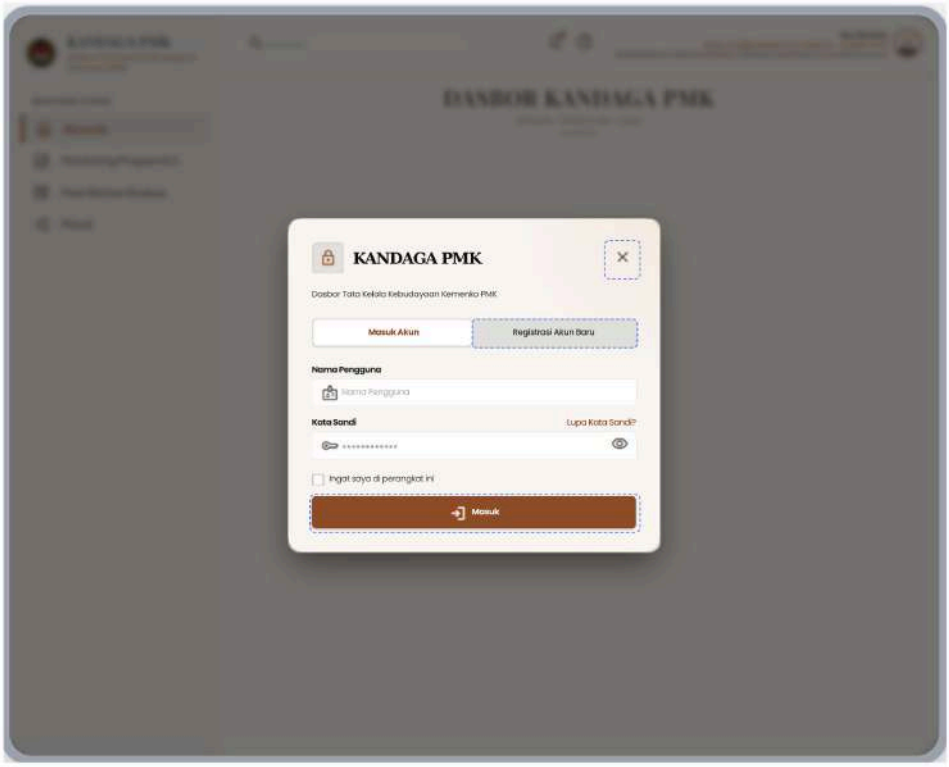
3.3 Mekanisme Verifikasi Operator K/L

Pendaftaran Operator K/L dirancang melalui mekanisme verifikasi dengan alur sebagai berikut:

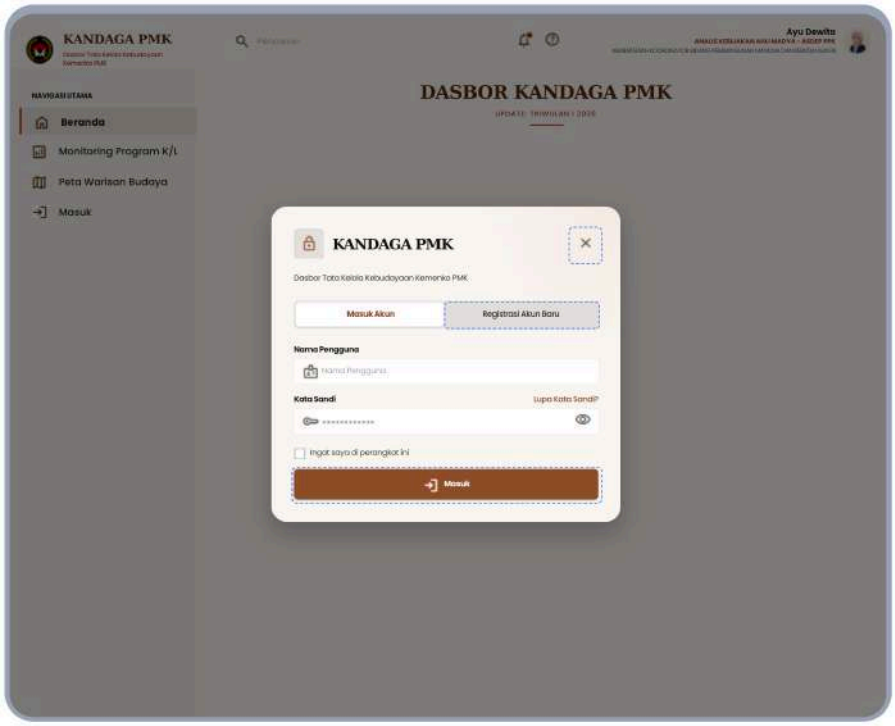
1. Calon operator mengunggah Surat Keputusan (SK) Pengelola dari instansinya pada halaman registrasi.
2. Admin KANDAGA PMK memvalidasi SK dan identitas pendaftar.
3. Setelah validasi, akun operator diaktivasi dan operator dapat menginput data.
4. Persyaratan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penginputan dan pembaruan data dilakukan oleh perwakilan resmi K/L.

3.4 Alur Registrasi dan Login

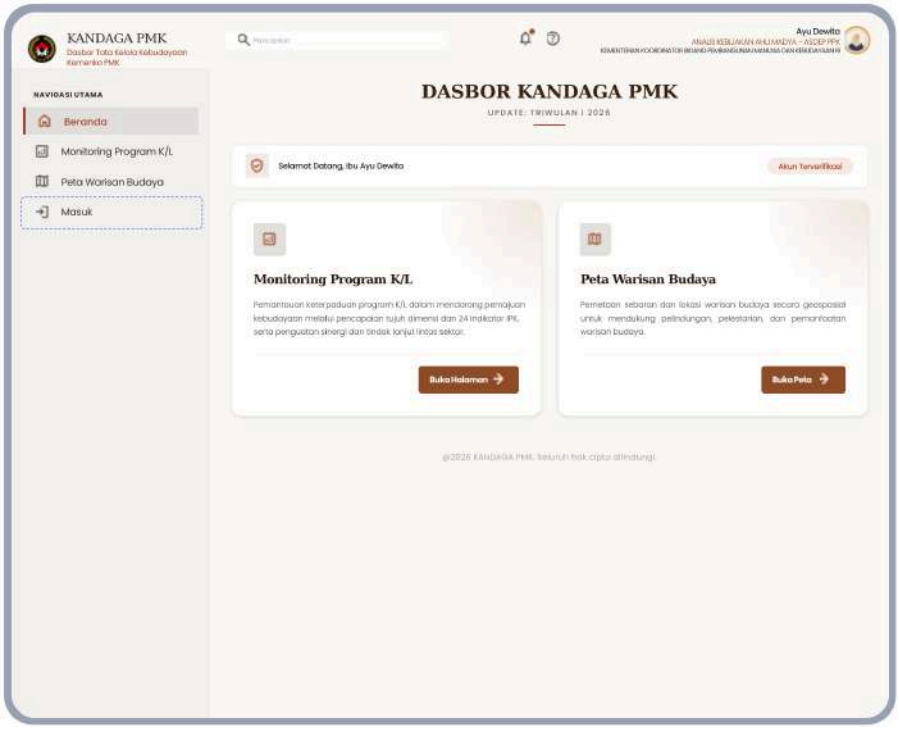
1. Pengguna membuka halaman login/registrasi.
2. Pengguna memilih "Masuk Akun" (jika sudah memiliki akun) atau "Registrasi Akun Baru" (jika belum).
3. Pada registrasi, pengguna mengisi nama lengkap, nama pengguna/email, kata sandi, dan mengunggah dokumen SK Pengelola.
4. Pengguna menyetujui ketentuan layanan dan kebijakan privasi.
5. Setelah registrasi berhasil, pengguna dapat masuk ke sistem dan mengakses halaman Beranda sesuai hak aksesnya.



Gambar 4. Halaman Login untuk User, Admin, dan Pengelola KANDAGA PMK



Gambar 5. Halaman Registrasi User Baru dengan kolom unggah Dokumen SK Pengelola.



Gambar 6. Halaman Beranda setelah berhasil login/registrasi, menampilkan akses ke Monitoring Program K/L dan Peta Warisan Budaya

Bagian 4: Alat Kerja Analisis — Matriks Konektivitas dan Analisis Gap

📌 Konsep

Inti alat kerja analisis KANDAGA PMK adalah menghubungkan program dan kegiatan K/L dengan sasaran pembangunan kebudayaan nasional. Fitur ini membantu pengguna menelaah keterkaitan program dengan 24 indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), sekaligus mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara kebutuhan pencapaian indikator dan dukungan intervensi program yang tersedia.

4.1 Fungsi Alat Kerja Analisis

1. Memetakan program dan kegiatan K/L berdasarkan arah kebijakan, strategi, dan fokus pelaksanaan RAN Pemajuan Kebudayaan 2025–2029.
2. Mengidentifikasi K/L penanggung jawab untuk mengetahui pembagian peran dan kontribusi masing-masing K/L.
3. Memetakan keterkaitan program dengan indikator IPK (7 dimensi, 24 indikator).
4. Menganalisis kesenjangan intervensi (gap analysis).
5. Mengidentifikasi potensi tumpang tindih program.
6. Menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil pemetaan dan analisis.

4.2 Matriks Konektivitas

Matriks Konektivitas menghubungkan program K/L dengan indikator IPK. Struktur matriks mencakup kolom: Kode Indikator, Dimensi, Indikator, K/L Pengampu, Program/Kegiatan, Relevansi/Kesesuaian, Gap, dan Rekomendasi.

4.3 Matriks Analisis Gap

Matriks Analisis Gap digunakan untuk mengidentifikasi indikator yang belum didukung program, belum memiliki K/L pengampu, atau programnya belum memadai. Terdapat tiga jenis gap:



4.4 Ringkasan Informasi pada Halaman Beranda

Setelah pengguna dengan hak akses Analis/Pimpinan masuk ke sistem, halaman Beranda menyajikan:

1. Daftar program yang berjalan.
2. Capaian program.
3. Notifikasi otomatis untuk program berstatus "Perlu Perhatian" atau "Prioritas Tinggi".

Ringkasan ini membantu pengguna menentukan program atau isu yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

4.5 Peta Warisan Budaya Berbasis SIG

Sistem dilengkapi Peta Warisan Budaya berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Fitur ini memungkinkan pengguna:

1. Memfilter sebaran Cagar Budaya atau WBTb berdasarkan jenis.
2. Memfilter berdasarkan status atau kondisi (misalnya terawat baik atau perlu perbaikan).
3. Memfilter berdasarkan wilayah provinsi.

Pemetaan spasial membantu analis membaca konteks kewilayahan dan menelaah keterkaitan antara kondisi warisan budaya dengan program pelestarian K/L.

Bagian 5: Sistem Monitoring dan Evaluasi (Formulir dan Unggah Dokumen)

📌 **Konsep**

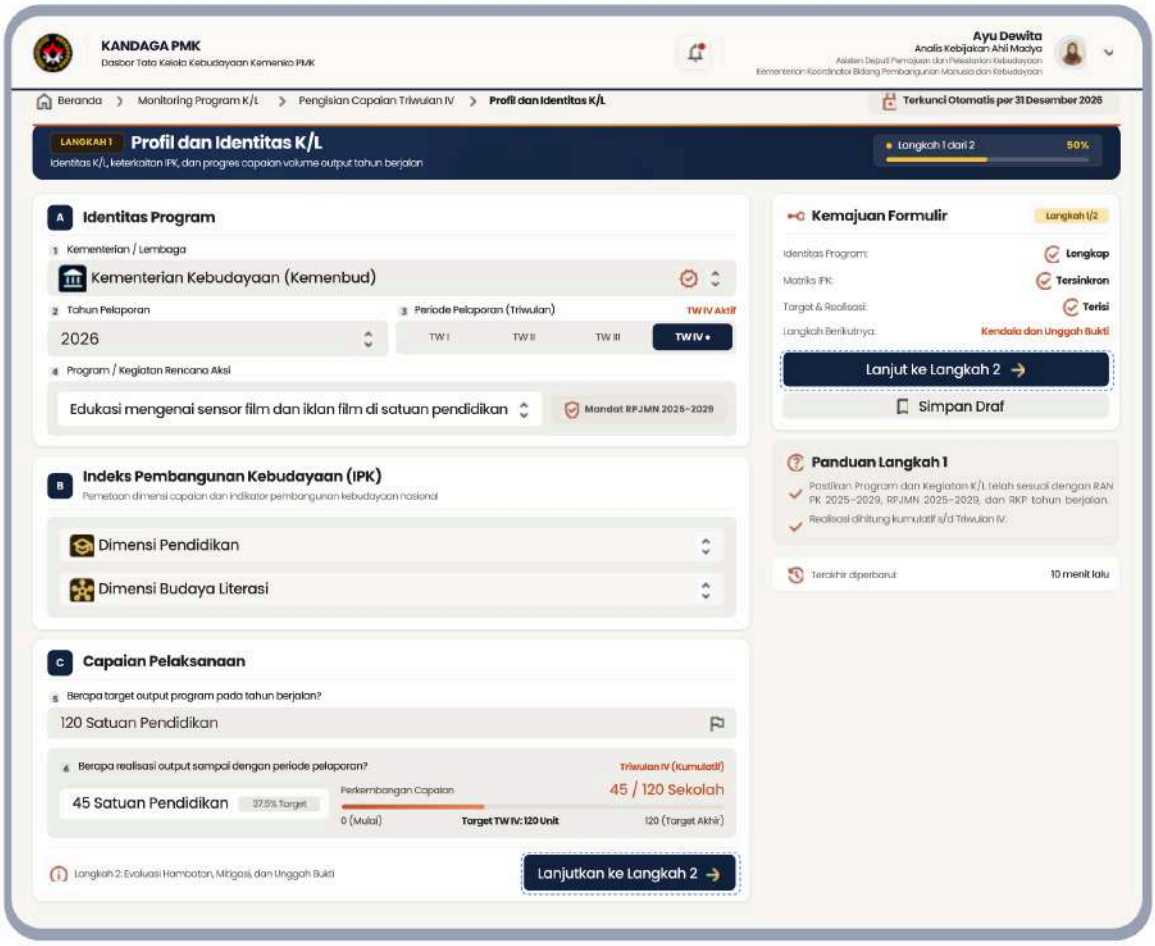
Fungsi kedua prototipe adalah mendukung pemantauan dan evaluasi (monev) pelaksanaan program. Sistem memfasilitasi Operator K/L untuk melaporkan perkembangan program secara berkala melalui formulir digital terstandar dengan periode pelaporan triwulanan.

5.1 Langkah 1: Profil dan Identitas K/L

Pada tahap ini, operator mengisi:

1. Identitas program (Kementerian/Lembaga, nama program).
2. Tahun pelaporan dan periode triwulan (TW I–TW IV).
3. Program/kegiatan RAN Pemajuan Kebudayaan (jika relevan).
4. Dimensi dan indikator IPK yang telah dipetakan dalam Matriks Konektivitas (sistem menampilkan secara otomatis setelah operator memilih program).
5. Target output tahunan dan realisasi output pada triwulan yang dilaporkan.

Berdasarkan data tersebut, sistem menghitung persentase capaian secara otomatis.

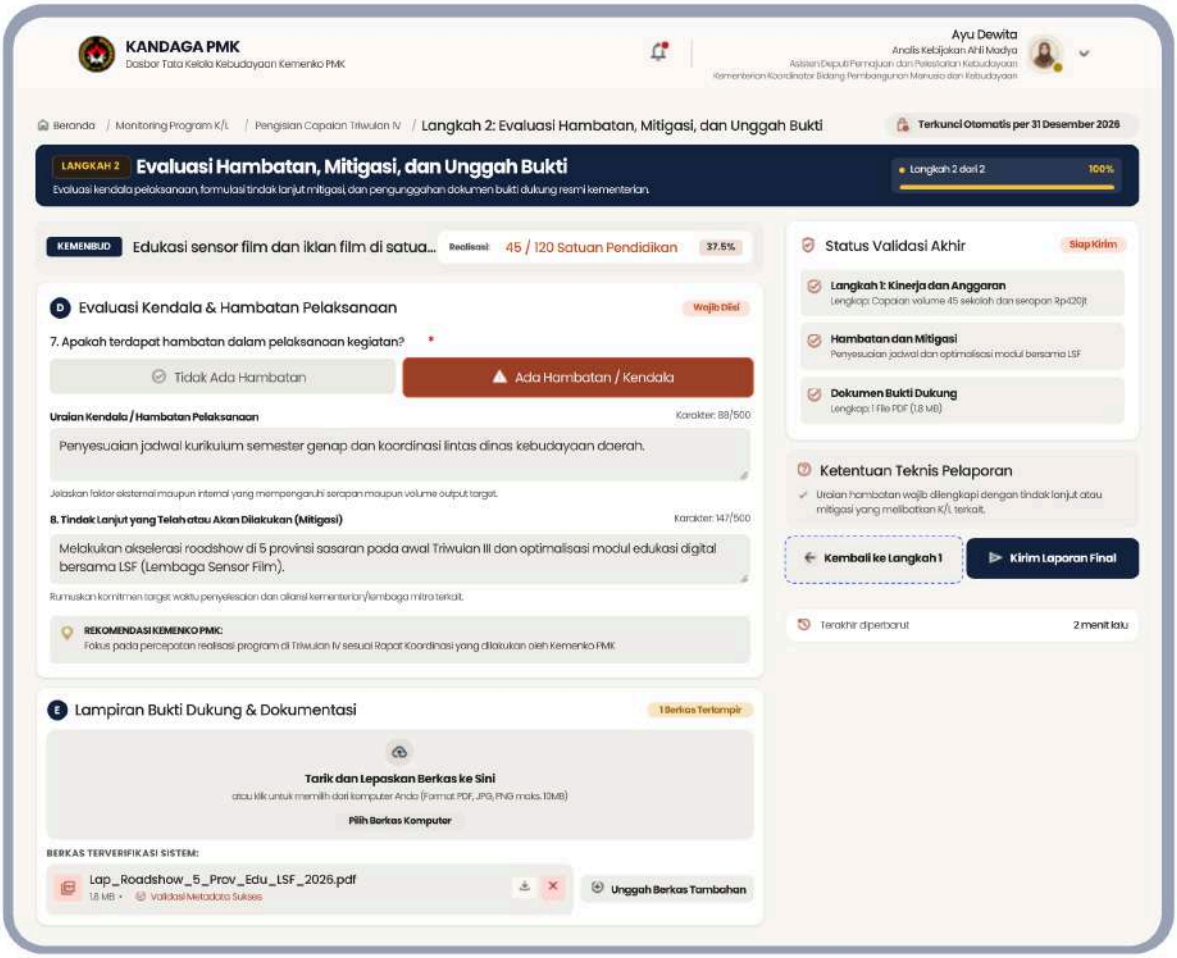


Gambar 7. Formulir Langkah 1: Profil dan Identitas K/L, termasuk pemetaan otomatis Dimensi dan Indikator IPK.

5.2 Langkah 2: Evaluasi Hambatan dan Unggah Bukti Dukung

Pada tahap ini, operator mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:

1. Apabila terdapat hambatan (misalnya penyesuaian jadwal atau kendala koordinasi lintas dinas), operator menjelaskan hambatan tersebut beserta rencana tindak lanjut atau mitigasinya.
2. Operator mengunggah dokumen bukti dukung (PDF, JPG, atau PNG) dan/atau foto kegiatan sebagai bukti pelaksanaan program.
3. Setelah seluruh informasi dan dokumen dilengkapi, operator memilih "Kirim Laporan Final".



Gambar 8. Formulir Langkah 2: Evaluasi Hambatan, Mitigasi, dan Unggah Bukti Dukung.

5.3 Status Validasi Ahli dan Ketentuan Teknis

1. Laporan yang dikirim akan melalui status validasi ahli sebelum ditampilkan penuh di dasbor.
2. Dokumen bukti dukung yang diunggah harus sesuai dengan ketentuan teknis (format PDF, JPG, atau PNG; ukuran maksimal tertentu).
3. Terdapat tenggat waktu pelaporan yang ditentukan (misalnya 10 hari setelah periode triwulan berakhir).

5.4 Integrasi ke Dasbor Monitoring

Data yang telah dikirim melalui formulir Monev diolah dan disajikan pada Halaman Monitoring Program K/L (lihat Bagian 6). Integrasi ini memastikan bahwa laporan operator langsung tercermin dalam dasbor pemantauan pimpinan/analis.

Bagian 6: Dasbor Pemantauan Program K/L

📌 Konsep

Setelah laporan disampaikan oleh Operator K/L melalui formulir digital, data tersebut diolah dan disajikan pada halaman Monitoring Program K/L. Halaman ini menjadi dasbor bagi pengguna dengan hak akses Pimpinan/Analis untuk memantau perkembangan program lintas K/L.

6.1 Kartu Ringkasan (Dashboard Cards)

Halaman monitoring menyajikan kartu-kartu ringkasan yang memuat indikator makro:



6.2 Kartu Informasi per Program

Setiap program ditampilkan dalam kartu informasi tersendiri yang memuat:

1. Persentase capaian fisik.
2. Persentase penyerapan anggaran.
3. Status pencapaian target.

6.3 Penanda Visual dan Tindak Lanjut

Sistem dirancang untuk memberikan penanda visual apabila suatu program:

1. Belum mencapai target.
2. Belum terserap anggarannya.
3. Mengalami hambatan.

Informasi tersebut dapat menjadi dasar bagi pimpinan untuk menentukan kebutuhan klarifikasi, koordinasi, atau tindak lanjut kepada K/L terkait.

Bagian 7: Alat Kerja Analisis Lanjutan (Formulir A–D)

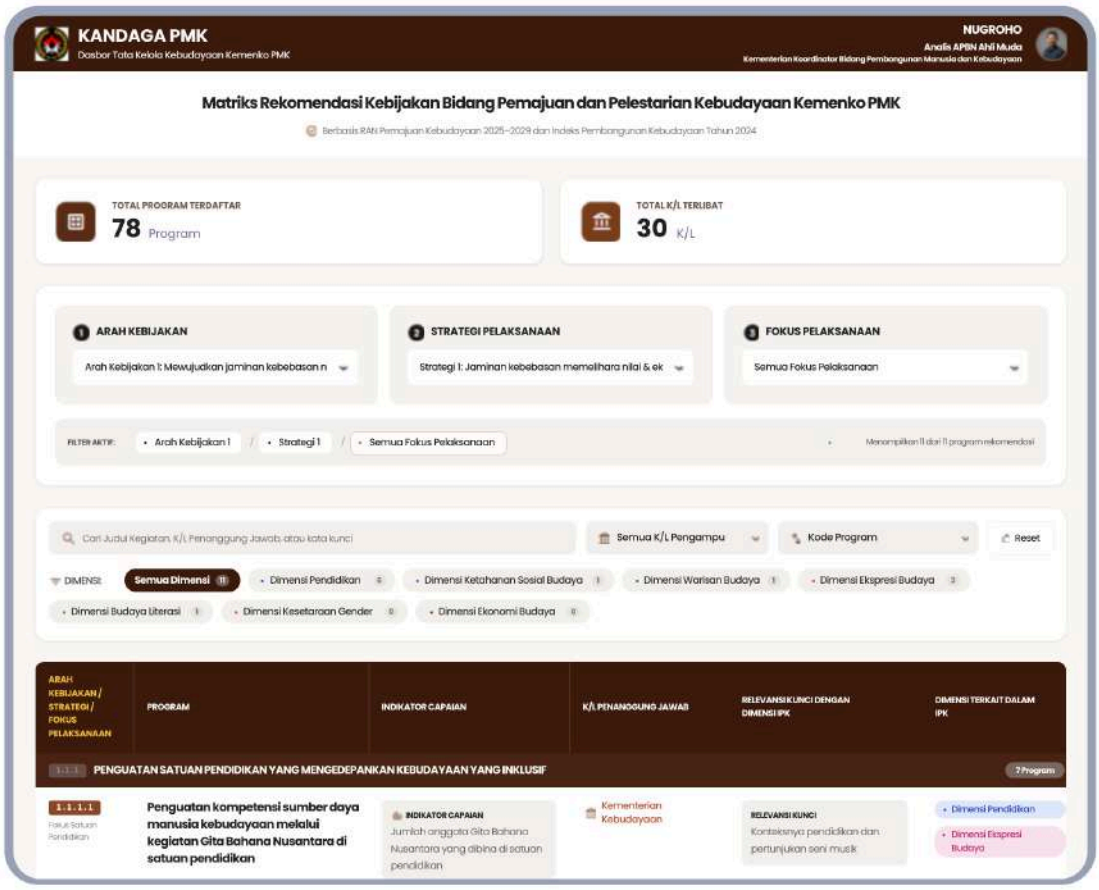
📌 Konsep

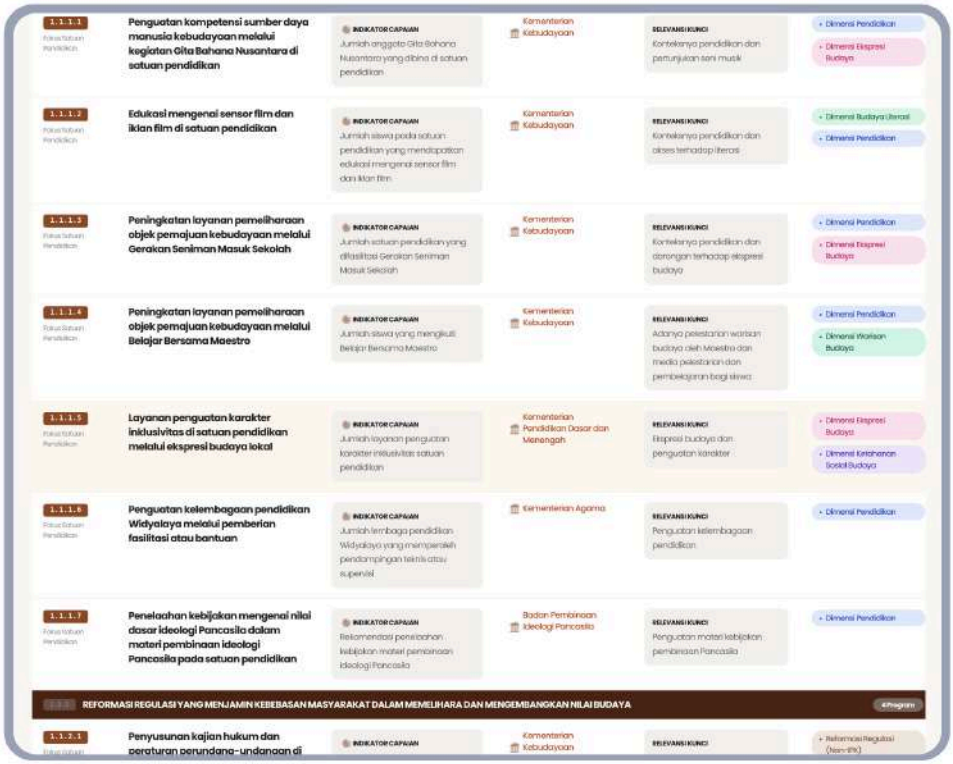
Selain Matriks Konektivitas dan Matriks Analisis Gap (Bagian 4), KANDAGA PMK dilengkapi empat formulir alat kerja analisis lanjutan yang berfungsi memperkuat fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) Kemenko PMK. Keempat formulir ini merupakan bagian dari purwarupa SKP Kemenko PMK Bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan.

7.1 Formulir A: Matriks Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan

Formulir ini berfungsi untuk:

1. Memetakan program dan kegiatan K/L berdasarkan arah kebijakan, strategi, dan fokus pelaksanaan RAN Pemajuan Kebudayaan 2025–2029.
2. Mengidentifikasi K/L penanggung jawab.
3. Memetakan keterkaitan program dengan indikator IPK.
4. Menganalisis kesenjangan intervensi (gap analysis).
5. Mengidentifikasi potensi tumpang tindih program.
6. Menyusun rekomendasi kebijakan.





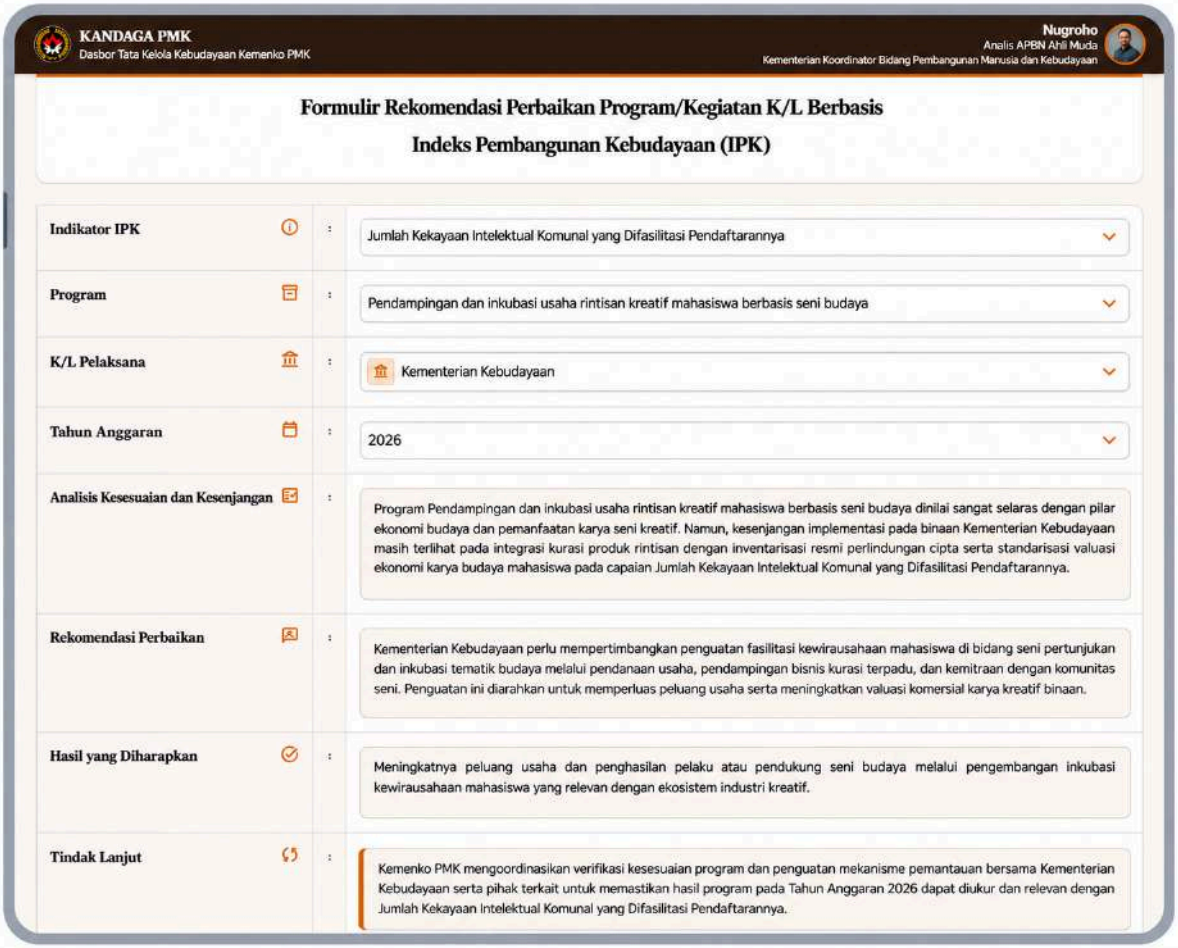
1.1.1.1 Fokus Satuan Pendidikan	Penguatan kompetensi sumber daya manusia kebudayaan melalui kegiatan Gita Bahana Nusantara di satuan pendidikan	INDIKATOR CAPAIAN: Jumlah anggota Gita Bahana Nusantara yang dibina di satuan pendidikan	Kementerian Kebudayaan	RELEVANSI KUNCI: Konteksnya pendidikan dan pertunjukan seni musik	+ Dimensi Pendidikan; + Dimensi Ekspresi Budaya
1.1.1.2 Fokus Satuan Pendidikan	Edukasi mengenai sensor film dan iklan film di satuan pendidikan	INDIKATOR CAPAIAN: Jumlah siswa pada satuan pendidikan yang mendapatkan edukasi mengenai sensor film dan iklan film	Kementerian Kebudayaan	RELEVANSI KUNCI: Konteksnya pendidikan dan akses terhadap literasi	+ Dimensi Budaya Literasi; + Dimensi Pendidikan
1.1.1.3 Fokus Satuan Pendidikan	Peningkatan layanan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan melalui Gerakan Seniman Masuk Sekolah	INDIKATOR CAPAIAN: Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi Gerakan Seniman Masuk Sekolah	Kementerian Kebudayaan	RELEVANSI KUNCI: Konteksnya pendidikan dan dorongan terhadap ekspresi budaya	+ Dimensi Pendidikan; + Dimensi Ekspresi Budaya
1.1.1.4 Fokus Satuan Pendidikan	Peningkatan layanan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan melalui Belajar Bersama Maestro	INDIKATOR CAPAIAN: Jumlah siswa yang mengikuti Belajar Bersama Maestro	Kementerian Kebudayaan	RELEVANSI KUNCI: Adanya pelestarian warisan budaya oleh Maestro dan media pelestarian dan pembelajaran bagi siswa	+ Dimensi Pendidikan; + Dimensi Warisan Budaya
1.1.1.5 Fokus Satuan Pendidikan	Layanan penguatan karakter inklusivitas di satuan pendidikan melalui ekspresi budaya lokal	INDIKATOR CAPAIAN: Jumlah layanan penguatan karakter inklusivitas satuan pendidikan	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	RELEVANSI KUNCI: Ekspresi budaya dan penguatan karakter	+ Dimensi Ekspresi Budaya; + Dimensi Ketahanan Sosial Budaya
1.1.1.6 Fokus Satuan Pendidikan	Penguatan kelembagaan pendidikan Widyalaya melalui pemberian fasilitasi atau bantuan	INDIKATOR CAPAIAN: Jumlah lembaga pendidikan Widyalaya yang memperoleh pendampingan teknis atau supervisi	Kementerian Agama	RELEVANSI KUNCI: Penguatan kelembagaan pendidikan	+ Dimensi Pendidikan
1.1.1.7 Fokus Satuan Pendidikan	Penelaahan kebijakan mengenai nilai dasar ideologi Pancasila dalam materi pembinaan ideologi Pancasila pada satuan pendidikan	INDIKATOR CAPAIAN: Rekomendasi penelaahan kebijakan materi pembinaan ideologi Pancasila	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	RELEVANSI KUNCI: Penguatan materi kebijakan pembinaan Pancasila	+ Dimensi Pendidikan
1.1.2 REFORMASI REGULASI YANG MENJAMIN KEBEBASAN MASYARAKAT DALAM MEMELIHARA DAN MENGEMBANGKAN NILAI BUDAYA					4 Program
1.1.2.1 Fokus	Penyusunan kajian hukum dan peraturan perundang-undangan di	INDIKATOR CAPAIAN	Kementerian Kebudayaan	RELEVANSI KUNCI	+ Reformasi Regulasi (Non-IPK)

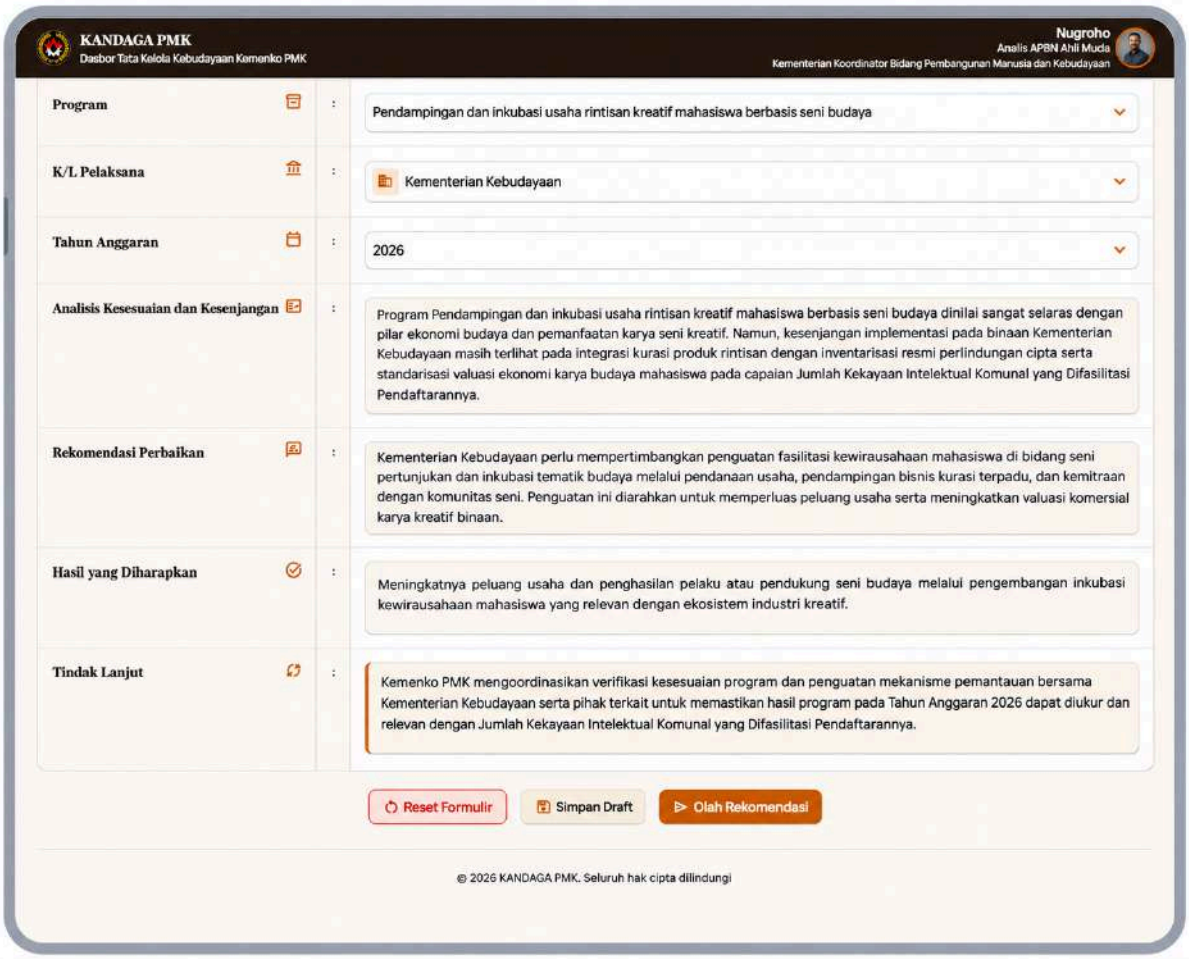
Gambar 9. Formulir Matriks Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Kemenko PMK

7.2 Formulir B: Rekomendasi Perbaikan Program/Kegiatan K/L Berbasis IPK

Formulir ini berfungsi untuk:

1. Melakukan pendalaman program yang telah teridentifikasi dalam matriks pemetaan.
2. Menilai kesesuaian intervensi (apakah substansi program dan indikator capaiannya mendukung indikator pembangunan).
3. Mengidentifikasi kelemahan program.
4. Merumuskan rekomendasi perbaikan.
5. Menentukan hasil dan tindak lanjut koordinasi Kemenko PMK dengan K/L pelaksana.



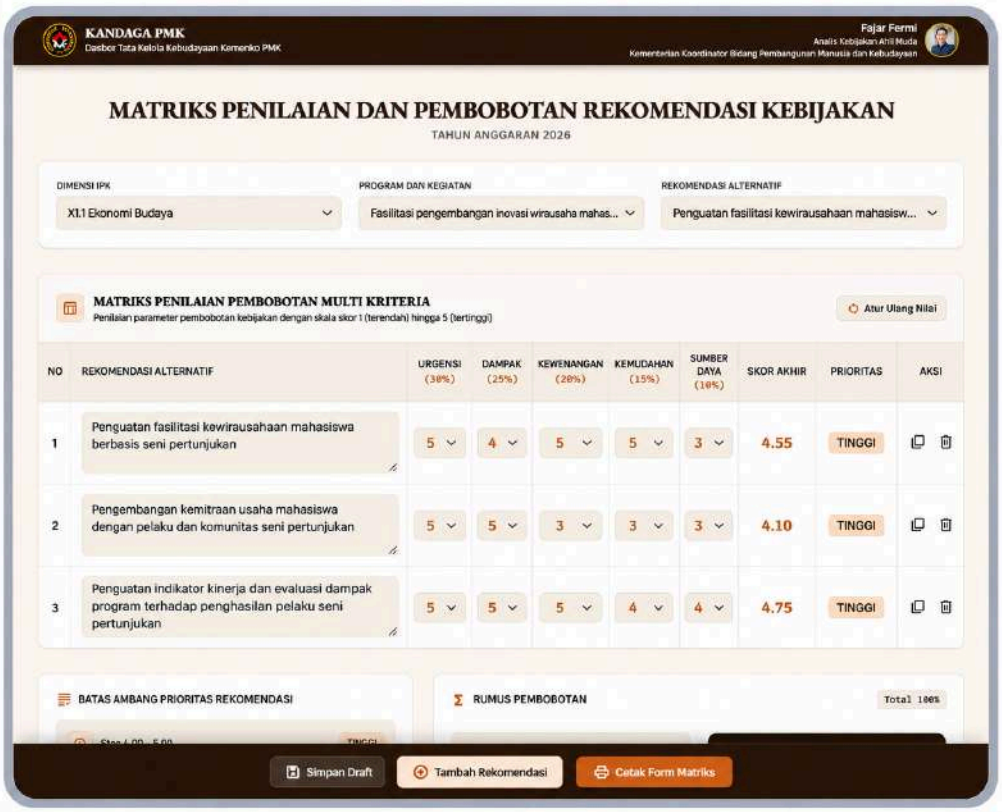


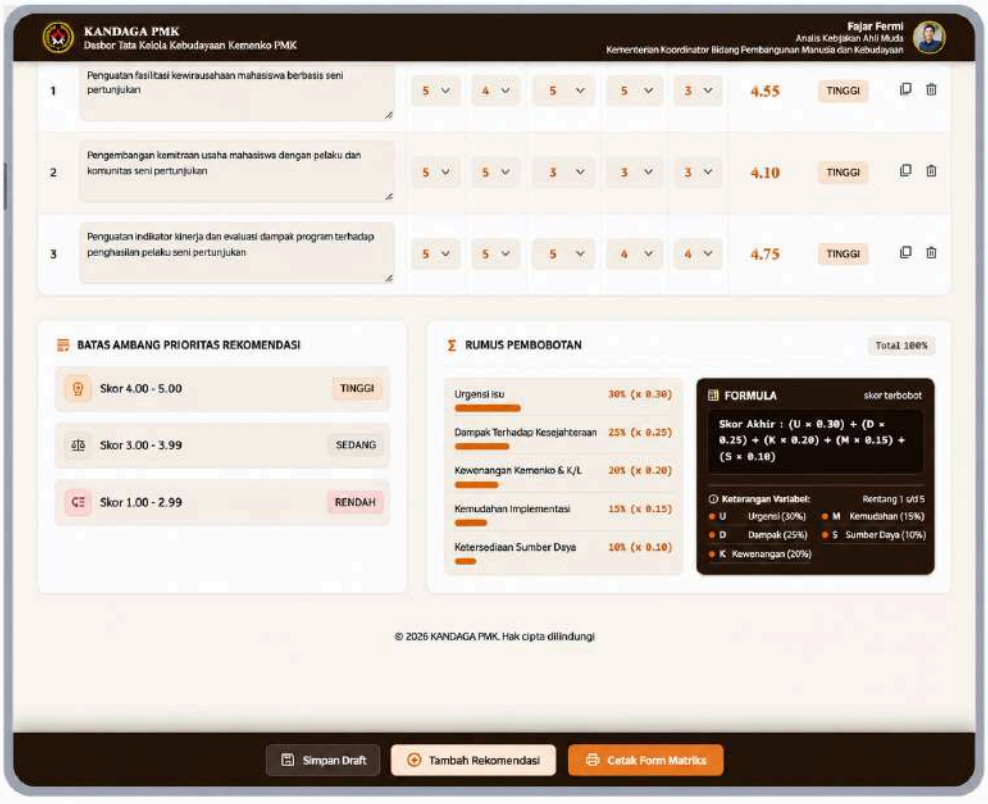
Gambar 10. Formulir Rekomendasi Perbaikan Program/Kegiatan K/L Berbasis Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

7.3 Formulir C: Matriks Penilaian dan Pembobotan Rekomendasi Kebijakan

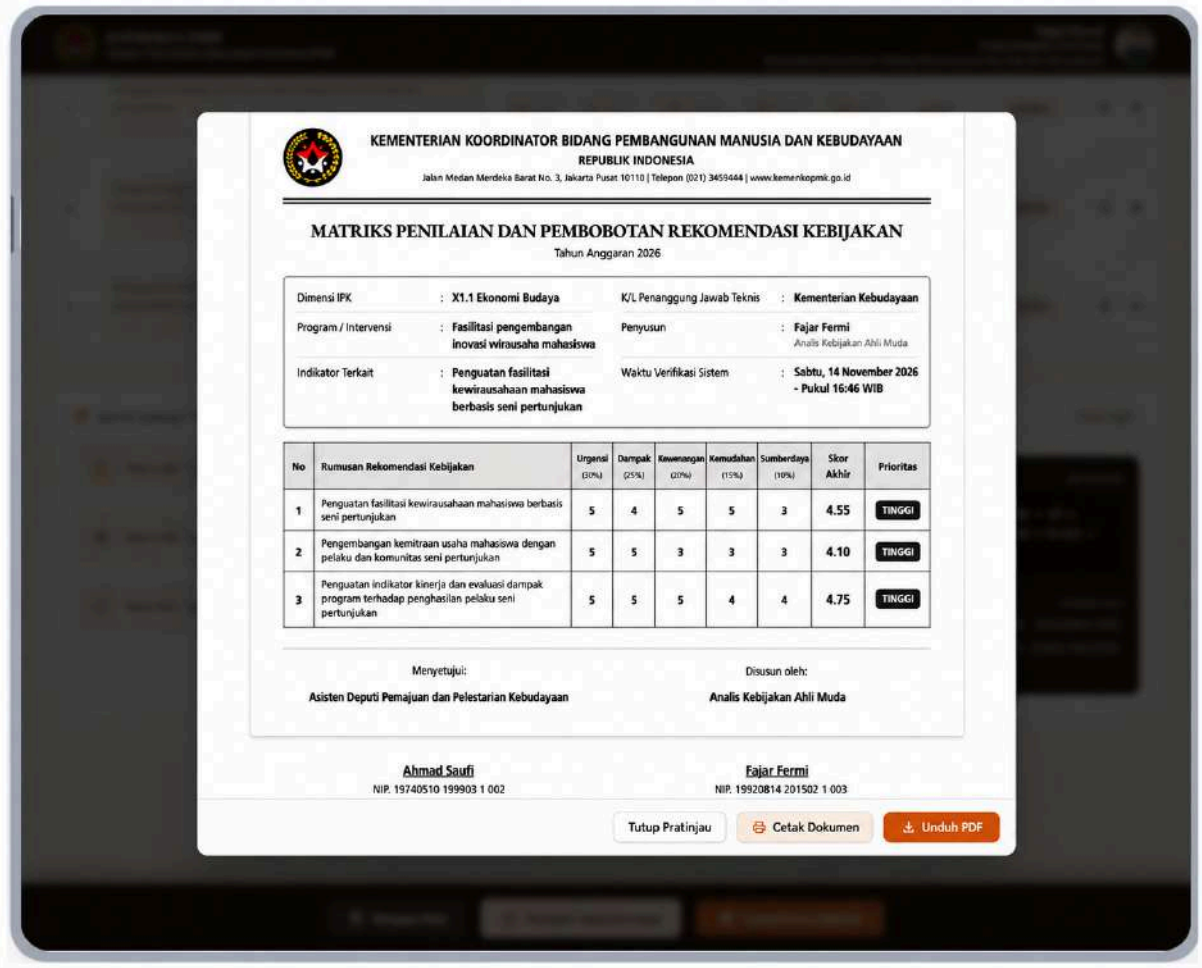
Matriks ini berfungsi untuk:

1. Menilai alternatif rekomendasi kebijakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
2. Mengukur tingkat urgensi dan dampak.
3. Mempertimbangkan kewenangan dan kelayakan.
4. Menghitung skor berdasarkan pembobotan: urgensi (30%), dampak (25%), kewenangan (20%), kemudahan implementasi (15%), dan ketersediaan sumber daya (10%).
5. Menentukan prioritas rekomendasi (tinggi, sedang, rendah).
6. Menjadi dasar pengambilan keputusan.





Gambar 11. Matriks Penilaian dan Pembobotan Rekomendasi Kebijakan dengan lima kriteria pembobotan

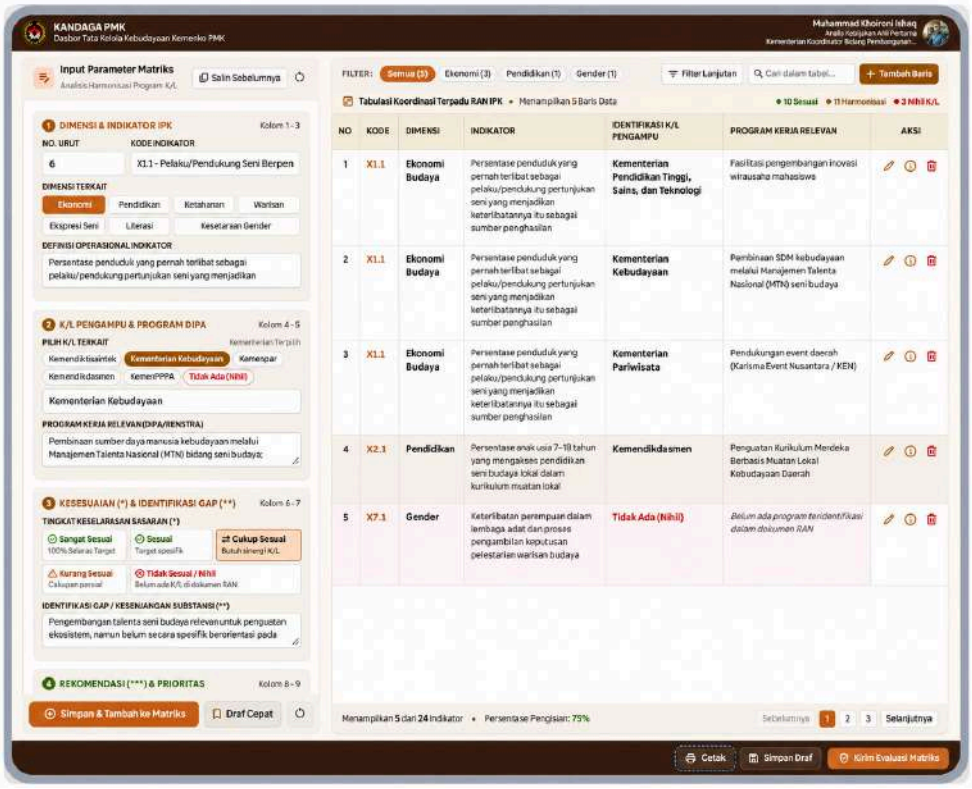


Gambar 12. Tampilan Cetak Dokumen Matriks Penilaian dan Pembobotan Rekomendasi Kebijakan

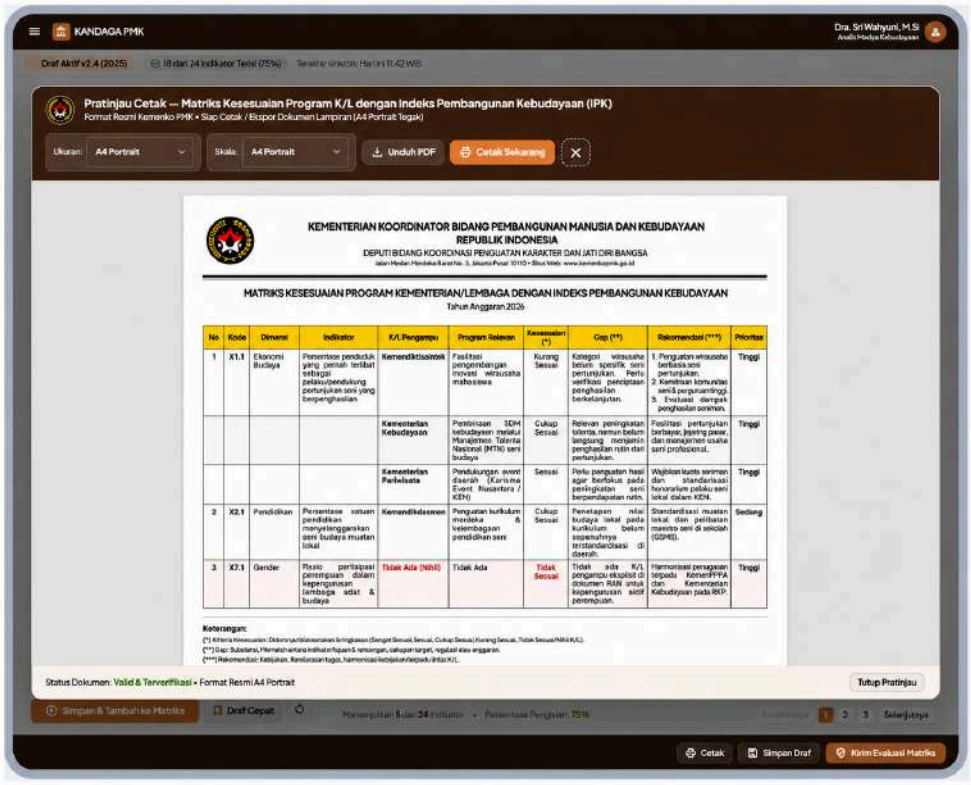
7.4 Formulir D: Matriks Kesesuaian Program K/L dengan IPK

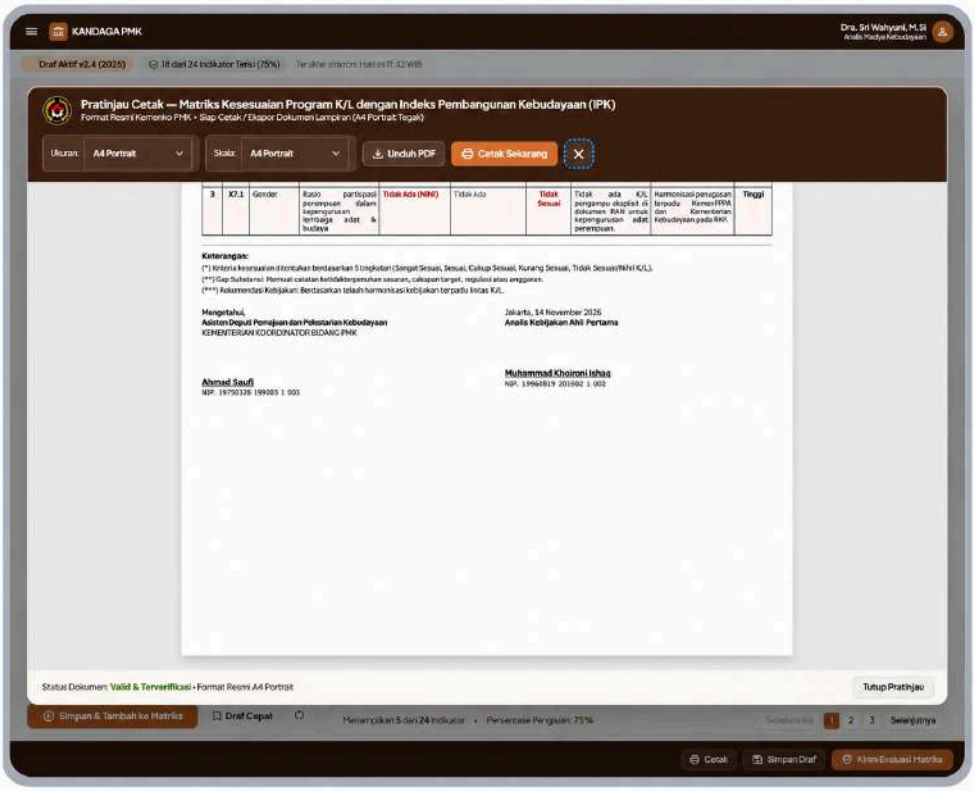
Matriks ini berfungsi untuk:

1. Memetakan K/L pengampu indikator IPK.
2. Mengidentifikasi program relevan (DIPA/Renstra).
3. Menilai tingkat kesesuaian program (sangat sesuai hingga tidak sesuai).
4. Mengidentifikasi kesenjangan intervensi.
5. Merumuskan rekomendasi dan prioritas.
6. Mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai bahan koordinasi dengan K/L.



Gambar 13. Matriks Kesesuaian Program Kementerian/Lembaga dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)





Gambar 14. Pratinjau Cetak Matriks Kesesuaian Program K/L dengan IPK.

7.5 Nilai Tambah KANDAGA PMK

1. Dari pendataan menjadi analisis: informasi program tidak hanya dikumpulkan, tetapi diolah untuk melihat kontribusinya terhadap sasaran pembangunan.
2. Dari sektoral menjadi lintas sektor: memperlihatkan keterkaitan program dan pembagian peran antar-K/L.
3. Dari pelaporan menjadi identifikasi masalah: membantu menemukan kesenjangan dan tumpang tindih intervensi.
4. Dari koordinasi administratif menjadi koordinasi berbasis bukti: menyediakan dasar yang lebih terstruktur bagi Kemenko PMK.
5. Dari rekomendasi menjadi prioritas: membantu memilih rekomendasi yang paling penting untuk ditindaklanjuti.
6. Mendukung fungsi KSP: memberikan instrumen analisis bagi pimpinan untuk menentukan kebutuhan tindak lanjut lintas K/L.

Bagian 8: Pembacaan Hasil Analisis dan Interpretasi Gap

📌 **Konsep**

Matriks dan formulir tidak hanya diisi, tetapi juga harus dibaca untuk pengambilan keputusan. Bagian ini menjelaskan cara membaca status kesesuaian, menangani program non-relevan, dan contoh penerapan end-to-end.

8.1 Cara Membaca Status Kesesuaian



8.2 Program Non-Relevan (Program Pendukung/Prasyarat)

Dalam dokumen perencanaan, sering ditemukan program yang bersifat administratif, regulasi, atau dukungan teknis internal (misalnya pembuatan peta geospasial atau harmonisasi hukum). Program seperti ini tidak dipaksakan masuk ke Gap 1, 2, atau 3.

Solusi: Kategorikan sebagai **Program Pendukung/Prasyarat**, yaitu program yang tidak secara langsung mendukung indikator IPK, tetapi menjadi fondasi atau prasyarat bagi tercapainya indikator tersebut. Rekomendasinya: pastikan program tersebut tetap berjalan sebagai fondasi pendukung, tanpa memaksakan pencocokan indikator.

8.3 Contoh Penerapan End-to-End

1. Indikator: X1.1 (Ekonomi Budaya) — persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikannya sumber penghasilan.
2. K/L dan Program: Kementerian Kebudayaan — Pembinaan SDM Kebudayaan melalui Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya.
3. Kesesuaian: Cukup Sesuai — tujuan dan sasaran relevan, tetapi belum ada bukti jaminan penghasilan.
4. Gap: Kesenjangan intervensi (pembinaan talenta belum disertai fasilitasi pertunjukan berbayar) dan kesenjangan pengukuran (belum ada pemantauan penghasilan peserta).

5. Rekomendasi: (a) fasilitasi pertunjukan seni berbayar; (b) kemitraan dengan penyelenggara acara; (c) pendampingan profesionalisme; (d) manajemen usaha seni.
6. Prioritas (pembobotan): skor tertinggi masuk kategori Tinggi.
7. Dokumen dan penetapan: disusun, direviu, ditandatangani, didistribusikan.
8. Monitoring: pantau jumlah talenta yang memperoleh penghasilan; bandingkan capaian indikator sebelum dan sesudah.

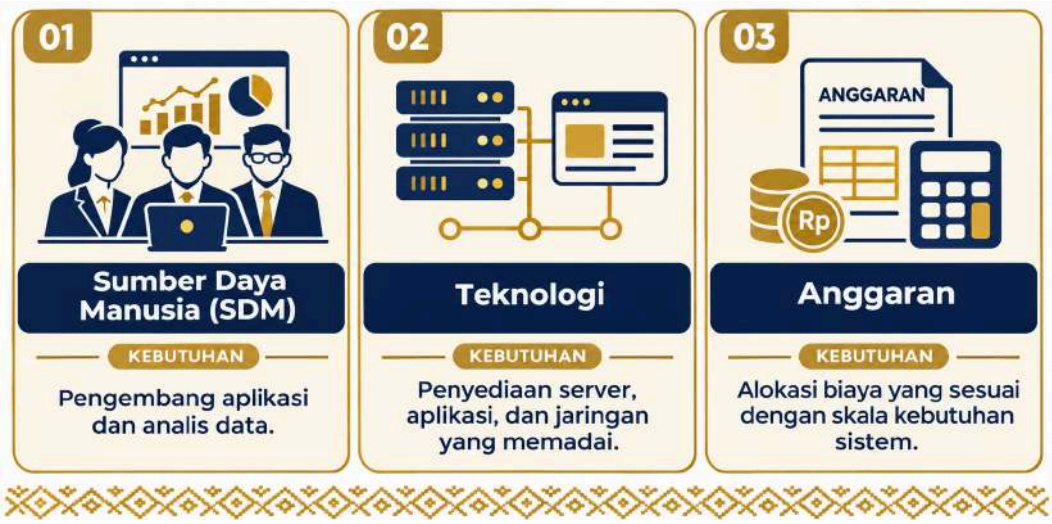
Bagian 9: Keberlanjutan Sistem

📌 Konsep

Blueprint dan prototipe Dashboard KANDAGA PMK merupakan rancangan dan purwarupa konseptual, bukan aplikasi operasional yang telah selesai dibangun. Implementasi lebih lanjut memerlukan dukungan sumber daya dan keputusan kelembagaan, termasuk ketersediaan anggaran pada periode mendatang.

9.1 Tiga Pilar Sumber Daya Utama

Pengembangan sistem KANDAGA PMK memerlukan dukungan SDM yang kompeten, teknologi yang memadai, dan anggaran yang sesuai kebutuhan. Ketiga pilar ini saling melengkapi untuk menunjang operasional serta keberlanjutan sistem.



9.2 Posisi Sistem dalam Ekosistem Kebijakan

Apabila dikembangkan dan dioperasikan secara berkelanjutan, sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat informasi, tetapi juga dapat menjadi fondasi pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy). Informasi program dan kegiatan K/L dapat dimanfaatkan untuk mendukung koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, serta perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah.

9.3 Prasyarat Implementasi

1. Keputusan kelembagaan untuk mengadopsi sistem.
2. Ketersediaan anggaran multi-tahun.
3. Kesepakatan teknis antarinstansi mengenai format dan mekanisme pertukaran data.
4. Kesiapan SDM di lingkungan Kemenko PMK dan K/L terkait.

Bagian 10: Tips dan Kesalahan Umum

📌 Konsep

Panduan praktis berupa hal yang sebaiknya dilakukan dan dihindari dalam penyusunan, pembacaan, dan pemanfaatan Dashboard KANDAGA PMK.



Bagian 11: Checklist Kesiapan

Sebelum memulai, pastikan semua item berikut sudah tersedia (centang □ jika sudah):

No	Item	Status
1	Data indikator IPK tersedia (Kepmen 215/M/2025)	□
2	Daftar K/L pengampu tersedia	□
3	Daftar program K/L tersedia (RAN PK/Renstra)	□
4	Template Matriks Konektivitas tersedia	□
5	Template Matriks Analisis Gap tersedia	□
6	Template Formulir A–D tersedia	□
7	Folder digital tersedia	□
8	Tim memahami alur dan kriteria kesesuaian	□
9	Jadwal pembaruan triwulanan disepakati	□
10	Mekanisme verifikasi operator (SK Pengelola) disiapkan	□

Rangkuman Sesi 5



Pesan Kunci:

Dashboard KANDAGA PMK menjembatani rancangan strategis (blueprint) dengan kebutuhan operasional melalui prototipe alat kerja. Melalui integrasi data, pemantauan triwulanan, analisis matriks, dan dokumentasi bukti dukung,

SESI 6: PENUTUP

🎯 Tujuan Sesi:

Setelah menyelesaikan sesi ini, pembaca diharapkan:

1. Memahami benang merah dan kesimpulan dari keseluruhan Buku digital.
2. Mengetahui langkah praktis yang harus dilakukan segera setelah membaca buku ini.
3. Memahami pesan kunci dari pedoman KANDAGA PMK.

Bagian 1: Ringkasan dan Kesimpulan

📌 Konsep

Buku digital ini terdiri dari 5 sesi utama yang membentuk satu alur kerja utuh, dari pengenalan konsep hingga perancangan sistem digital. Sesi 6 ini menjadi simpul yang mengikat semuanya.

📖 Penjelasan

Jika ditarik benang merahnya, KANDAGA PMK bekerja melalui alur berikut:

1. **Sesi 1 (Fondasi):** Memahami filosofi dan posisi KANDAGA PMK sebagai jembatan data dan keputusan untuk mendukung Asta Cita 8.
2. **Sesi 2 (Pemetaan):** Menggunakan Matriks Konektivitas untuk melihat hubungan antara 24 indikator IPK dengan program K/L, serta menemukan *gap*.
3. **Sesi 3 (Analisis):** Menggunakan Kerangka Analisis untuk membedah *gap* tersebut dan merumuskan rekomendasi yang objektif melalui skoring SAW.
4. **Sesi 4 (Eksekusi):** Menjalankan alur kerja 9 tahap dalam 30 hari, menilai kesesuaian program dengan 5 kriteria kategori yang ketat, dan memantau hasilnya.
5. **Sesi 5 (Digitalisasi):** Merancang *Blueprint Dashboard* untuk memantau program K/L dan data geospasial warisan budaya secara berkala dan terintegrasi.

Kesimpulan Utama:

KANDAGA PMK bukan sekadar wadah data, melainkan **alat kerja** yang membakukan cara berpikir analis. Dengan Matriks, Kerangka, Panduan, dan Dashboard, setiap analisis diharapkan menghasilkan rekomendasi yang konsisten, berbasis bukti, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian 2: Langkah Pertama Setelah Membaca

📌 Konsep

Sesi 1 hingga 5 telah membekali dengan konsep, alur kerja, dan alat analisis. Setelah menutup buku ini, jangan langsung melompat ke analisis yang rumit. Ikuti langkah operasional berikut untuk memulai pekerjaan sebagai analis:

1. Siapkan Amunisi

Sebelum bisa menganalisis, harus punya datanya.

a) Unduh dan buka dokumen Regulasi yang menetapkan IPK untuk daftar 24 indikator IPK).
b) Minta atau buka dokumen RAN PK dan Renstra K/L yang relevan di lingkungan kerja.
c) Pastikan sudah memiliki *template* Matriks Konektivitas kosong (tersedia di bagian Lampiran).

2. Mulai Isi Matriks, Jangan Langsung Menilai

Jangan takut salah di awal. Pilih 1 atau 2 indikator IPK yang paling dipahami. Coba petakan indikator tersebut ke K/L dan program yang ada di dokumen Renstra.

- *Tips:* Jika Anda bingung apakah suatu program "Sesuai" atau "Tidak Sesuai", buka kembali Sesi 4 (Kriteria Penetapan Kesesuaian). Jangan menebak; pastikan Anda punya data dukungnya.

3. Gunakan Kerangka Analisis untuk Membedah Gap

Jika menemukan program yang tidak sesuai atau bahkan tidak ada programnya, jangan panik. Gunakan Kerangka Analisis 5 Komponen (Sesi 3) untuk mencari tahu *mengapa* itu terjadi, lalu tentukan rekomendasinya.

4. Verifikasi, Jangan Bekerja Sendiri

Ingat prinsip utama KANDAGA PMK: jangan mengisi matriks berdasarkan asumsi sepihak. Setelah draf matriks diisi, kirimkan ke unit K/L terkait untuk dikonfirmasi.

5. Jika Menemui Jalan Buntu:

- Bingung istilah? Buka bagian Lampiran: Daftar Istilah.
- Butuh format baku? Gunakan Lampiran: Template Rekomendasi.
- Butuh bantuan teknis? Hubungi Koordinator Data atau Ketua Tim (kontak dapat dilihat pada bagian Tentang Tim Penyusun).

Pesan Kunci:

"Pedoman ini adalah awal, bukan akhir. Gunakan, revisi, dan sempurnakan sesuai kebutuhan."

PENUTUP

Buku digital Pedoman KANDAGA PMK ini disusun untuk menjadi alat kerja dalam mengoptimalkan pemanfaatan Data IPK untuk kebijakan bidang kebudayaan. Ia bukan dokumen statis — ia adalah pedoman hidup yang akan terus disempurnakan seiring perkembangan kebutuhan. Semoga bermanfaat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Contoh Matriks konektivitas Program K/L dengan IPK

MATRIKS KONEKTIVITAS
PROGRAM K/L BIDANG KEBUDAYAAN (OUTPUT)
DENGAN INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN (OUTCOME)

RENCANA AKSI PEMAJUAN KEBUDAYAAN TAHAP 1 TAHUN 2026-2029 (per 17 September 2026)				INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN (IPK)	
ARAH KEBIJAKAN/ STRATEGI/ FOKUS PELAKSANAAN	**PROGRAM**	**INDIKATOR CAPAIAN**	**K/L PENANGGUNG JAWAB**	**RELEVANSI KUNCI DENGAN DIMENSI IPK**	**DIMENSI TERKAIT DALAM IPK**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Arah Kebijakan: Mewujudkan jaminan kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai budayanya secara partisipatif dan inklusif					
Strategi : Menguatkan jaminan kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai dan ekspresi budayanya					
Fokus 1.1.1 Penguatan satuan pendidikan yang mengedepankan kebudayaan yang inklusif					
1.1.1.1	Penguatan kompetensi sumber daya manusia kebudayaan melalui kegiatan Gita Bahana Nusantara di satuan pendidikan	Jumlah anggota Gita Bahana Nusantara yang dibina di satuan pendidikan	Kementerian Kebudayaan	konteksnya pendidikan dan pertunjukan seni musik	Dimensi Pendidikan Dimensi Ekspresi Budaya
1.1.1.2	Edukasi mengenai sensor film dan iklan film di satuan pendidikan	Jumlah siswa pada satuan pendidikan yang mendapatkan edukasi mengenai sensor film dan iklan film	Kementerian Kebudayaan	konteksnya pendidikan dan akses terhadap literasi	Dimensi Budaya Literasi Dimensi Pendidikan

Lampiran 2: Contoh Matriks Kesesuain Program K/L dengan IPK

MATRIK KESESUAIAN PROGRAM KEMENTERIAN/LEMBAGA DENGAN INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

No	Kode	Dimensi	Indikator	Identifikasi K/L (K/L yang secara eksplisit mengampu)	Identifikasi Program yang Relevan	Kesuaian Program (*)	Identifikasi Gap (**)	Rekomendasi (***)	Prioritas
1	X1.1	Ekonomi Budaya	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku / pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Fasilitasi pengembangan inovasi wirausaha mahasiswa	Kurang Sesuai	Program **belum** menunjukkan kategori wirausaha secara spesifik **berkaitan dengan pertunjukkan seni**. Perlu **verifikasi lebih lanjut** apakah fasilitasi yang dilakukan pada mahasiswa menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan.	Program **belum** menunjukkan kategori wirausaha secara spesifik **berkaitan dengan pertunjukkan seni**. Perlu **verifikasi lebih lanjut** apakah fasilitasi yang dilakukan pada mahasiswa menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan.	Tinggi
2	dst								

Lampiran 3: Contoh Matriks Analisis

Matriks Analisis

X1.1 Dimensi : Ekonomi Budaya **Indikator : Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan**

Program: Fasilitasi pengembangan inovasi wirausaha mahasiswa

No	Rekomendasi Alternatif	Urgensi (30%)	Dampak (25%)	Kewenangan (20%)	Kemudahan (15%)	Sumber Daya (10%)	Skor	Prioritas
1	Penguatan fasilitasi kewirausahaan mahasiswa berbasis seni pertunjukan	5	4	5	5	3	4.55	Tinggi
2	Pengembangan kemitraan usaha mahasiswa dengan pelaku dan komunitas seni pertunjukan	5	5	3	3	3	4.1	Tinggi
3	Penguatan indikator kinerja dan evaluasi dampak program terhadap penghasilan pelaku seni pertunjukan	5	5	5	4	4	4.75	Tinggi
4	Evaluasi dimensi dan indikator	5	5	5	5	2	4.7	Tinggi

Program: Pembinaan sumber daya manusia kebudayaan melalui Manajemen Talenta Nasional bidang seni budaya

No	Rekomendasi Alternatif	Urgensi (30%)	Dampak (25%)	Kewenangan (20%)	Kemudahan (15%)	Sumber Daya (10%)	Skor	Prioritas
1	Fasilitasi pertunjukan seni berbayar	5	5	5	5	3	4.8	Tinggi
2	Pengembangan kemitraan dengan penyelenggara acara dan industri terkait	5	5	5	3	4	4.6	Tinggi
3	Pendampingan profesionalisme	5	5	5	3	3	4.5	Tinggi
4	Manajemen usaha seni	5	5	4	3	3	4.3	Tinggi

X7.1 Dimensi Gender Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki

Program: Tidak ada yang sesuai

No	Rekomendasi Alternatif	Urgensi (30%)	Dampak (25%)	Kewenangan (20%)	Kemudahan (15%)	Sumber Daya (10%)	Skor	Prioritas
1	Evaluasi dan Penguatan Indikator Dimensi Gender dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan	5	5	5	5	3	4.8	Tinggi
2	Tetap menggunakan ketiga indikator, dengan memperkuat pemetaan program lintas K/L yang berkontribusi terhadap kesetaraan gender	2	5	2	3	3	3	Sedang
3	Ketiga indikator tetap digunakan sebagai gambaran kondisi pendukung, kemudian ditambahkan indikator yang mengukur kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam ekosistem kebudayaan	2	5	2	4	4	3.25	Sedang
4	Indikator yang dinilai kurang relevan diganti dengan indikator yang lebih langsung mengukur kesetaraan gender dalam pembangunan kebudayaan	2	4	2	2	2	2.5	Rendah

📖 Penjelasan Skor

Skor	Prioritas
4,00–5,00	Tinggi
3,00–3,99	Sedang
1,00–2,99	Rendah

Lampiran 4: Contoh Format Standar Rekomendasi

Rekomendasi Perbaikan Program/Kegiatan K/L Berbasis Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Indikator IPK	:	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya sebagai sumber penghasilan (Dimensi Ekonomi Budaya)
Program	:	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Wirausaha Mahasiswa
K/L Pelaksana	:	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Analisis Kesesuaian dan Kesenjangan	:	Program Fasilitasi Pengembangan Inovasi Wirausaha Mahasiswa dinilai **kurang sesuai** dengan indikator ekonomi budaya karena berorientasi pada pengembangan kewirausahaan mahasiswa secara umum. Keterkaitan program dengan indikator bergantung pada sejauh mana program menjangkau usaha di bidang seni pertunjukan dan mendukung peningkatan penghasilan pelaku atau pendukungnya. Kesenjangan yang perlu diverifikasi adalah keterkaitan sasaran, intervensi, dan hasil program dengan kebutuhan indikator tersebut.
Rekomendasi Perbaikan	:	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi perlu mempertimbangkan penguatan fasilitasi kewirausahaan mahasiswa di bidang seni pertunjukan melalui pendanaan usaha, pendampingan bisnis, dan kemitraan dengan komunitas seni. Penguatan ini diarahkan untuk memperluas peluang usaha serta meningkatkan potensi penghasilan pelaku dan pendukung pertunjukan seni.
Hasil yang Diharapkan	:	Meningkatnya peluang usaha dan penghasilan pelaku atau pendukung pertunjukan seni melalui pengembangan kewirausahaan mahasiswa yang relevan dengan ekosistem seni pertunjukan.
Tindak Lanjut	:	Kemenko PMK mengoordinasikan verifikasi kesesuaian program dan penguatan mekanisme pemantauan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta pihak terkait untuk memastikan hasil program dapat diukur dan relevan dengan indikator IPK.

Rekomendasi Perbaikan Program/Kegiatan K/L Berbasis Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Indikator IPK	:	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya sebagai sumber penghasilan (Dimensi Ekonomi Budaya)
Program	:	Pembinaan SDM Kebudayaan melalui Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya
K/L Pelaksana	:	Kementerian Kebudayaan
Analisis Kesesuaian dan Kesenjangan	:	Program Pembinaan SDM Kebudayaan melalui Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya dinilai **cukup sesuai** karena mendukung pengembangan kapasitas dan profesionalisme talenta seni budaya. Namun, pembinaan talenta belum secara otomatis menjamin tersedianya kesempatan berkarya yang menghasilkan pendapatan. Kesenjangan yang perlu diatasi adalah belum optimalnya keterhubungan antara pembinaan talenta, akses terhadap pertunjukan berbayar, dan pemantauan penghasilan yang diperoleh peserta dari keterlibatannya dalam pertunjukan seni
Rekomendasi Perbaikan	:	Kementerian Kebudayaan perlu mempertimbangkan penguatan program melalui penambahan paket fasilitasi penyelenggaraan pertunjukan seni berbayar, pengembangan kemitraan dengan penyelenggara acara dan industri terkait, serta pendampingan profesionalisme dan manajemen usaha seni. Program juga perlu dilengkapi dengan mekanisme pemantauan jumlah talenta yang memperoleh penghasilan dari keterlibatannya dalam pertunjukan seni sebagai dasar evaluasi kontribusi program terhadap indikator IPK.
Hasil yang Diharapkan	:	Meningkatnya kesempatan berkarya dan memperoleh penghasilan bagi talenta seni budaya melalui pertunjukan seni yang berkelanjutan, sehingga memperkuat potensi kontribusi program terhadap peningkatan indikator ekonomi budaya dalam IPK.

Tindak Lanjut	:	Kemenko PMK mengoordinasikan pembahasan dengan Kementerian Kebudayaan untuk mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian desain program, menyepakati skema fasilitasi pertunjukan berbayar, serta mengembangkan mekanisme pemantauan hasil program berdasarkan jumlah peserta yang memperoleh penghasilan dari keterlibatannya dalam pertunjukan seni.
Indikator IPK	:	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki
Program	:	Tidak ada yang sesuai
K/L Pelaksana	:	Berdasarkan dokumen RAN PK tidak ada K/L Pengampu
Analisis Kesesuaian dan Kesenjangan	:	Indikator pada dimensi Gender dalam IPK, yaitu rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki, rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/sederajat, serta rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki, telah menggambarkan aspek kesetaraan gender dalam pembangunan secara umum. **Namun, indikator tersebut belum secara langsung mengukur kesetaraan akses, partisipasi, dan kesempatan perempuan dalam ekosistem kebudayaan**. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap relevansi indikator dengan tujuan pengukuran pembangunan kebudayaan, tanpa mengabaikan keterkaitannya dengan kondisi pendukung kesetaraan gender.
Rekomendasi Perbaikan	:	Kementerian Kebudayaan perlu berkoordinasi dengan Kemenko PMK, BPS, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappenas, serta pemangku kepentingan terkait untuk melakukan evaluasi konseptual dan metodologis terhadap indikator dimensi Gender dalam IPK. Evaluasi diarahkan pada penilaian relevansi indikator yang ada serta pengkajian penambahan indikator yang lebih spesifik untuk mengukur kesetaraan gender dalam ekosistem kebudayaan, antara lain kesetaraan kesempatan ekonomi bagi pelaku budaya, partisipasi perempuan dalam kegiatan seni dan budaya, serta keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan lembaga kebudayaan. Penyempurnaan indikator perlu mempertimbangkan ketersediaan dan kualitas data, validitas pengukuran, serta kesinambungan dan keterbandingan capaian IPK antar periode.

Hasil yang Diharapkan	:	Tersedianya dimensi Gender dalam IPK yang lebih representatif dalam menggambarkan kesetaraan gender dalam pembangunan kebudayaan, didukung indikator yang relevan, terukur, dan dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan lintas sektor.
Tindak Lanjut	:	Kemenko PMK mengoordinasikan pembahasan lintas K/L untuk mengevaluasi relevansi indikator dimensi Gender, memetakan kebutuhan data dan program pendukung, serta menyepakati alternatif penyempurnaan indikator berdasarkan hasil kajian konseptual dan metodologis. Hasil pembahasan selanjutnya menjadi bahan rekomendasi kebijakan bagi penyempurnaan IPK dengan tetap mempertimbangkan kewenangan instansi terkait dan keberlanjutan pengukuran.

Lampiran 5: Format *Policy Brief*

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGUATAN KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA

NOTA DINAS

Nomor: /DEP-IV/RK.03.00/8/2026

Yth.	:	Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa
Dari	:	Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
Hal	:	Laporan Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
Tanggal	:	Hari/Bulan/2026

Dengan hormat, kami laporkan hasil analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) melalui sistem KANDAGA PMK, sebagai berikut:

1. Analisis ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan (*gap*) antara program/kegiatan K/L dengan target capaian Indikator IPK, khususnya pada Indikator X1.1 (Ekonomi Budaya). Berdasarkan hasil pemetaan Matriks Konektivitas, ditemukan bahwa program pelatihan seni yang berjalan selama ini baru berfokus pada aspek keluaran (*output*) berupa jumlah peserta, namun belum menyentuh aspek hasil (*outcome*) berupa peningkatan pendapatan pelaku seni.

2. Adapun hasil analisis menggunakan 5 Komponen Kerangka Analisis dan pembobotan prioritas (*Simple Additive Weighting*/SAW) adalah sebagai berikut:
    a. Terdapat tiga usulan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan untuk menutup kesenjangan (*gap*) tersebut, yaitu: (1) Fasilitasi pertunjukan seni berbayar melalui kemitraan dengan penyelenggara acara (EO); (2) Revisi panduan program wirausaha mahasiswa di Kemendiktisaintek agar spesifik menyasar sektor seni pertunjukan; dan (3) Penguatan indikator kinerja dan evaluasi dampak dengan menambahkan variabel pemantauan penghasilan peserta
    b. Berdasarkan hasil pemantauan Triwulan II Tahun 2026, dari ketiga rekomendasi tersebut, sebanyak 1 rekomendasi berstatus **Selesai** (Penguatan indikator kinerja), 1 rekomendasi berstatus **Sedang Dilaksanakan** (Kemitraan pertunjukan berbayar), dan 1 rekomendasi berstatus **Belum Dilaksanakan** (Revisi panduan wirausaha mahasiswa).
    c. Rekomendasi No. 1 (Kemitraan EO) menjadi prioritas utama untuk segera dieksekusi karena menjadi kunci utama terciptanya pendapatan pelaku seni. Sementara itu, Rekomendasi No. 2 perlu segera dijadwalkan rapat koordinasinya agar tidak stagnan. *(Rincian matriks pemantauan dan bukti dukung terlampir dalam dokumen Lampiran)*

3. Tindak Lanjut
    a) Tim KANDAGA PMK akan mengirimkan surat kembali kepada Kementerian Kebudayaan dan Kemendiktisaintek untuk percepatan tindak lanjut rekomendasi yang masih berstatus "Sedang Dilaksanakan" dan "Belum Dilaksanakan".
    b) Meminta Kementerian Kebudayaan untuk segera mengeksekusi kemitraan dengan penyelenggara acara (EO) dan industri pariwisata pada awal Triwulan III
    c) Meminta Kemendiktisaintek untuk menjadwalkan rapat pimpinan guna merevisi Peraturan/panduan program wirausaha mahasiswa pada bulan September 2026

Demikian dilaporkan, atas perhatian dan arahan Bapak Deputi lebih lanjut diucapkan terima kasih.

Asisten Deputi Pemajuan dan
Pelestarian Kebudayaan,

Ditandatangani secara
elektronik
Ahmad Saufi

Lampiran

A. RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Fasilitasi Pengembangan Inovasi Wirausaha Mahasiswa yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dinilai **Kurang Sesuai** dalam mendukung Indikator Ekonomi Budaya (X1.1) IPK. Terdapat kesenjangan intervensi karena program berorientasi umum dan belum spesifik menyasar sektor seni pertunjukan. Diperlukan penajaman program melalui pendanaan dan pendampingan bisnis khusus di bidang seni pertunjukan agar berdampak langsung pada peningkatan penghasilan pelaku seni.

B. LATAR BELAKANG DAN MASALAH

Indikator X1.1 (Ekonomi Budaya) dalam IPK mengukur *persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikannya sebagai sumber penghasilan*.

Berdasarkan hasil analisis Matriks Konektivitas, Kemendiktisaintek memiliki program wirausaha mahasiswa. Namun, program ini bersifat umum dan belum tentu menyasar mahasiswa yang bergerak di bidang seni pertunjukan. Tanpa intervensi spesifik, program ini tidak akan berdampak signifikan pada capaian indikator IPK.

C. ANALISIS DAN BUKTI PENDUKUNG

1. Kategori Kesesuaian: Kurang Sesuai.
2. Analisis Gap: Terdapat *Kesenjangan Sasaran* (mahasiswa umum vs pelaku seni) dan *Kesenjangan Intervensi* (belum ada dukungan spesifik untuk usaha seni pertunjukan). Program belum menjamin terciptanya ekosistem yang membuat keterlibatan seni menjadi sumber penghasilan.
3. Skor Prioritas (SAW): [4,55 / Tinggi] (Berdasarkan pembobotan: Urgensi, Dampak, dan Kewenangan Kemendiktisaintek yang dinilai tinggi untuk menyentuh kelompok mahasiswa).

D. REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Perlu penajaman alokasi (Prioritas Tinggi), Kemendiktisaintek perlu menyediakan skema pendanaan usaha yang spesifik untuk mahasiswa di bidang seni pertunjukan (misal: *startup* manajemen panggung, komunitas teater, atau produksi seni).
2. Perlu sinergi kemitraan dengan memfasilitasi kemitraan antara wirausaha mahasiswa bidang seni dengan komunitas seni dan penyelenggara acara (*event organizer*) untuk membuka akses pasar.
3. Perlu pendampingan bisnis dengan menyediakan pendampingan manajemen usaha seni agar penghasilan pelaku/pendukung pertunjukan seni meningkat secara berkelanjutan.

E. IMPLIKASI KEBIJAKAN

1. Dampak Positif, dapat meningkatnya peluang usaha mahasiswa di sektor seni, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan persentase pelaku seni yang memperoleh penghasilan (Indikator X1.1).
2. Perlu penyesuaian pedoman program wirausaha mahasiswa dan realokasi sebagian anggaran fasilitasi untuk sektor ekonomi kreatif/seni.

F. LANGKAH TINDAK LANJUT

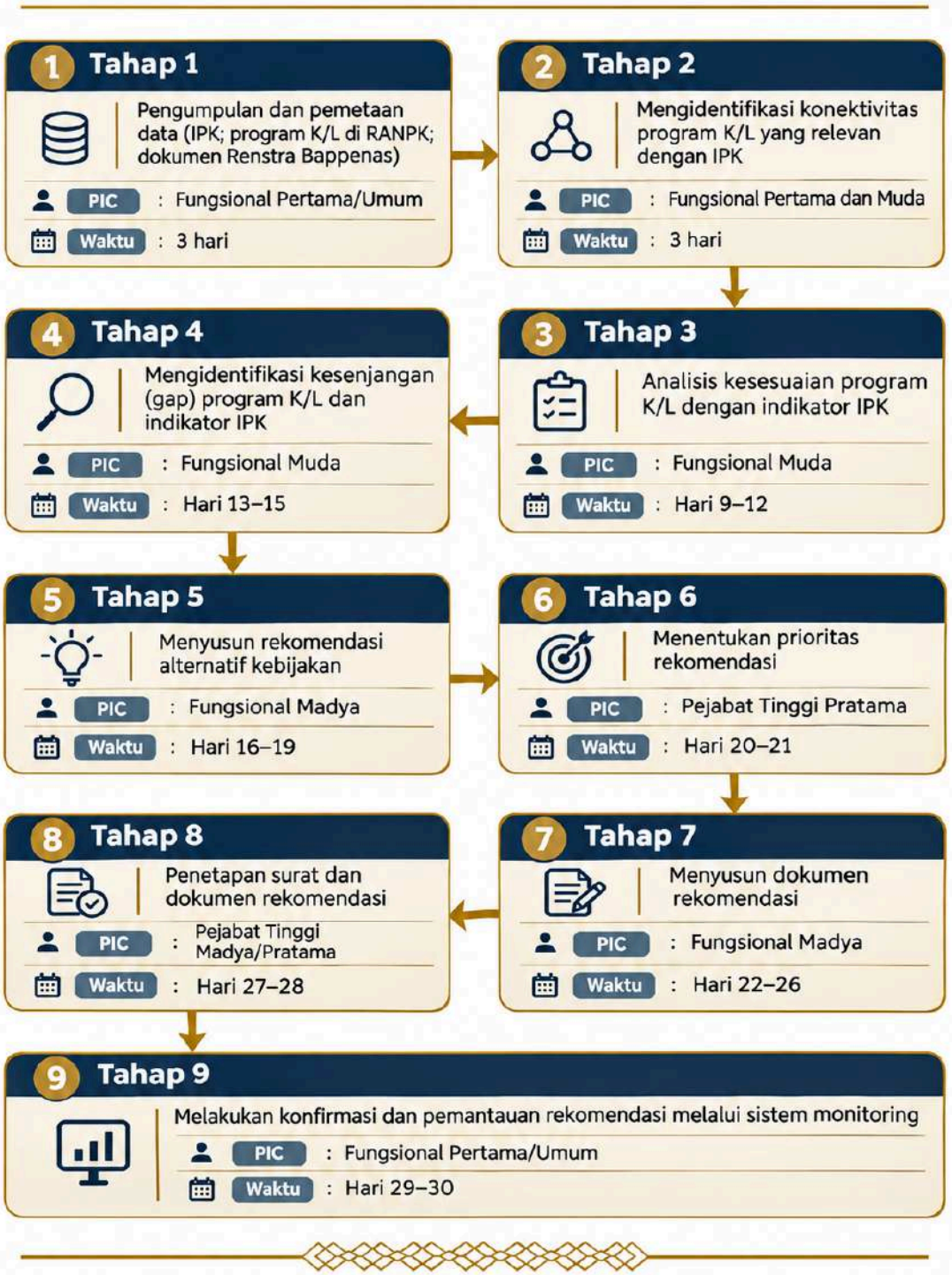
1. Penetapan surat rekomendasi oleh Deputi.
2. Konfirmasi dan validasi rekomendasi kepada Kemendiktisaintek.
3. Dilakukan Koordinasi pada triwulan berikutnya yang difasilitasi Kemenko PMK) untuk menyusun skema program dan mekanisme pemantauan penghasilan mahasiswa pelaku seni.

Demikian dilaporkan, atas perkenan dan arahan Bapak Deputi, diucapkan terima kasih.

Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan,

Ditandatangani secara elektronik
Ahmad Saufi

Lampiran 6 : Alur Tahapan Analisis KANDAGA PMK



Lampiran 7 : Contoh Template Monitoring

Formulir Pemantauan Pelaksanaan Rekomendasi KANDAGA PMK

Program : Optimalisasi Program Pelatihan Seni untuk Meningkatkan Pendapatan Pelaku Budaya (Indikator X1.1)
Periode : Triwulan II Tahun 2026
Tanggal : 30 Juni 2026

A. Identitas

1. Nama : [Nama Analis / Fungsional Pertama]
2. K/L : Kementerian Kebudayaan dan Kemendiktisaintek
3. Tujuan : Memastikan program pelatihan seni tidak berhenti pada pembinaan kapasitas, tetapi berlanjut pada terciptanya panggung berbayar dan peningkatan penghasilan pelaku seni.

B. Tabel Pemantauan Rekomendasi

No	Indikator IPK dan K/L Pelaksana	Rekomendasi yang Disepakati	Status Pelaksanaan	Bukti Dukung (Dokumen / Foto)	Catatan Kendala dan Tindak Lanjut	Capaian Indikator (Sebelum → Sesudah)
1	X1.1 Ekonomi Budaya K/L: Kementerian Kebudayaan	Fasilitasi pertunjukan seni berbayar melalui kemitraan dengan penyelenggara acara (EO) dan industri pariwisata.	Sedang Dilaksanakan	• Draf MoU dengan 3 EO (File PDF) • Jadwal pentas TW II (File Excel)	*Kendala:* Jadwal pentas di 2 provinsi mundur karena musim hujan. *Tindak Lanjut:* Menggeser jadwal ke awal TW III.	10% → *(Belum ada data final)*
2	X1.1 Ekonomi Budaya K/L: Kemendikti saintek	Revisi panduan program wirausaha mahasiswa agar spesifik menyasar sektor seni pertunjukan.	Belum Dilaksanakan	(Belum ada bukti)	*Kendala:* Menunggu jadwal rapat pimpinan untuk revisi Peraturan. *Tindak Lanjut:* Dijadwalkan rapat pada bulan depan.	*(Tetap)*
3	X1.1 Ekonomi Budaya K/L:	Penguatan indikator kinerja dan evaluasi dampak dengan	Selesai	• Instrumen survei penghasilan	Tidak ada kendala. Instrumen sudah disetujui dan siap digunakan.	10% → *(Menunggu survei)*

No	Indikator IPK dan K/L Pelaksana	Rekomendasi yang Disepakati	Status Pelaksanaan	Bukti Dukung (Dokumen / Foto)	Catatan Kendala dan Tindak Lanjut	Capaian Indikator (Sebelum → Sesudah)
	Kementerian Kebudayaan	menambahkan variabel pemantauan penghasilan peserta pelatihan.		(File PDF) • Laporan Evaluasi TW II		

C. Ringkasan Status Pemantauan

(Diisi oleh Analis di akhir periode)

Total Rekomendasi Dipantau: 3

a. Selesai, 1 (Penguatan indikator kinerja)
b. Sedang Dilaksanakan, 1 (Kemitraan pertunjukan berbayar)
c. Belum Dilaksanakan, 1 (Revisi panduan wirausaha mahasiswa)

Kesimpulan dan Rekomendasi

Program pelatihan seni saat ini baru berfokus pada output (jumlah peserta), namun belum sampai pada outcome (pendapatan). Rekomendasi No. 1 (Kemitraan EO) harus menjadi prioritas untuk dieksekusi karena menjadi kunci utama terciptanya pendapatan. Rekomendasi No. 2 (Revisi panduan oleh Kemendiktisaintek) perlu segera dijadwalkan rapatnya agar tidak stagnan. Tim KANDAGA PMK akan mengirimkan surat kembali untuk percepatan tindak lanjut.

Disahkan oleh,
Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan

Ahmad Saufi
NIP. .....

Lampiran 8 : Daftar Istilah (Glosarium)

DAFTAR ISTILAH (GLOSARIUM)

No	Istilah	Pengertian
1	Asta Cita	Delapan misi utama pembangunan nasional. KANDAGA PMK secara khusus mendukung Asta Cita 8 (harmoni dengan lingkungan, alam, dan budaya).
2	Blueprint Dashboard	Rancangan arsitektur sistem yang menggambarkan integrasi data program K/L dan data geospasial ke dalam dashboard digital (bukan aplikasi jadi, melainkan cetak biru).
3	Data Dukung	Bukti yang dapat ditelusuri untuk mendukung penilaian kesesuaian, meliputi dokumen program, indikator kinerja, target vs realisasi, laporan evaluasi, dan data capaian indikator.
4	Data Geospasial	Data yang merepresentasikan sebaran dan kondisi warisan budaya dalam bentuk peta digital (cagar budaya, WBTB, museum, sanggar seni).
5	Data Lintas Sektor	Data dari sektor sosial-ekonomi, infrastruktur, serta hukum dan tata kelola yang digunakan sebagai konteks untuk memahami mengapa suatu program berjalan atau tidak.
6	Fungsional Pertama/Muda/Madya	Jenjang jabatan fungsional analis kebijakan yang menjadi penanggung jawab (PJ) dalam tahapan alur kerja KANDAGA PMK.
7	Gap (Kesenjangan)	Selisih antara kebutuhan pencapaian indikator dengan desain/pelaksanaan program yang ada. Terdiri dari 7 jenis: tujuan, sasaran, intervensi, hasil, pengukuran, tata kelola, serta indikator dan data.
8	IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan)	Ukuran capaian pembangunan kebudayaan yang terdiri dari 7 dimensi dan 24 indikator. Indikator dan definisi operasionalnya bersumber dari Kepmen Kebudayaan No. 215/M/2025.

No	Istilah	Pengertian
9	KANDAGA PMK	Kanal Data dan Analisis Gatra Budaya di lingkungan Kemenko PMK. Nama ini juga bermakna "wadah/peti emas" dalam bahasa Sunda Kuno.
10	Kesesuaian	Penilaian sejauh mana suatu program K/L mendukung pencapaian indikator IPK, terdiri dari 5 kategori: Tidak Sesuai, Kurang Sesuai, Cukup Sesuai, Sesuai, dan Sangat Sesuai.
11	Kerangka Analisis	Panduan sistematis dengan 5 komponen (Identifikasi K/L, Identifikasi Program, Analisis Kesesuaian, Identifikasi Gap, Rekomendasi) untuk menganalisis kesesuaian program K/L dengan indikator IPK.
12	Matriks Konektivitas	Tabel pemetaan dua arah yang menghubungkan 7 Dimensi dan 24 Indikator IPK dengan Program/Kegiatan K/L.
13	Monitoring	Proses konfirmasi dan pemantauan rekomendasi melalui sistem monitoring, mencakup verifikasi data, konfirmasi ke K/L, dan pemantauan pelaksanaan rekomendasi serta perubahan indikator secara berkala.
14	Pendekatan Bottom-Up	Cara menyusun matriks dengan berangkat dari dokumen perencanaan (RAN PK/Renstra) lalu memetakan program ke Dimensi IPK. Cocok jika dokumen perencanaan sudah tersedia.
15	Pendekatan Top-Down	Cara menyusun matriks dengan berangkat dari 24 indikator IPK lalu mencari program K/L yang mendukungnya. Cocok jika data program K/L belum terpusat.
16	Pejabat Tinggi Pratama/Madya	Pejabat struktural (eselon II/I) yang menjadi penanggung jawab (PJ) pada tahap penentuan prioritas dan penetapan dokumen rekomendasi.
17	PJ (Penanggung Jawab)	Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu tahapan dalam alur kerja KANDAGA PMK.
18	PMK Data Prime	Sistem data internal Kemenko PMK yang menjadi tujuan integrasi data KANDAGA PMK (melalui API, database, atau file transfer).

No	Istilah	Pengertian
19	Program Pendukung/Prasyarat	Program yang bersifat administratif, regulasi, atau dukungan teknis internal. Program ini tidak dipaksakan masuk ke Gap 1, 2, atau 3, tetapi tetap dicatat sebagai fondasi pendukung.
20	RAN PK	Rencana Aksi Nasional Pemajuan Kebudayaan, turunan RIPK per periode lima tahun, yang memuat matriks konektivitas program K/L.
21	Renstra/Renja K/L	Dokumen perencanaan K/L (tersedia di Bappenas) yang menjadi sumber daftar program, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja.
22	RIPK	Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (Perpres 115/2024), periode 2025–2045.
23	SAW (Simple Additive Weighting)	Metode pembobotan untuk menentukan prioritas rekomendasi, menggunakan 5 kriteria berbobot: Urgensi (30%), Dampak (25%), Kewenangan (20%), Kemudahan (15%), dan Sumber Daya (10%).
24	Telaahan	Proses memeriksa dan menganalisis kesesuaian program secara mendalam sebelum rekomendasi disahkan. Terdiri dari 4 tahap: Identifikasi, Analisis, Rekomendasi, Verifikasi.
25	WBTB (Warisan Budaya Takbenda)	Warisan budaya yang bersifat takbenda (tradisi, bahasa, seni pertunjukan, dll.) yang menjadi salah satu lapisan data dalam dashboard geospasial.

Daftar istilah ini sudah mencakup seluruh istilah kunci yang digunakan dalam Buku digital dan dirujuk langsung ke sesi asalnya, sehingga pembaca dapat menelusuri penjelasan lengkapnya bila diperlukan.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Halaman Utama Dasbor KANDAGA PMK
Gambar 2	Tampilan Halaman Monitoring Program K/L
Gambar 3	Tampilan Halaman Peta Warisan Budaya berbasis SIG
Gambar 4	Halaman Login untuk User, Admin, dan Pengelola KANDAGA PMK
Gambar 5	Halaman Registrasi User Baru dengan kolom unggah Dokumen SK Pengelola
Gambar 6	Halaman Beranda setelah berhasil login/registrasi
Gambar 7	Formulir Langkah 1: Profil dan Identitas K/L
Gambar 8	Formulir Langkah 2: Evaluasi Hambatan, Mitigasi, dan Unggah Bukti Dukung
Gambar 9	Formulir Matriks Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Kemenko PMK
Gambar 10	Formulir Rekomendasi Perbaikan Program/Kegiatan K/L Berbasis Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
Gambar 11	Matriks Penilaian dan Pembobotan Rekomendasi Kebijakan
Gambar 12	Tampilan Cetak Dokumen Matriks Penilaian dan Pembobotan Rekomendasi Kebijakan
Gambar 13	Matriks Kesesuaian Program Kementerian/Lembaga dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
Gambar 14	Pratinjau Cetak Matriks Kesesuaian Program K/L dengan IPK

DAFTAR PUSTAKA

A. Regulasi

1. Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*.
2. Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*.
3. Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025–2045*.
4. Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*.
5. Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029*.
6. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2024). *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*.
7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2022 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan*.
8. Kementerian Kebudayaan. (2025). *Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 215/M/2025 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2024*.
9. Republik Indonesia. (2025). *Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pemajuan Kebudayaan Tahap I Tahun 2026–2029*.

B. Referensi Metodologi

1. Fishburn, P.C. (1967). *Additive Utilities with Incomplete Product Sets: Application to Priorities and Assignments*. Operations Research.
2. MacCrimmon, K.R. (1968). *Decision Making Among Multiple-Attribute Alternatives: A Survey and Consolidated Approach*. RAND Corporation.

C. Referensi Pedoman

1. Lembaga Administrasi Negara. (2014). *Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 31 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan*.
2. Lembaga Administrasi Negara. (2017). *Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Analis Kebijakan*.
3. Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

SURAT KEPUTUSAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGUATAN KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA

NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN *e*-PEDOMAN KANDAGA PMK
SEBAGAI INSTRUMEN KERJA ANALISIS SERTA KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENGENDALIAN DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGUATAN KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGUATAN KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, diperlukan instrumen kerja analisis yang sistematis, terstandar, berbasis data, dan dapat digunakan secara konsisten di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa;

b. bahwa untuk memperkuat tata kelola kebudayaan berbasis data, telah dilaksanakan aksi perubahan melalui pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Penguatan Sistem Tata Kelola Kebudayaan Berbasis Data berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Penguatan Sistem Tata Kelola Kebudayaan Berbasis Data;

c. bahwa salah satu hasil aksi perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah *e*-Pedoman KANDAGA PMK (Kanal Data dan Analisis Gatra Budaya PMK), yang disusun untuk menghubungkan data Indeks Pembangunan Kebudayaan dengan program/kegiatan

kementerian/lembaga serta mendukung penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan;

d. bahwa *e*-Pedoman KANDAGA PMK telah disusun dengan melibatkan Asisten Deputi dan analis, serta telah melalui proses uji coba dan penyempurnaan berdasarkan masukan dan kebutuhan pelaksanaan tugas;

e. bahwa agar hasil aksi perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat diterapkan secara berkelanjutan dan menjadi acuan kerja bersama, perlu menetapkan *e*-Pedoman KANDAGA PMK dengan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2i Nomor 191);
3. Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 142);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 963);

Memperhatikan :

1. Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Tahun 2026;
2. Rancangan Aksi Perubahan Penguatan Sistem Tata Kelola Kebudayaan Berbasis Data melalui *e*-Pedoman KANDAGA PMK;
3. Kebutuhan penguatan instrumen kerja koordinasi pembangunan kebudayaan berbasis data dan analisis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGUATAN KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA TENTANG PENETAPAN *e*-PEDOMAN KANDAGA PMK SEBAGAI INSTRUMEN KERJA ANALISIS SERTA KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENGENDALIAN DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGUATAN KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA.

KESATU : Menetapkan *e*-Pedoman KANDAGA PMK (Kanal Data dan Analisis Gatra Budaya PMK), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi ini, sebagai instrumen kerja analisis serta koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa;

KEDUA : *e*-Pedoman KANDAGA PMK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Asisten Deputi dan analis dalam:

a. mengidentifikasi, menghimpun, menelaah, dan memanfaatkan data yang relevan, termasuk data Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK);
b. memetakan keterkaitan indikator pembangunan kebudayaan dengan program dan kegiatan kementerian/lembaga terkait;
c. menyusun analisis, isu strategis, opsi kebijakan, dan rekomendasi yang berbasis data serta dapat ditindaklanjuti;
d. menggunakan matriks, kerangka analisis, format, dan template kerja yang ditetapkan dalam *e*-Pedoman KANDAGA PMK; dan
e. mendukung pengawalan pencapaian target dan indikator pembangunan yang menjadi lingkup tugas masing-masing Asisten Deputi, termasuk yang terkait dengan RPJMN 2025–2029.

KETIGA : Asisten Deputi mengoordinasikan penerapan *e*-Pedoman KANDAGA PMK pada unit kerja masing-masing, memastikan kesesuaian analisis dengan tugas dan fungsi, serta mendorong pemanfaatan hasil analisis dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian.

KEEMPAT : Analis di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa menggunakan *e*-Pedoman KANDAGA PMK dalam pelaksanaan tugas analisis dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan, sumber dan kualitas data, serta kewenangan instansi pemilik data.

KELIMA : Hasil penerapan *e*-Pedoman KANDAGA PMK dapat digunakan sebagai bahan penyusunan telaahan, rekomendasi kebijakan, bahan koordinasi, pemantauan tindak lanjut, dan pelaporan pelaksanaan tugas Deputi sesuai kebutuhan organisasi;

KEENAM : Pemutakhiran dan penyempurnaan *e*-Pedoman KANDAGA PMK dilakukan secara berkala berdasarkan hasil evaluasi penerapan, perkembangan kebijakan dan data, masukan Asisten Deputi dan analis, serta kebutuhan organisasi. Pemutakhiran sebagaimana dimaksud tidak boleh mengubah substansi penetapan tanpa persetujuan Deputi.

KETUJUH : Pelaksanaan Keputusan Deputi ini dikoordinasikan oleh Saudara Ayu Dewita sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya, dengan melibatkan Asisten Deputi dan analis sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Deputi ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

KESEMBILAN : Keputusan Deputi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Deputi ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2026

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PENGUATAN KARAKTER DAN JATI
DIRI BANGSA,

WARSITO

LAMPIRAN KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PENGUATAN KARAKTER DAN
JATI DIRI BANGSA NOMOR:
TAHUN 2026

e-PEDOMAN KANDAGA PMK
KANAL DATA DAN ANALISIS GATRA BUDAYA PMK

A. KEDUDUKAN DAN TUJUAN

e-Pedoman KANDAGA PMK merupakan instrumen kerja internal di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa untuk mendukung analisis kebijakan kebudayaan berbasis data serta pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. *e*-Pedoman ini dimaksudkan untuk membangun proses kerja yang terstruktur, konsisten, terdokumentasi, dan berorientasi pada rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.

B. RUANG LINGKUP

1. Penggunaan dan penelaahan data pembangunan kebudayaan, termasuk data IPK dan data relevan lainnya;
2. Pemetaan keterkaitan indikator pembangunan kebudayaan dengan program/kegiatan kementerian/lembaga;
3. Penyusunan kerangka analisis, identifikasi isu strategis, dan perumusan rekomendasi kebijakan;
4. Penggunaan matriks, tabel bantu, format, dan template kerja analisis; dan
5. Pemanfaatan hasil analisis sebagai bahan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan.

C. KELUARAN/INSTRUMEN PENDUKUNG

1. Pedoman Teknis KANDAGA PMK; dan
2. Matriks Konektivitas IPK dengan Program/Kegiatan Kementerian/Lembaga;
3. Kerangka Analisis dan Standar Rekomendasi Kebijakan;
4. Blueprint Dashboard sebagai rancangan dukungan visualisasi dan pemantauan data dan Prototipe.

D. PRINSIP PENERAPAN

1. Berbasis data dan sumber yang dapat ditelusuri;
2. Mengutamakan ketepatan, relevansi, keterbaruan, dan keterbandingan data;
3. Menghubungkan indikator, program/kegiatan, keluaran, dan hasil pembangunan;
4. Menghasilkan analisis yang objektif, terukur, dan dapat ditindaklanjuti;
5. Menghormati kewenangan instansi pemilik data serta ketentuan mengenai pengelolaan dan keterbukaan informasi; dan
6. Mendorong kolaborasi dan keseragaman proses kerja antar-Asisten Deputi.

E. TATA CARA PENERAPAN

1. Analis menggunakan tahapan, matriks, dan template sebagaimana diatur dalam *e*-Pedoman KANDAGA PMK;
2. Asisten Deputi mengarahkan fokus analisis sesuai tugas dan fungsi serta memastikan hasil analisis relevan dengan kebutuhan koordinasi;
3. Data dan informasi yang digunakan dicantumkan sumber, periode, definisi, dan keterbatasannya;
4. Hasil analisis dibahas dan divalidasi secara internal sesuai kebutuhan sebelum digunakan sebagai bahan koordinasi atau rekomendasi; dan
5. Masukan dan pembelajaran penerapan didokumentasikan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan pedoman.

F. EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN

Evaluasi penerapan dilakukan secara berkala oleh unit/pejabat koordinator bersama Asisten Deputi dan analis. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar penyempurnaan substansi, metode, matriks, template, dan instrumen pendukung *e*-Pedoman KANDAGA PMK. Setiap perubahan substansial terhadap pedoman ditetapkan atau disetujui oleh Deputi.

G. TIM EFEKTIF PENYUSUNAN DAN PENERAPAN PEDOMAN KANDAGA PMK

Dalam rangka mendukung penyusunan, penyempurnaan, dan penerapan *e*-Pedoman KANDAGA PMK, dibentuk Tim Efektif dengan susunan keanggotaan dan pembagian tugas sebagai berikut:

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan	Uraian Tugas
1	Pengarah	Deputi Bidang Koordinasi	Memberikan arahan strategis dan kebijakan; memastikan

		Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	keselarasan Aksi Perubahan dengan tugas dan fungsi Deputi; serta memberikan arahan atas isu lintas unit.
2	Penanggung Jawab	Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	Memberikan arahan substansi, memastikan dukungan unit kerja, mengawal pelaksanaan Aksi Perubahan, serta memberikan persetujuan terhadap keluaran sesuai kewenangan.
3	Ketua Tim/Project Leader	Ayu Dewita / Analis Kebijakan Ahli Madya	Mengoordinasikan seluruh tahapan, menyusun rencana kerja dan jadwal, membagi tugas, mengendalikan pelaksanaan, mengelola isu dan risiko, mengawal validasi dan uji coba, serta menyampaikan laporan.
4	Wakil Ketua	Dian Novico / Pranata Humas Ahli Madya	Mendukung koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan, pengelolaan komunikasi kebijakan, dokumentasi, serta tindak lanjut hasil koordinasi.
5	Anggota Matriks Konektivitas IPK–Program K/L	Fajar Fermi / Analis Kebijakan Ahli Muda	Menyusun dan memutakhirkan Matriks Konektivitas IPK–Program K/L yang memetakan dimensi dan indikator IPK, sumber data, K/L pemilik program, program prioritas, serta kesenjangan.
6	Anggota Kerangka Analisis dan Rekomendasi	Nugroho / Analis APBN Muda	Menyusun Kerangka Analisis Terstruktur dan Template Rekomendasi Terintegrasi IPK dengan parameter kritis, indikator pertimbangan, analisis kesenjangan, dan justifikasi berbasis data IPK.
7	Anggota Produk Digital dan *E-book*	M. Khoironi Ishaq dan Raka Prima Santosa / Analis Kebijakan Ahli Pertama	Mendukung penyusunan *e-book* Pedoman KANDAGA PMK, buku saku digital, pengolahan materi, tata letak, serta bahan pendukung publikasi dan pemanfaatan produk digital.

8	Anggota *Blueprint* Teknologi	Ferdiansyah / Analis Kebijakan Ahli Madya	Menyusun *Blueprint* Dashboard KANDAGA PMK, termasuk rancangan arsitektur informasi, kebutuhan data, struktur informasi, antarmuka, dan fitur utama.
9	Anggota Telaah dan Reviu Dokumen	Windy Pratama/ Analis Hukum Ahli Muda	Melakukan telaah dan reviu terhadap rancangan Keputusan, surat rekomendasi, dan dokumen kedinasan lainnya serta memberikan rekomendasi perbaikan sesuai ketentuan.
10	Koordinator Integrasi Data	Yossi Aprilia/ Analis Kebijakan Ahli Muda	Mengoordinasikan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, integrasi, pemutakhiran, dan dokumentasi data IPK serta sumber data pendukung seluruh keluaran Aksi Perubahan.
11	Sekretariat	Reski Puteri / Analis Nilai Budaya	Mendukung administrasi, termasuk jadwal, undangan, daftar hadir, notulensi, dokumentasi, pengarsipan, pengendalian versi dokumen, dan administrasi pelaporan.

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PENGUATAN KARAKTER DAN
JATI DIRI BANGSA,

WARSITO

TENTANG TIM PENYUSUN

Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Nomor 13 Tahun 2026 dan bertanggung jawab dalam penyusunan Pedoman KANDAGA PMK sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan berbasis data dan analisis gatra budaya.

1 Ketua Tim



AYU DEWITA

Koordinasi keseluruhan, arah strategis dan penjaminan kualitas hasil penyusunan

2 Wakil Ketua Tim



DIAN NOVICO

Dukungan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.

3 Koordinator Integrasi Data



YOSSI APRILIA

Penghimpunan, pengolahan dan penetapan data IPK, serta integrasi dengan program Kementerian/Lembaga

4 Matriks Konektivitas IPK-Program K/L



FAJAR FERMI

Penyusunan matriks konektivitas dan pemetaan program Kementerian/Lembaga

5 Kerangka Analisis dan Standar Rekomendasi



NUGROHO

Pengembangan kerangka analisis dan penyusunan standar rekomendasi

6 Petunjuk Teknis KANDAGA PMK



M. KHOIRONI ISHAQ

Penyusunan petunjuk teknis, SOP dan panduan operasional (1 dari 2 anggota tim)

7 Petunjuk Teknis KANDAGA PMK



RAKA SANTOSO

Penyusunan petunjuk teknis, SOP dan panduan operasional (2 dari 2 anggota tim)

8 Blueprint Teknologi dan Dashboard



FERDIANSYAH

Perancangan blueprint teknologi dan dashboard KANDAGA PMK

9 Telaah dan Reviu



WINDY PRATAMA

Telaah substansi, reviu kualitas dan penyempurnaan dokumen

10 Sekretariat



RESKI PUTERI

Dukungan administrasi, dokumentasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan